

**NILAI IDEOLOGIS WACANA POLITIK PEREMPUAN DALAM
“KOLOM PEREMPUAN”: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS
ATAS TEKS DI HARIAN *SUARA MERDEKA***



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2**

Magister Linguistik

**Muhamad Muhajir
13020213410031**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

TESIS

NILAI IDEOLOGIS WACANA POLITIK PEREMPUAN DALAM
“KOLOM PEREMPUAN”: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS
ATAS TEKS DI HARIAN *SUARA MERDEKA*

Disusun oleh

Muhamad Muhajir

13020213410031

Telah disetujui oleh Pembimbing
Penulisan Tesis pada tanggal 14 April 2016

Pembimbing

Dr. Nurhayati, M.Hum.

NIP. 196610041990012001

Ketua Program Studi

Magister Linguistik

Dr. Agus Subiyanto, M.A.

NIP. 196408141990011001

NILAI IDEOLOGIS WACANA POLITIK PEREMPUAN DALAM
“KOLOM PEREMPUAN”: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS
ATAS TEKS DI HARIAN SUARA MERDEKA

Disusun oleh

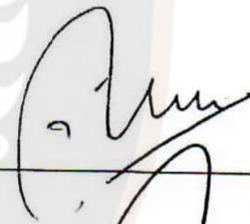
Muhamad Muhajir

13020213410031

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Tesis
pada tanggal 3 Mei 2016
dan Dinyatakan Diterima

Ketua Penguji

Dr. Nurhayati, M.Hum.



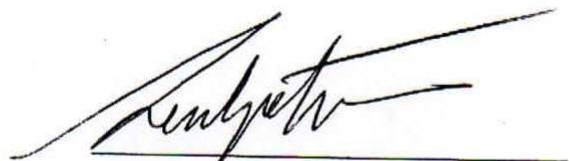
Penguji I

Dr. Agus Subianto, MA..



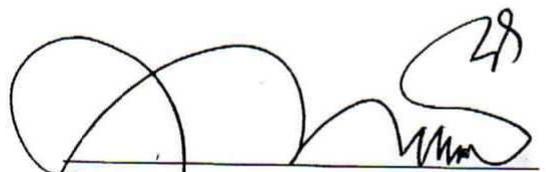
Penguji II

J. Herudjati Purwoko, Ph.D.



Penguji III

Dr. Deli Nirmala, M.Hum.



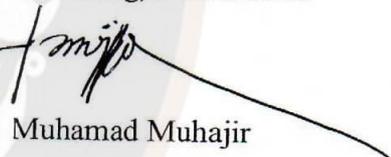
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumber yang disebutkan dan dijelaskan di dalam teks dan daftar pustaka.



Semarang, 3 Mei 2016




Muhamad Muhajir

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, adik-adikku, nenek dan kakek, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



MOTTO

Membacalah dan menulislah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada penulis dalam setiap waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Nilai Ideologis Wacana Politik Perempuan Dalam “Kolom Perempuan”: Kajian Analisis Wacana Kritis Atas Teks di Harian Suara Merdeka”* ini tetap dalam naungan taufiq, hidayah, dan inayahNya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari peran dan sumbangsih dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai sebagai bentuk apresiasi atas dorongan dan bantuannya sehingga dapat memberikan *etos* bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.

Proses penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Agus Subiyanto, M.A selaku ketua program studi Magister Ilmu Linguistik. Terimakasih atas segala perhatian, dukungan, bimbingan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis.
2. Dr. Deli Nirmala, M. Hum. sebagai sekretaris program studi Magister Ilmu Linguistik serta sebagai penguji tesis. Terimakasih atas segala bimbingannya.

3. Dr. Nurhayati, M.Hum selaku dosen pembimbing tesis. Terimakasih atas segala perhatian, bimbingan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
4. J. Herudjati Purwoko, Ph.D selaku penguji tesis serta segenap dosen Magister Ilmu Linguistik yang telah memberikan segala ilmu bagi penulis.
5. Mas Ahlis dan Mas Wahyu selaku TU Magister Linguistik Umum yang telah memberikan kemudahan serta keramahan dalam memberikan pelayanan administrasi.
6. Bapak dan ibu selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, finansial, motivasi, kasih sayang, dan segalanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Adik-adikku, saudaraku, dan Sri Lestari yang telah menjadi motivasiku dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman Magister Linguistik Universitas Diponegoro, baik senior maupun satu kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus teman diskusi.
9. Para guru MA Nurul Ittihad Babalan Kec. Wedung Kab. Demak yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
10. Bapak H. Muh Zen Adv., Drs. H. Ahmad Musafir, Ibu, Hj. Maunah, Mas Jauhari, Mas Ulum, Mas Muhajir Arrosyid, Mas Aniq, Mbak Rini, dan Mbak Fitri adalah orang-orang pemberi saran kepada penulis.

11. Insan Pers LPM Vokal, Insan Pergerakan PMII Komisariat UPGRIS Semarang, Insan Majelis Dzikir, dan teman-temanku yang belum saya sebutkan

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah Swt memberikan balasan atas kebaikan yang telah mereka berikan selama ini. Amin.

Semarang, 3 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

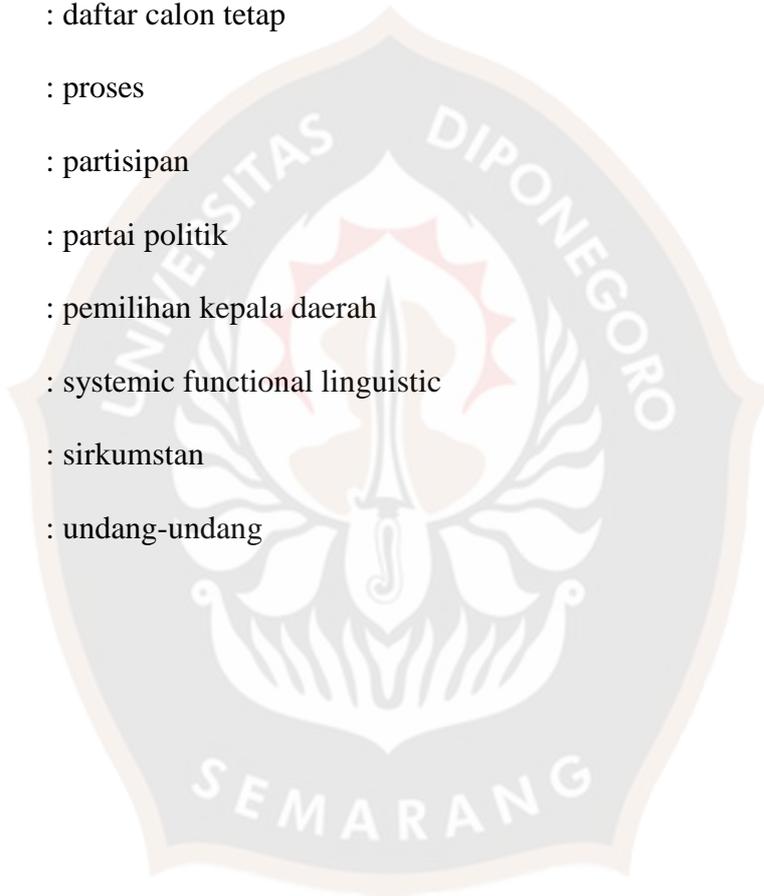
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Peneltian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Definisi Operasional.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Landasan Teori dan Konsep.....	18

2.2.1	Konsep Jender dan Seks.....	18
2.2.2	AWK dan SFL	19
2.2.3	Makna Ideasional	21
2.2.4	Wacana Politik Perempuan	22
2.2.5	AWK, Ideologi Jender, dan ketidakadilan gender	23
2.2.6	Tahapan AWK menurut Fairclough.....	25
2.2.6.1	Tahap Deskripsi	25
2.2.6.1.1	Kosakata	26
2.2.6.1.2	Tata bahasa	28
2.2.6.1.3	Struktur Teks	37
2.2.6.2	Tahap Interpretasi	37
2.2.6.3	Tahap Eksplanasi	38
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Data dan Sumber Data	40
3.3	Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4	Metode dan Teknik Analisis Data.....	41
3.5	Metode Penyajian Hasil Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1	Tahap Deskripsi	44
4.1.1	Kosakata dalam Bahasa Perempuan.....	45
4.1.1.1	Pola Klasifikasi.....	45
4.1.1.2	Kata-kata Ideologis yang Diperjuangkan	47
4.1.1.3	<i>Overwording</i>	49
4.1.1.4	Relasi Makna (Sinonim dan Antonim).....	49
4.1.1.5	Metafora	50
4.1.2	Tata Bahasa dalam Bahasa Perempuan	60
4.1.2.1	Transitivitas	60
4.1.2.1.1	Proses Material	62
4.1.2.1.2	Proses Mental	71

4.1.2.1.3	Proses Eksistensial.....	73
4.1.2.1.4	Proses Relasional.....	76
4.1.2.2	Nominalisasi.....	80
4.1.2.3	Pemasifan	81
4.1.2.4	Penegasian	83
4.1.3	Struktur Teks dalam Bahasa Perempuan.....	84
4.2	Tahap Interpretasi.....	89
4.1.1	Penafsiran Teks.....	92
4.2.1.1	Penafsiran Kosakata dan Tata Bahasa	93
4.2.1.2	Penafsiran Koherensi Lokal.....	95
4.2.1.1	Penafsiran Skemata.....	98
4.1.2	Penafsiran Konteks.....	99
4.1.2.1	Penafsiran Konteks Situasi	99
4.1.2.2	Penafsiran Intertekstualitas.....	102
4.3	Tahap Eksplanasi	103
4.3.1	Level Situasional.....	103
4.3.2	Level Sosial.....	103
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	110
5.1	Simpulan	110
5.2	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR SINGKATAN

Caleg	: calon legislatif
Dapil	: daerah pemilihan
DCS	: daftar calon sementara
DCT	: daftar calon tetap
Pr	: proses
Pt	: partisipan
Parpol	: partai politik
Pilkada	: pemilihan kepala daerah
SFL	: systemic functional linguistic
Sirk	: sirkumstan
UU	: undang-undang



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proses dan partisipan	29
Tabel 2 Kategori atributif dan identifikasi.....	33
Tabel 3 Sirkumstan.....	35
Tabel 4 Proses dan Sirkumstan.....	62
Tabel 5 Proses Material.....	63
Tabel 6 Proses Mental	72
Tabel 7 Proses eksistensial.	74
Tabel 8 Proses Relasional.....	77
Tabel 10 Sistem Taksis dan Logiko Semantik.....	96
Tabel 11 Presentase perempuan di lembaga legislatif.....	104

ABSTRACT

Critical Discourse Analysis (henceforth, CDA) is one of the language studies to analyze ideological values which are contained in a text especially on gender issue. This study aimed to find out the ideological values of the writer through the linguistic features such as vocabularies, grammars and the textual structure. The data were 23 clauses which contained the lexicon '*perempuan*' (woman) in '*Kolom Perempuan*' of *Suara Merdeka* daily newspaper. The data were obtained and collected by using documentation method and purposive sampling technique. Then, the data were analyzed using Functional Systemic Linguistics (SFL) and Critical Discourse Analysis (description, interpretation and explanation). Meanwhile, the analysis was served with formal and informal methods. The results showed that, based on the vocabularies used in '*Kolom Perempuan*', there were (1) classification pattern which represented the attributive marker, (2) ideological wording which depicted the struggle, (3) *overwording* which signified the affirmation of the social problem, (4) a relational meaning (synonymy) which represented the inferiority and (5) metaphor which signified euphemism. Furthermore, in the grammar level which covered the study of the (6) transitivity system (such as material process, mental process, existential process, relational process) which depicted a patriarchal ideology, (7) nominalization and passive sentences which signified the 'hidden agent', and lastly, (8) negation sentences which represented the denial to a reality. In the level of textual structure, the data taken were in the form of written text and considered as an analytical exposition text which comprised thesis, argumentation, elaboration and reiteration. It represented how the writer tried to persuade the feminism ideology to the reader. In sum, ideology which was embodied in the writer is the ideology of patriarchal which involved the 'superior and inferior' relation for men and women in the social structure.

Key words: experiential meaning, SFL, CDA, ideology

INTISARI

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan salah satu kajian bahasa untuk mengungkap nilai-nilai ideologis tertentu khususnya ideologi jender. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai-nilai ideologis penulis teks melalui pilihan bahasa baik kosakata, tata bahasa dan struktur teks berdasarkan makna pengalaman. Data dalam penelitian ini berupa 23 klausa yang mengandung leksikon *perempuan* pada “Kolom Perempuan” di Harian *Suara Merdeka*. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Data tersebut dianalisis dengan teori Sistemik Fungsional Linguistik (SFL) melalui pendekatan AWK (deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi). Sementara itu, data yang sudah teranalisis disajikan melalui metode formal dan informal. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian data pada wacana “Kolom Perempuan” melalui pilihan bahasa terdapat beberapa ideologi yang tercermin. Pertama, leksikon kosakata terdiri atas: pola klasifikasi berideologi penanda atributif, kata-kata ideologis yang diperjuangkan berideologi perjuangan dan penegas problem sosial, *overwording* berideologi perjuangan dan penegas problem sosial, sinonim berideologi *inferior*, dan metafora berideologi *eufimisme*. Kedua, tata bahasa terdiri atas: sistem transitivitas (proses material, proses mental, proses eksistensial, dan proses relasional) berideologi patriarki, nominalisasi berideologi penyembunyian pelaku, pemasifan berideologi penyembunyian pelaku, dan kalimat negasi berideologi pengingkaran terhadap realitas. Ketiga, struktur teks yang terdiri atas tesis, argumentasi, elaborasi, dan reiterasi dengan kategori *analytical exposition* berideologi mempengaruhi. Namun, wacana pada “Kolom Perempuan” berdasarkan makna pengalaman mencerminkan ideologi patriarki.

Kata Kunci : Makna pengalaman, AWK, SFL, dan Ideologi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender berbeda dengan seks. Gender dipahami sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural serta bisa dipertukarkan. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sifat yang melekat pada laki-laki juga bisa dimiliki oleh perempuan. Artinya terdapat laki-laki yang lembut dan ada perempuan yang kuat. Sementara itu, seks diartikan sebagai ciri-ciri biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (kodrat). Misalnya, laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina dan melahirkan (Fakih, 1996:7-8).

Perbedaan pemahaman konsep tersebut memunculkan berbagai persepsi bagi setiap individu dalam merepresentasikan realitas sosial terkait peran perempuan dan laki-laki berdasarkan pengalaman yang dimiliki mereka. Bentuk penggambaran pengalaman tersebut dapat direpresentasikan melalui ragam tulis. Bentuk ragam tulis dapat berupa wacana karena wacana merupakan pembahasan bahasa dan tuturan dalam satu rangkaian konteks dan situasi (Darma, 2009:1).

Salah satu wacana yang menggambarkan gender terdapat pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tanggal 21 Januari tahun 2014. Kolom

tersebut menggambarkan pengalaman penulis terkait persoalan perempuan yang masih diposisikan sebagai sasaran atau korban ketidakadilan di masyarakat akibat ideologi patriarki, yakni perempuan dilabelkan lemah, sedangkan laki-laki kuat. Padahal perempuan bisa kuat, sedangkan laki-laki bisa lemah.

Pemahaman konsep gender yang *salah kaprah* juga berdampak pada produksi wacana yang bersifat diskriminatif, di mana keberadaan perempuan lebih dominan diposisikan sebagai sasaran (*objek*) bukan pelaku (*subjek*). Hal itu terbukti pada “Kolom Perempuan”, di mana posisi perempuan digambarkan melalui satuan lingual *perempuan* sebagai pihak yang pasif berdasarkan sistem transitivitas.

- (1) Namun, kiranya lebih efektif jika ***emansipasi politik perempuan***
 Konj. Sirk:Manner Konj. Pt:Goal
 dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan
 Pr:Material Sirk:Manner
- (2) Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat ***emansipasi perempuan***
 Pt:Actor Pr:Material Pt:Goal
 dalam ranah politik, hanya akan menjadikan ***perempuan***
 Sirk:Location Pr:Material Pt:Goal
 sebagai komoditas politik.
 Pt:Role

Konsep gender yang *salah kaprah* dalam masyarakat seakan dibenarkan bahwa konsep yang kini berkembang serta lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan sudah *wajar* dan tidak perlu dipersoalkan. Padahal, anggapan tersebut tidak benar dan perlu diluruskan karena berdampak pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang khususnya politik. Adanya

perbedaan dalam pemahaman gender sebenarnya tidak menjadi persoalan, asalkan tidak berdampak pada ketidakadilan.

Salah satu contoh kesenjangan di bidang politik, yaitu pemberian kuota 30% pada perempuan untuk partai politik saat mengajukan caleg. Kuota yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2003 menunjukkan ketidakadilan. Kenapa perempuan dibatasi dengan kuota 30%, sedangkan laki-laki 70%. Perbedaan kuota tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum setara dengan laki-laki. Selain itu, perempuan masih dianggap kaum *inferior* sehingga produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum menunjukkan kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan.

Keberadaan wacana gender bukan sekedar kajian tentang perempuan, tetapi juga kajian terhadap isu perempuan, perspektif perempuan, kepentingan perempuan, keadilan, dan kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan), perbaikan kedudukan perempuan, dan faktor yang mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat (Darma, 2009:194). Kemunculan wacana pada “Kolom Perempuan” di atas menggambarkan persoalan perempuan yang dilatarbelakangi ideologi patriarki. Oleh sebab itu, kemunculan wacana tersebut seharusnya menjadi kritik bagi laki-laki dan *auto kritik* bagi perempuan bahwa kesetaraan gender berupa keadilan dalam berbagai peran sosial khususnya politik, keduanya memiliki hak yang sama.

Kemunculan wacana gender dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu dari penulis teks berdasarkan pengalaman dari realitas sosial. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui tujuan tersebut dengan menggunakan makna

pengalaman (*experiential meaning*) melalui pilihan bahasa berupa kosakata, tata bahasa, dan struktur teks dengan *Systemic Functional Linguistic* melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Makna pengalaman ini digunakan untuk mengungkapkan pengalaman atau ide penulis teks melalui media bahasa berupa teks karena di dalamnya mencerminkan realitas sosial.

Teks merupakan rangkaian kata, klausa, atau kalimat yang saling berhubungan dan membentuk suatu makna. Keberadaan teks tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tetapi teks juga bisa ditelaah dari banyak sisi. Seperti konsep yang dikemukakan oleh Halliday, yaitu *context of situation* artinya teks didasarkan pada hubungan yang sistematis antara lingkungan sosial pada satu sisi dan organisasi bahasa yang fungsional pada sisi lainnya. Artinya teks dipahami dari segi makna suatu teks dan konteks situasinya (Halliday, 1985:11).

Wacana politik perempuan, khususnya wacana terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) merupakan momen yang bisa menciptakan sebuah persepsi bagi masyarakat terkait realitas sosial. Momen ini tidak akan diperoleh di bulan yang tidak dilaksanakan Pilkada. Munculnya “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014 dapat dijadikan sebagai kajian wacana dalam rangka mengetahui isu-isu perempuan dan nilai-nilai ideologi yang diperjuangkan perempuan melalui media bahasa.

Penggunaan pilihan bahasa digunakan sebagai alat untuk menggambarkan atau merepresentasikan makna pengalaman terkait realitas sosial. Namun, dibalik pilihan bahasa tersebut terdapat nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan oleh penulis teks yang perlu diungkap (Fairclough, 1988:112). Keberadaan pilihan

bahasa yang diproduksi penulis teks tersebut membentuk sekaligus mempengaruhi pikiran manusia untuk melakukan sesuatu karena pilihan bahasa merupakan bagian dari teks yang sedang melakukan tugas tertentu dalam konteks situasi (Halliday dan Hasan, 1992:13).

Oleh sebab itu, analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji dan mengungkap pemakaian bahasa yang nyata dalam komunikasi (Darma, 2009:15). Selanjutnya, Stubbs (dalam Darma, 2009:15) mengatakan analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulis. Analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya penggunaan bahasa antar penutur. Misalnya, pemakaian bahasa komunikasi sehari-hari.

Analisis wacana dalam ilmu bahasa dikenal dengan analisis wacana kritis, di mana bahasa tidak hanya dipahami sebagai ilmu bahasa semata, tetapi juga dihubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Bahasa diciptakan tidak lepas dari konteks realitas sosial. Oleh sebab itu, bahasa menjadi representasi penulis dalam menggambarkan keadaan tertentu yang terjadi di masyarakat. Selain itu, analisis wacana kritis (AWK) juga mempelajari dominasi serta ketidakadilan yang dijalankan dan dioperasikan melalui wacana khususnya wacana gender. Fairclough mengemukakan bahwa AWK melihat wacana sebagai bentuk praktik sosial dan menggambarkan ideologi tertentu (dalam Darma, 2009:56).

Sementara itu, makna eksperiensial (*experiential meaning*) yang sudah diungkapkan di atas sebagai pegungkap nilai-nilai ideologis memandang klausa sebagai representasi dari pengalaman penulis teks. Ada satu sistem utama yang terlibat dalam pemaknaan ini, yaitu sistem transitivitas. Analisis sistem transitivitas berkaitan dengan tiga aspek, yaitu proses, partisipan, dan sirkumstan. Sistem transitivitas ini dibedakan atas enam tipe proses yaitu proses material, mental, verbal, behavioural, eksistensial dan relasional (Eggins, 2004: 213-214).

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai ideologis produksi wacana tentang politik perempuan pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014 adalah dengan memahami satuan lingual teks dengan kajian *Systemic Functional Linguistic* (SFL). Penggunaan SFL dapat dijadikan alat untuk mengetahui proses dan pilihan bahasa apakah yang digunakan penulis teks dalam merepresentasikan realitas berdasarkan pengalamannya.

Kajian *Systemic Functional Linguistic* (SFL) dalam sistem transitivitas juga menjadi alat yang digunakan untuk mengungkap nilai-nilai ideologis yang tercermin dalam produksi wacana. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melihat bagaimana leksikon *perempuan* dalam kalimat diposisikan. Apakah kehadiran leksikon *perempuan*, baik kata, frase, dan klausa dikategorikan dalam proses material sebagai partisipan *actor*, *goal*, *recipient*, atau *client*. Selanjutnya, apakah dalam proses mental sebagai partisipan *senser* atau *phenomenon*. Apakah dalam proses eksistensial sebagai partisipan *existen*. Sementara itu, apakah dalam proses relasional sebagai partisipan *carrier-attribute* atau *token-value*.

Penelitian terkait kajian terhadap wacana politik perempuan secara linguistik sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti, yaitu yaitu Ummy Hanifah (2004), Dagang Suganda dkk. (2007), Tri Rina Budiarti (2011), Indah (2011), dan Widaningsih (2012). Hal ini menunjukkan bahwa objek kajian tersebut penting karena membahas kajian gender khususnya keberadaan perempuan dalam realitas. Selain itu, wacana politik perempuan yang diproduksi oleh penulis teks juga dapat digunakan mengetahui representasi perempuan dalam menggambarkan realitas sosial dan mengungkap muatan ideologis melalui teks.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pilihan bahasa yang diungkapkan penulis teks dalam wacana, baik dalam kosakata, tata bahasa, dan struktur teks berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*). Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui nilai-nilai ideologis pada pilihan bahasa yang diproduksi oleh penulis teks. Analisis wacana kritis digunakan terhadap wacana pada “Kolom Perempuan” dengan perangkat *Systemic Functional Linguistic* (SFL) melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan tiga tahapan, yakni deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penulis teks dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014 merepresentasikan isu-isu perempuan dalam politik?

2. Nilai-nilai ideologis seperti apa yang digunakan oleh penulis dalam merepresentasikan isu-isu perempuan dalam politik dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014?

1.3 Tujuan

Tujuan umum yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi pilihan bahasa, baik secara kosakata, tata bahasa, dan struktur teks dan nilai-nilai ideologis dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui cara penulis teks dalam merepresentasikan isu-isu perempuan dalam politik dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014.
- b. Menemukan nilai-nilai ideologis dari penulis teks dalam merepresentasikan isu-isu politik perempuan dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bahasa khususnya kajian makna pengalaman (*experiential meaning*) dan nilai-nilai ideologis pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tanggal 21 Januari tahun 2014.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan dan menggali lebih dalam

mengenai penelitian ini terkait makna pengalaman maupun nilai-nilai ideologis yang tercermin di dalam teks wacana.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Tesis ini membahas representasi dan nilai-nilai ideologis wacana politik perempuan dalam “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* tahun 2014 dengan kajian *Systemic Functional Linguistic* (SFL) melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Pengungkapan representasi maupun nilai-nilai ideologis tersebut berdasarkan pada kata, frase maupun klausa yang mengandung leksikon *perempuan*.

Makna Pengalaman berdasarkan kajian Analisis Wacana Kritis (AWK) terdiri atas tiga tahapan, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Tahap deskripsi terdiri atas kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Kategori kosakata terdiri atas pola klasifikasi, kata-kata ideologis yang diperjuangkan, *overwording*, relasi makna (sinonim), dan metafora. Selanjutnya, kategori tata bahasa terdiri atas transitivitas, nominalisasi, pemasifan, dan penegasian. Sementara itu, struktur teks terdiri atas tesis, argumentasi, elaborasi, dan reiterasi. Tahap Interpretasi terdiri atas penafsiran teks dan penafsiran konteks. Penafsiran teks terdiri atas penafsiran kosakata dan tata bahasa, penafsiran koherensi lokal, dan penafsiran skemata. Adapun penafsiran konteks terdiri atas penafsiran konteks situasi dan penafsiran intertekstualitas. Tahap eksplanasi terdiri atas level situasional dan sosial.

1.6 Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional yang bertujuan untuk memperjelas deksripsi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

- Affirmative Action* : Kebijakan yang diambil untuk memberikan rasa keadilan terhadap individu maupun kelompok khususnya persoalan gender.
- Eufimisme : Ungkapan yang digunakan untuk memperhalus sebagai pengganti ungkapan yang dianggap tidak menyenangkan.
- Emansipasi : Persamaan hak dan peran terhadap laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial.
- Gender : Sifat yang bisa dipertukarkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan bukan kodrat (ketentuan ilahi).
- Group* : Terdiri atas kata, frase, atau klausa yang menunjukkan sebuah kategori nominal, verbal, adverbial, dan preposisional.
- Group Adverbial* : Kata, frase, atau klausa yang menunjukkan kategori kata keterangan. Misalnya, dengan cepat, secara alami dan lain sebagainya.
- Group Nominal* : Kata, frase, atau klausa yang menunjukkan kategori kata benda. Misalnya, rumah, perempuan, laki-laki dan sebagainya.

- Group Prepositional* : Kata, frase, atau klausa yang menunjukkan kategori kata depan. Misalnya, di rumah, pada sahabat lama, dan sebagainya
- Group Verbal* : Kata, frase, atau klausa yang menunjukkan kategori kata kerja. Misalnya, membeli, menulis, membaca dan sebagainya.
- Ideologi : Konsep yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempertahankan atau melawan secara alamiah (*taken for granted*).
- Leksikon : Pilihan bahasa (kata) yang mengandung kata perempuan.
- Makna eksperiensial : Makna eksperiensial juga disebut sebagai makna ideasional merupakan makna yang berhubungan dengan pertanyaan 'siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana'. Makna ini dalam linguistik direpresentasikan dengan sistem transitivitas.
- Metaforis : Kata, frase, dan klausa yang mengandung makna *non literal* (penafsiran).
- Modalitas : leksikon yang mengandung makna mengingkari kemungkinan atau keharusan. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata harus, akan, sebaiknya dan lain sebagainya.

- Mindset : Cara pandang terkait persoalan tertentu atau pola pikir yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat terkait persoalan tertentu.
- Nilai ideologis : Nilai tertentu yang tercermin dalam produksi bahasa penulis teks melalui pilihan bahasa yang dikaitkan dengan realitas sosial. Misalnya, patriarki.
- Politik : Cara atau upaya yang dilakukan dalam meraih kekuasaan.
- Perempuan : Istilah yang digunakan bagi non laki-laki karena maknanya lebih mulia (ameliorasi) dibandingkan wanita (perempuan dewasa) dan bini (orang yang sudah punya suami).
- Representasi : Penggambaran terhadap realitas sosial.
- Satuan lingual : Istilah dalam penyebutan frase dan klausa tertentu yang terdapat kata *perempuan*.
- Stereotipe* : Label subjektif yang diberikan kepada perempuan.
- Suara Merdeka : Salah satu media cetak harian di Jawa Tengah yang didirikan pada 11 Februari 1950.
- Wacana : Isi dari teks yang menggambarkan realitas tertentu.
- Wacana politik perempuan : Artikel atau opini pada “Kolom Perempuan” yang membicarakan persoalan politik khususnya Pilkada.

- Kolom perempuan : Rubrik di media cetak yang dikhususkan bagi perempuan untuk mengirimkan tulisan-tulisan terkait persoalan-persoalan perempuan.
- AWK : Sikap *skeptis* dari pemaca dalam melihat produksi bahasa yang ditulis oleh penulis teks karena pembaca berasumsi bahwa bahasa merepresentasikan ideologi-ideologi tertentu melalui pilihan bahasa.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bab II bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memberikan landasan teori dalam penelitian. Tinjauan pustaka juga menjelaskan tentang penelitian relevan yang sudah dilakukan, landasan teori tentang kajian gender dan seks, AWK, SFL, AWK, ideologi gender, dan ketidakadilan gender, dan politik perempuan.

Selanjutnya, bab III menjabarkan jenis penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian analisis data. Sementara itu, bab IV membahas hasil dan pembahasan. Bab IV dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, deskripsi yang meliputi leksikon kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Leksikon kosakata meliputi: pola klasifikasi, kata-kata ideologis yang diperjuangkan, *overwording*, relasi makna (sinonim), dan

metafora. Selanjutnya, tata bahasa meliputi: transitivitas (proses material, mental, eksistensial, dan relasional), nominalisasi, pasifasi, dan kalimat negasi. Sementara itu, struktur teks meliputi: tesis, argumen, elaborasi dan reiterasi. Tahap kedua interpretasi terdiri atas penafsiran teks dan penafsiran konteks. Penafsiran teks terdiri atas penafsiran kosakata dan tata bahasa, penafsiran koherensi lokal, dan penafsiran intertekstualitas. Tahap ketiga eksplanasi terdiri atas level situasional dan sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dengan tulisan ini adalah sebagai berikut Pertama, tesis berjudul “*Konstruksi Ideologi Gender pada Majalah Wanita (Analisis Wacana Kritis) pada Majalah Ummi*” oleh Ummy Hanifah (2004). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bahwa perempuan tidak hanya identik dengan urusan domestik, tetapi *perempuan* diberi kesempatan berkarir sebagaimana tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (1978, 1983, dan 1987) yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Hasil penelitian ini menemukan lima *frame* terhadap peran perempuan, yaitu peran ganda, dikotomi peran dalam keluarga, menjaga niat dalam bekerja, mandiri, dan kesetaraan wanita terhadap laki-laki.

Kedua, penelitian Dagang Suganda, Wagianti, dan Naning Darmayanti (2007) berjudul “*Representasi Sosok Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dalam Wacana Berita pada Harian Umum Utusan Malaysia dan Harian Umum Kompas Indonesia (Kajian Analisis Wacana Kritis)*”. Penelitian ini bertujuan merepresentasikan TKW dalam harian umum nasional Malaysia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TKW dalam pemberitaan kedua koran harian di atas digambarkan sebagai sosok yang marginal dan *inferior*.

Ketiga, Penelitian Tri Rina Budiarti (2011) berjudul “*Representasi Wacana Gender dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Berbahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara intralinguistik terkait idiom dan ungkapan bahasa Indonesia dan Inggris yang mengandung wacana gender. Alat yang digunakan untuk mengkaji adalah Analisis Wacana Kritis dalam mengungkap karakteristik tindakan, historis, konteks, kekuasaan, ideologi, dan representasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa idiom dan ungkapan Berbahasa Indonesia dan Berbahasa Inggris berbentuk *nomina*, frase *nomina*, frase *verba*, frase *adjektiva*, frase preposisi, anak kalimat, kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran.

Keempat, penelitian berjudul “*Pengungkapan Ideologi Patriarki pada Teks Tata Wicara Pernikahan dalam Budaya Jawa*” oleh Indah (2011). Penelitian ini bertujuan mengkaji tuturan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan pada budaya Jawa. Penelitian ini menggunakan kajian Analisis Wacana Kritis. Hasil pertemuan penelitian ini menunjukkan adanya beberapa ideologi masyarakat Jawa dalam melihat laki-laki dan *perempuan* dalam institusi pernikahan. Salah satu ideologi tersebut berupa ideologi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan .

Kelima, penelitian Windaningsih berjudul “*Marginalisasi Perempuan dalam Pemberitaan Harian Jawa Pos tentang Pekerja Migran Perempuan*” (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Pemberitaan Harian Jawa Pos tentang Pekerja Migran Perempuan Indonesia tahun 2009) (2012). Penelitian ini

bertujuan mengetahui marginalisasi perempuan dalam berita tentang pekerja migran perempuan di harian *Jawa Pos* Surabaya dengan mengkaji bagaimana representasi, relasi, dan identitas yang ditampilkan dalam berita terkait sistem produksi, sistem konsumsi berita, konteks budaya sosial masyarakat, dan ideologi harian *Jawa Pos* dengan kajian Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Hasil temuan dapat disimpulkan bahwa pemberitaan harian *Jawa Pos* didominasi berita yang menyudutkan perempuan dengan penggunaan kata dihajar, penulisan status janda, dan menggunakan kalimat pasif yang menunjukkan pekerja migran perempuan cenderung pasif menerima siksaan dari majikan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian yang mengkaji persoalan gender dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, yaitu Ummy Hanifah (2004), Dagang Suganda dkk. (2007), Tri Rina Budiarti (2011), Indah (2011), dan Widaningsih (2012). Hal ini menunjukkan bahwa objek kajian tersebut penting karena untuk mengetahui representasi perempuan dalam teks. Selain itu, kajian terkait gender juga untuk mengungkap nilai-nilai ideologis penulis teks dalam memproduksi teks.

Jadi, kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pengungkapan representasi pilihan bahasa, baik kosakata, tata bahasa, dan struktur teks yang di dalamnya terdapat satuan lingual *perempuan* berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*). Selain itu, penelitian ini juga mengungkap nilai-nilai ideologis dengan pisau SFL (*Systemic Functional Linguistic*) melalui pendekatan AWK, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Pendekatan AWK digunakan untuk mengungkap nilai-nilai ideologis apa yang

terkandung dalam bahasa dan menjelaskan mengapa bahasa tersebut digunakan oleh penulis teks dalam wacana.

Perbedaan tersebut dapat disimpulkan kelima penelitian sebelumnya hanya meneliti wacana gender menggunakan kajian SFL dengan pendekatan AWK. Namun, penelitian pada “Kolom Perempuan” menggunakan kajian SFL dengan pendekatan AWK berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*), yaitu sistem transitivitas. Wacana pada kolom tersebut merupakan representasi penulis teks terkait realitas sosial khususnya persoalan gender. Meskipun beberapa penelitian dahulu sudah dilakukan dengan kajian SFL dan pendekatan AWK, tetapi tidak menggunakan makna pengalaman.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Konsep Gender dan Seks

Gender lebih mengarah pada peran yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sedangkan seks berkaitan dengan biologis (alat kelamin). Persoalan gender tidak lepas dari teori *nature* dan *nurture*. Teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan diakibatkan oleh faktor biologis, sedangkan teori *nurture* perbedaan keduanya diakibatkan oleh konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut berdampak pada perbedaan gender terhadap keduanya sehingga mengakibatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, juga berdampak pada ketidakadilan berupa marginalisasi, stereotip, dan subordinasi (Murniati, 2004:XVIII-XIX).

Kerancuan dalam memaknai gender dan seks juga menimbulkan anggapan perempuan *inferior*, sedangkan laki-laki *superior*. Akhirnya kesalahpahaman

tersebut berpengaruh terhadap penggunaan bahasa (Wareing, 1999:67) dalam (Santoso, 2009:31) mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat ketidaksimetrisan kata yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan . Kata-kata yang bermakna laki-laki bersifat umum dibandingkan perempuan. Gelar *Mr* hanya bisa melekat bagi laki-laki, sedangkan gelar *Miss*, *Mrs*, dan *Ms* dikenakan bagi perempuan . Selain itu, kata pengusaha secara umum melekat pada laki-laki. Kata pengusaha jika diperuntukkan bagi wanita, maka menjadi pengusaha perempuan

Gender dan seks adalah sesuatu yang berbeda. Gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral different*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial bukan kodrat (ketentuan Tuhan), melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan di masyarakat dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Selanjutnya, seks merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang mengacu pada ciri-ciri biologis, yaitu laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina (Fakih, 1999:7-8).

2.2.2 Analisis Wacana Kritis dan *Systemic Functional Linguistics*

Menurut Fairclough dalam Darma (2009:89), AWK digunakan untuk menganalisis pemakaian bahasa sebagai praktik sosial oleh individu dalam merefleksikan sesuatu realitas sosial. Keberadaan bahasa sebagai praktik sosial mengandung dua implikasi. Pertama, wacana sebagai bentuk tindakan seseorang yang digunakan dalam menggambarkan realitas sosial. Kedua, wacana mengandung hubungan timbal balik dengan struktur sosial, kelas, dan relasi sosial

lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu seperti di pendidikan, sosial, dan klasifikasi lain.

Keberadaan AWK juga dimaknai sebagai upaya atau proses (penguraian) untuk memberikan penjelasan sebuah teks yang sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu. Selain itu, kehadiran wacana juga dipahami sebagai upaya perjuangan yang dilakukan pembuat teks karena mengandung ideologi tertentu. Jadi, kehadiran AWK merupakan alat untuk mengungkap maksud dari penulis atas pernyataan melalui teks yang menggambarkan realitas sosial (Darma, 2009:49). Teks diartikan sebagai pilihan semantis dalam konteks sosial, yaitu suatu cara pengungkapan makna melalui bahasa lisan atau tulis. Bukan hanya itu, teks juga diartikan sebagai deretan beberapa kalimat sebagai bentuk “realisasi teks” daripada sebuah teks itu sendiri Halliday dalam Darma (2009:189-190).

Systemic Functional Linguistic (SFL) gagasan dari Halliday menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengkaji AWK. SFL merupakan salah satu kajian bahasa fungsional yang mengkaji makna teks untuk mengetahui bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial. Selain itu, SFL juga digunakan untuk menganalisis bahasa sebagai fenomena sosial, sedangkan kata “fungsional” diartikan untuk memahami makna karena teks tidak dipandang sebagai bagian-bagian yang terpisah tetapi dipandang keseluruhan secara bersama dengan beberapa sudut pandang yang berbeda (Halliday dan Hasan, 1984: 32).

Dalam pendekatan SFL, unit terkecil dalam analisis bahasa adalah klausa dikarenakan setiap pemikiran seseorang diwujudkan dalam sebuah klausa.

Ketika ide-ide yang disampaikan seseorang itu kompleks, maka akan dihasilkan klausa kompleks. Teori yang dibuat oleh M.A.K Halliday ini memandang bahasa sebagai pilihan makna yang meliputi metafungsi *ideasional*, *interpersonal*, dan *tekstual*, yang masing-masing diungkapkan melalui transitivitas, modus, dan struktur tema-remas dalam sebuah klausa (Tomasowa, 1994: 35).

AWK dan SFL digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa sebagai sebuah aktifitas sosial sehingga bahasa dipelajari dalam konteks sosial tertentu (Young dan Horison, 2004:2). SFL digunakan sebagai pisau analisis, kemudian temuan-temuan dari SFL diinterpretasikan berdasarkan realitas sosial sehingga menjadi analisis kritis.

2.2.3 Makna Ideasional

Dalam bagian ini, *Ideasional Meaning (experiential meaning)* merupakan salah satu metafungsi bahasa. *Ideasional meaning* digunakan untuk menggambarkan pengalaman penulis teks yang direalisasikan melalui pola transitivitas dan klausa. Adapun fungsi klausa yang mengungkapkan aspek pengalaman dari makna disebut sebagai sistem transitivitas (Tomasowa, 1994: 38).

Komponen *experiential meaning* merupakan kajian yang digunakan untuk menganalisis klausa sebagai representasi dari pengalaman yang dimiliki oleh individu dalam kelompok masyarakat. Ada satu sistem utama yang terlibat dalam pemaknaan, yaitu sistem transitivitas. Analisis transitivitas sebuah klausa berkaitan dengan tiga aspek, yaitu proses, partisipan, dan *circumstance*. Proses direalisasikan dalam kelompok verbal dari klausa, partisipan direalisasikan dalam kelompok nominal, dan *circumstance* diekspresikan melalui kelompok adverbial

(kata keterangan) atau frasa preposisi. Sistem transitivitas ini dibedakan atas enam tipe proses, yaitu proses material, mental, verbal, behavioural, eksistensial dan relasional (Eggins, 2004: 233-234) yang akan dijelaskan pada bab IV.

2.2.4 Wacana Politik Perempuan

Dalam ranah politik, peran dan posisi perempuan masih dinomorduakan. Hal itu diakibatkan oleh konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan tidak cocok di publik melainkan di bidang domestik. Keterlibatan perempuan dalam politik bertujuan memperoleh kesetaraan peran dan terciptanya keadilan sosial. Melalui politik, perempuan akan memperjuangkan nasib kaumnya karena berbagai bentuk kebijakan dan pengambil keputusan berada di lembaga legislatif dan bisa diraih dengan cara berpolitik (Murniati, 2004:117-119).

Keterlibatan perempuan dalam politik bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi di dalamnya. Menurut Huntington dan Nelson (1995:491). Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual, kolektif, terorganisir, spontan, legal, ilegal, efektif maupun tidak efektif.

Salah satu bentuk partisipasi perempuan berpolitik bisa dilihat pada era pasca reformasi tahun 1999. Era ini menunjukkan kebangkitan gerakan politik perempuan, terutama untuk melakukan penyadaran perempuan berpartisipasi dalam politik. Salah satu agenda yang diusung adalah kuota 30% bagi perempuan yang termaktub dalam UU No 10 Tahun 2008 pasal 65, ayat 1 juga menyatakan

adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif (Sjarifuddin, 2009:34).

Dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, juga dinyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all form of discrimination againts women*) melalui UU No. 7 tahun 1984 (Sihite, 2007:138).

2.2.5 AWK, Ideologi Gender, dan Ketidakadilan Gender

AWK mempelajari dominasi suatu ideologi serta ketidakadilan yang dijalankan dan dioperasikan melalui wacana. Selain itu, AWK juga menjadi konsep sentral dalam melihat praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Keberadaan ideologi ini dikonstruksikan oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat kesadaran khalayak, bahwa dominasi tersebut diterima secara *taken for granted* (alamiah) (Darma, 2009:56-57).

Ideologi menurut Wooffitt (2005:140) adalah kepercayaan yang memobilisasi praktik dan sudut pandang yang mempertahankan ketidaksetaraan di masyarakat. Selanjutnya, Fairclough (1992:87) menyatakan bahwa ideologi memiliki peranan yang penting dalam mengkonstruksi realitas (realitas fisik,

hubungan sosial, maupun identitas masyarakat) yang memberi dasar bagi banyak dimensi, yaitu dasar dari bentuk dan makna wacana, kontribusi proses, proses reproduksi dan transformasi dominasi wacana.

Kajian AWK berupa wacana gender tidak lepas dari empat ideologi gender, yakni ideologi patriarki, ideologi familialisme, ideologi ibuisme, dan ideologi dominan. Ideologi patriarki memandang bahwa ayah mempunyai hak mutlak atas anggota keluarga. Ideologi familialisme mengkonstruksikan perempuan untuk berperan dalam urusan domestik. Ideologi ibuisme melegalkan tindakan apapun yang diambil oleh perempuan demi keluarga, kelompok, kelas sosial, dan negara tanpa mengharapkan kekuasaan atau *prestise* sebagai imbalan. Sementara itu, ideologi umum memberlakukan nilai pemingitan (seklusi) bagi perempuan dan pengucilan (eksklusi) perempuan di bidang-bidang tertentu. Ideologi ini berkembang menjadi ideologi dominant (Darma, 2009:174)

Perbedaan gender juga berdampak pada ketidakadilan gender. Padahal, perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Berbagai bentuk ketidakadilan gender dapat berupa lima hal. *Pertama*, marginalisasi, yaitu adanya peminggiran perempuan dalam bidang pekerjaan dengan memberi upah yang kecil daripada laki-laki. Kedua, *subordinasi*, yaitu adanya anggapan perempuan tidak penting atau tidak berguna. Selain itu, perempuan diasumsikan atau dilabelkan stereotip sehingga masyarakat beranggapan tugas perempuan melayani suami, mengurus anak, dan lain sebagainya. *Ketiga*, diskriminasi, yaitu adanya anggapan perempuan emosional, irasional, dan ketergantungan. Bentuk diskriminasi ini merupakan *stereotip* bagi

perempuan sehingga menimbulkan perempuan sulit tampil di publik. *Keempat*, represi, yaitu adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender bagi perempuan berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain (Fakih, 1996:72-75).

2.2.6 Tahapan Analisis Wacana Kritis Menurut Fairclough

Dalam memahami bahasa sebagai wacana dan praktek sosial, maka perlu dianalisis mengenai hubungan antar teks, proses, dan kondisi sosial teks. (Fairclough,1989:26). Menurut Fairclough ada tiga tahapan untuk menganalisis bahasa sebagai praktik sosial, yakni tahapan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

2.2.6.1 Tahap Deskripsi

Dalam tahap ini, fitur-fitur yang berkaitan dengan makna pengalaman dijelaskan tanpa dikaitkan dengan aspek lain. Artinya teks dideskripsikan berdasarkan makna literal. Adapun Makna Pengalaman merupakan makna yang berkaitan dengan siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana yang lebih dikenal dalam teori SFL dengan partisipan, proses, dan sirkumstan. Menurut (Fairclough,1989:110-112) fitur-fitur linguistik pada tahap deskripsi terdiri atas kosakata, tatabahasa, dan struktur teks. Fitur kosakata meliputi pola klasifikasi, kata-kata ideologis, dan *overwording*, relasi makna (sinonim), dan metafora. Tatabahasa meliputi transitivitas, nominalisasi, pemasifan, dan penegasian. Sementara itu, struktur teks meliputi tesis, argumen, elaborasi, dan reiterasi.

2.2.6.1.1 Kosakata dalam Makna Pengalaman

Menurut Fairclough (1989:110-111), makna pengalaman berupa kosakata dapat diwujudkan dalam pelbagai pilihan bahasa yang terdiri atas: (a) pola klasifikasi, (b) kata yang secara ideologis diperjuangkan, (c) *overwording*, (d) relasi makna (sinonim), dan (e) metafora.

Pola klasifikasi (*classification scheme*) merupakan kosakata yang diorganisasikan ke dalam pelbagai tipe wacana (Fairlough, 1989:114). Fungsi klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi realitas dengan menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa dikategorikan bersifat umum dan khusus, jika diperuntukkan bagi laki-laki-laki tidak diberikan penanda (bersifat umum), sedangkan bahasa diperuntukkan bagi perempuan terdapat penanda atau *attribute* (bersifat khusus). Misalnya, pengusaha (laki-laki) – pengusaha perempuan.

Menurut Fairclough (1989:114), kosakata yang diperjuangkan merupakan kata-kata yang secara ideologis mengandung maksud dan tujuan tertentu yang hendak disampaikan kepada pembaca. Kosakata tersebut tidak hanya sebagai pelengkap kalimat saja, tetapi kehadirannya dimaksudkan sebagai penegasan kepada publik agar setiap kata yang diproduksi mengandung muatan ideologi tertentu. Misalnya, revolusi mental dan Indonesia hebat.

Menurut Fairclough (1989:115), *Overwording* merupakan pengulangan kata secara berulang-ulang karena terdapat ideologi tertentu yang hendak disampaikan kepada pembaca. Pengulangan bisa berupa kata maupun frase. Selain itu, adanya pengulangan tersebut menunjukkan ideologi tertentu yang

diperjuangkan. Misalnya, meningkat – berkembang dan orang tua kandung – ibu dan bapak.

Relasi makna merupakan pilihan bahasa (kata, frase, atau klausa) yang memiliki hubungan kedekatan makna dan mengandung signifikansi ideologis. Salah satu relasi makna, yaitu sinonim. Bentuk sinonim merupakan pilihan bahasa yang memiliki makna yang sama atau hampir sama dengan kata yang lain. (Fairclough, 1989: 116). Misalnya, bunga desa bersinonim dengan wanita idaman.

Metafora merupakan sarana yang mewakili salah satu aspek dari pengalaman seseorang tentang realitas. Pengalaman tersebut tidak berarti terbatas pada jenis wacana cenderung diasosiasikan *stereotype*. Misalnya, puisi dan sastra (Fairclough, 1989:119). Metafora juga diartikan sebagai bahasa kiasan berupa kata atau frase yang digunakan untuk mendiskripsikan sesuatu yang tidak memiliki acuan secara literal (McGlone, 2007:109).

Menurut Lakoff dan Johnson dalam buku *Metaphors We Live By* pada tahun 1980, metafora tidak hanya digunakan dalam karya sastra, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Lakoff dan Johnson (2003:3) menjelaskan bahwa metafora dapat merefleksikan segala apa yang dialami, dirasakan, dan sedang dipikirkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, disebut metafora konseptual.

Dalam memahami makna metaforis terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, ranah target (*target domain*) adalah pengertian dasar yang sama dengan tenor atau topik (yang dibicarakan). Kedua, ranah sumber (*source domain*) adalah pengertian dasar yang sama dengan istilah *vehicle* atau wahana (pembanding). Ketiga, kesamaan (*ground*) adalah konsep yang menunjukkan

kesamaan yang dapat menghubungkan antara target dan sumber (Nirmala, 2012:70). Misalnya, korupsi adalah penyakit. korupsi sebagai target, sedangkan penyakit sebagai sumber. Jadi, koseptualisasi dari contoh metaforis tersebut adalah korupsi diibaratkan sebagai suatu hal yang merugikan serta harus dimusnahkan karena dapat merusak negara dan rakyat.

2.2.6.1.2 Tata bahasa dalam Makna Pengalaman

Makna pengalaman berupa tata bahasa terdiri atas: (a) transitivitas, (b) nominalisasi, (c) pemasifan, dan (d) penegasian (Fairclough, 1989:110-111).

2.2.6.1.2.1 Transitivitas

Istilah transitivitas merupakan konsep semantik karena berupaya menjelaskan atau memaparkan makna pengalaman (*ideational meaning*) dari seseorang. Sistem transitivitas berkaitan dengan tiga aspek, yaitu proses, partisipan, dan sirkumstan. Proses dikatakan sebagai aktivitas yang terjadi dalam klausa atau disebut verba. Partisipan adalah orang atau benda yang terlibat dalam proses tersebut. Sirkumstan merupakan lingkungan tempat proses yang melibatkan partisipan terjadi. Proses direalisasikan dalam kelompok *verbal* (*verbal group*) dari klausa, partisipan direalisasikan dalam kelompok *nominal* (*nominal group*), dan sirkumstan diekspresikan melalui kelompok *adverbial* (*adverbial group*) atau kelompok preposisi (*prepositional group*) (Eggins, 2004:213-214)

Menurut Halliday (2004:56), ada tiga pengertian subyek yang bisa dikenali dalam sistem transitivitas, yaitu subjek psikologis, subjek gramatikal, dan subjek logis. Subjek psikologis berarti subjek yang merupakan pokok dari

pesan (tema). Subjek gramatikal berarti subjek yang hal ihwalnya dipredikasi (subjek). Sementara itu, subjek logis berarti pelaku tindakan (aktor).

Contoh:	Buku itu	adik saya	diberi	oleh ibu
	Subjek	Subjek		Subjek logis
	psikologis	gramatikal		
	Tema	Rema		Aktor

Tabel 1. Proses dan Partisipan

No	Proses (Pr)	Partisipan (Pt)
1	Material	Pelaku (<i>ctor</i>), tujuan (<i>goal</i>), lingkup (<i>range</i>), penerima (<i>recipient</i>), penderita (<i>client</i>)
2	Mental	Pencerap (<i>Senser</i>), fenomena (<i>phenomenon</i>)
3	Eksistensial	wujud (<i>existent</i>)
4	Relasional	Pembawa/ <i>atribut</i> (<i>Carrier/attribute</i>), <i>Token-Nilai</i> (<i>Value</i>)

2.2.6.1.2.1.1 Proses Material

Egins (2004:215) menyatakan bahwa proses “melakukan” disebut sebagai proses material. Pada dasarnya proses material adalah wujud dari melakukan sesuatu. Jadi, proses material adalah proses melakukan atau proses tindakan. Dua partisipan yang sering muncul adalah *actor* dan *goal*. Partisipan *actor* merupakan unsur klausa yang melakukan perbuatan atau tindakan, sedangkan *goal* merujuk pada bagian teks yang menyatakan tujuan atau peruntukkan dari apa yang dibicarakan.

Dalam proses material, terdapat juga *beneficiary* yang bertujuan untuk mengungkapkan kepada siapa atau untuk siapa proses yang terkait berlangsung. *Beneficiary* biasanya digunakan dalam bentuk proses material, verbal, dan relasional. *Beneficiary* terdiri atas dua partisipan, yaitu *recipient* dan *client*. *Recipient* adalah unsur yang kepadanya barang diberikan, sedangkan *client* adalah unsur yang kepadanya jasa dilakukan (Gerot and Wignel, 1995:63).

Penggunaan partisipan *recipient* dan *client* dalam Bahasa Indonesia biasanya dengan menambahkan sufiks **-kan** pada verbanya dan preposisi **kepada** menandai *recipient*, sedangkan **untuk** sebagai penanda *client*.

Contoh: Roy	menulis	surat	
Pt:Actor	Pr:Material	Pt:Goal	
Roy	dimarahi	oleh Budi	
Pt:Goal	Pr:Material	Pt:Actor	
Budi	menjual	mobil	pada Adi
Pt:Actor	Pr:Material	Pt:Goal	pt: Recipient
Dokter	membuat	resep	untuk Budi
Pt:Actor	Pr:Material	Pt:Goal	Pt:Client

2.2.6.1.2.1.2 Proses Mental

Halliday (dalam Eggins,2004:225) menyatakan bahwa proses yang menandakan makna berpikir atau merasakan disebut proses mental. Halliday membagi proses mental menjadi tiga kelas, yakni (1) kognisi, yang berkaitan dengan penggunaan otak (*thinking, knowing, understanding*); (2) afeksi, yang berhubungan dengan perasaan atau hati (*liking, fearing, hate*); dan (3) persepsi, yang bertalian dengan penggunaan indra untuk berproses (*seeing dan hearing*). Partisipan dalam proses

mental adalah *senser* dan *phenomenon*. *Senser* adalah siapa yang merasakan, berpikir, yakin, dan mengamati. *Phenomenon* adalah apa yang dirasa, dipikir, diyakini, dan diamati oleh *senser*.

Contoh: Ujian Nasional dipikirkan oleh Roy
Pt:Phenomenon Pr:Mental Pt:Senser [Cognition]

Budi beci suntikan
Pt:Senser Pt:Mental Pt:Phenomenon [Affection]

Aldo melihat kebakaran
Pt:Senser Pt:Mental Pt:Phenomenon [Perception]

2.2.6.1.2.1.3 Proses Wujud (Eksistensial)

Proses eksistensial merupakan proses yang menunjukkan keberadaan atau adanya sesuatu. Keberadaan yang dimaksud menyangkut kejadian, keadaan tempat, eksistensi diri dari pelibat. Partisipan yang dihadirkan oleh proses eksistensial adalah *existent* atau apa yang ada/adanya (Eggins, 2004:239).

Contoh: Di sekolah terdapat siswa yang rajin dan malas.

Sirk:Location Pr:Eksistensial Pt:Existen

Dalam pembukaan Seminar ada presiden dan wakil presiden

Sirk:Location Pr:Eksistensial Pt:Existen

2.2.6.1.2.1.4 Proses Relasional

Proses relasional merupakan proses yang menggeneralisasikan atau menghubungkan pengalaman ke hal lain. Proses relasional mencakup mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan kepemilikan (Halliday dalam Eggins, 2004:233).

Proses mengklasifikasi dijelaskan dengan partisipan *carrier* sebagai partisipan yang ditandai, dan *atribute* sebagai klasifikasi atau deskripsi dari sesuatu yang ditandai. Mengidentifikasi dijelaskan dengan partisipan *token* sebagai apa yang didefinisikan, dan partisipan *value* digunakan untuk mengidentifikasi. Sementara itu, *posesif* atau kepemilikan dijelaskan dengan partisipan *possessor* sebagai pemilik, dan *possessed* sebagai apa yang dimiliki. Keadaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan apakah keadaannya digunakan untuk memberikan kualitas pada sesuatu (*atribute*) atau menentukan/memberikan identitas sesuatu (*identifying*). Dalam proses atributif (*atribute*), peran partisipan adalah pembawa (*carrier*) dan atribut (*atribute*). Sementara itu, dalam proses identifikasi (*identifying*), peran partisipan adalah *token* dan *value* (Halliday, 2004: 256-259).

Tipe Intensif merupakan hubungan antara kedua belah pihak yang mempunyai hubungan kesamaan; entitas yang satu adalah sama dengan entitas lainnya. Atributif dengan kategori atribut kualitatif diberikan kepada “*carrier*”, artinya “x adalah anggota dari kelas y”. Jadi kalimat *Roy adalah gemuk* berarti ‘Roy adalah anggota dari kelas orang gemuk’. *Verbal group* dalam proses ini meliputi : *adalah, menjadi, bisa, memiliki, kelihatan, dan bersifat*, sedangkan atribut direalisasikan dengan *nominal group*. Klausa atributif adalah jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan *apa ?* atau *bagaimana* Misalnya *apa Roy itu? bagaimana Roy?*. Klausa sejenis ini tidak bisa dibalik dan tidak mempunyai bentuk pasif. Berikut adalah contoh-contoh dari klausa atribut intensif, sirkumstansial, dan posesif. Tipe sirkumstansial ini, hubungan antara

kedua hal adalah terdiri dari waktu, tempat, cara, penyebab, penyerta. Sementara itu, posesif menunjukkan kepemilikan (Halliday, 2004: 216).

Tabel 2. Kategori Atributif dan Identifikasi

Tipe	Kategori	
	Atributif	Identifikasi
Intensif	Aldo gemuk	Presiden RI ke-1 adalah Soekarno
Sirkumstansial	Ujiannya pada hari Selasa	Besok HUT ke-10-nya
Posesif	Budi memiliki buku <i>best seller</i>	Buku <i>best seller</i> milik Budi

2.2.6.1.2.1.5 Sirkumstan

Istilah sirkumstan mencakup semua pertanyaan ‘kapan’, ‘di mana’, ‘mengapa’, ‘bagaimana’, ‘berapa banyak’, dan ‘apa’. Sirkumstan dalam klausa dijelaskan dengan kata keterangan atau frasa preposisi (Eggins, 2004:222). Terdapat tujuh macam sirkumstan yang akan dijelaskan berikut ini:

- a) Waktu (*urutan/temporal*), sirkumstan yang menyatakan “kapan” dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “kapan?”, “berapa sering?”, serta “berapa lama?”. Contoh: Risa tiba di Semarang **kemarin siang**.
- b) Tempat (*lokasi/spatial*), sirkumstan yang menyatakan “di mana”, dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “di mana?” dan “berapa jauh?”. Contoh: Risa tiba **di Semarang** kemarin siang.
- c) Manner, sirkumstan yang menyatakan “bagaimana”.
 - (1) alat (*means*) menyatakan “dengan alat apa”. Contoh: Risa tiba di

Semarang **dengan mobil** kemarin siang.

(2) kualitas (*quality*) menyatakan “seperti apa hal itu terjadi/dilakukan”.

Contoh: Mobil itu melaju **dengan cepat**.

(3) pengibaratan (*comparison*) menyatakan “bagaimana sesuatu terjadi atau dilakukan”. Contoh: Bu guru menyayangi semua siswanya **seperti** dia menyayangi anak kandungnya.

d) Muasal (*cause*), sirkumstan yang menyatakan “mengapa”.

(1) alasan (*reason*) menyatakan “apa yang menyebabkan suatu terjadi” dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “mengapa?” atau “bagaimana?”.

Contoh: Sekolah diliburkan sementara **akibat banjir**.

(2) tujuan (*purpose*) menyatakan “tujuan” dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “untuk apa?”. Contoh: Rika rajin belajar agar lolos ujian.

(3) peruntukan (*behalf*) menyatakan “peruntukan” dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “untuk siapa?”. Contoh: Ibu membelikan baju **untuk anaknya**.

e) Kelengkapan (*accompaniment*), sirkumstan yang menyatakan “kesertaan atau ketidaksertaan seseorang atau sesuatu”, dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “siapa lagi/siapa saja?” atau “apa lagi/apa saja?”. Contoh: Bapak datang **membawa oleh-oleh**.

f) Perihal (*matter*), sirkumstan yang menyatakan “tentang apa” atau “merujuk pada apa”, dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “tentang apa?”. Contoh: Ibu bercerita tentang **peringatan hari ibu pada 22 Desember**.

g) Peran (*role*), sirkumstan yang menyatakan “sebagai apa”, dan dapat ditelusuri dengan pertanyaan “sebagai apa?”. Contoh: Budi berperan dalam drama **sebagai tokoh utama**.

Tabel 3. Sirkumstan

No	Sirkumstan	Sub kategori	Identifikasi	Contoh
1.	Rentang	Waktu dan tempat	Berapa lamanya?	Dia berjalan dua jam Mereka berjalan 5
2.	Lokasi	Waktu dan tempat	Kapan? Di mana?	Pameran buku diselenggarakan di
3.	Cara	Alat Kualitas	Dengan apa? Seperti apa?	Rudi tiba di Kendal dengan mobil
4.	Sebab	Alasan Tujuan	Mengapa? Untuk apa?	Sekolah diliburkan sementara akibat banjir.
5.	Penyerta	-	Dengan siapa?	Roy datang dengan adiknya.
6.	Perihal	-	Tentang apa?	Dia bicara mengenai linguistik.
7.	Peran	-	Sebagai apa?	Saya bicara sebagai sahabat.

2.2.6.1.2.2 Nominalisasi

Nominalisasi merupakan pengubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) dengan penghilangan pelaku sehingga yang ditekankan bukan lagi tindakan, tetapi peristiwa (Fairclough, 1989:125). Menurut Schleppegrell dalam

(Fill, 2001:226), nominalisasi merupakan cara yang digunakan dalam merubah kata kerja menjadi kata benda tanpa melibatkan pelaku. Penghilangan pelaku tersebut dimaksudkan untuk menyamarkan (abstrak) dari tanggungjawab yang dilakukan oleh agen. Misalnya, polisi menembak demonstran menjadi penembakan demonstran.

2.2.6.1.2.3 Pemasifan

Proses pemasifan atau pasifasi merupakan cara yang dilakukan dalam pembuatan kalimat tanpa menghadirkan pelaku, yaitu dengan merubah kata aktif menjadi kata pasif. Penghilangan pelaku bertujuan untuk menyembunyikan atau melindungi agen. Selain itu, penghilangan tersebut dimaksudkan menghindari *pleonasmie* (pemborosan kata) karena informasi yang disampaikan sudah jelas (Fairclough, 1989:125). Menurut Kahn dalam (Fill, 2001:243) penggunaan kalimat pasif digunakan untuk menyembunyikan agen dengan maksud *eufimisme* (menyembunyikan kebenaran dan menghindari pemikiran kritis). Misalnya, Buku dibaca.

2.2.6.1.2.4 Penegasian

Penggunaan kalimat negasi dimaksudkan untuk menyangkal atau mengingkari apa yang sebenarnya terjadi atau diungkapkan dalam realitas (Fairclough, 1989:125). Bentuk negasi berfungsi mengubah pernyataan positif menjadi pernyataan negatif (*realis assertion* menjadi *irrealis assertion*). Dalam penggunaan pernyataan negatif, penulis teks mempunyai ideologi yang ingin disampaikan kepada pembaca, yaitu menyangkal. Misalnya, membaca menjadi tidak membaca.

2.2.6.1.3 Struktur Teks

Menurut Martin dalam (Sinar, 2002:56-57) struktur teks atau genre merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan ide dari konteks pikiran yang berdiri sebagai sebuah sistem semiotik di luar bahasa serta bukan merupakan bagian dari register melainkan satu level di atasnya. Struktur teks memiliki berbagai ragam genre. Namun, dalam penelitian ini, ragam yang digunakan penulis teks adalah *analytical exposition*. Teks analisis eksposisi adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi dalam realitas sosial. Teks ini berfungsi untuk membujuk pembaca agar meyakini apa yang disampaikan oleh penutur dalam teks (Gerot, 1995:197).

Teks eksposisi mempunyai struktur genre dalam penulisannya yang terdiri dari tesis, argumen (*point* dan *elaboration*), dan reiterasi. Tesis merupakan tahap bagi penulis teks untuk memperkenalkan tentang topik atau gagasan utama yang akan dibahas. Argumen adalah cara yang digunakan penulis teks dalam mengungkapkan ide-ide yang mendukung topik. Point merupakan penguraian kembali dari penulis terkait topik pertama. *Elaboration* merupakan pengembangan dan dukungan terhadap argumen yang disampaikan penulis teks. Selanjutnya, reiterasi merupakan penegasan kembali dari penulis teks terkait gagasan pertama atau dikatakan sebagai rekomendasi (Gerot, 1995:199).

2.2.6.2 Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan cara menafsirkan produksi teks dengan konteks sosial yang terjadi pada saat itu. Dalam melakukan interpretasi, terdapat dua hal yang harus

dilakukan oleh interpreter. Pertama, interpretasi teks. Kedua, interpretasi konteks. Interpretasi teks mencakup fonologi, kosakata, dan tata bahasa dan sebagai pengetahuan dasar bahasa, semantik dan pragmatik untuk mengetahui makna tuturan, kohesi untuk mengetahui koherensi lokal, sedangkan skemata untuk mengetahui struktur dan inti teks. Sementara itu, interpretasi konteks terdiri dari konteks situasi dan intertekstualitas.

Konteks situasi merupakan tahap interpretasi di luar teks seperti: partisipan, properti partisipan, serta faktor sosial seperti apa yang terjadi (melibatkan aktivitas, topik, dan tujuan), siapa yang terlibat, hubungan yang dibangun antar partisipan, serta apa peran bahasa dalam teks tersebut, sedangkan konteks intertekstualitas adalah hubungan antar teks pada wacana sebelum maupun sesudahnya (Fairclough, 1989:142-144).

2.2.6.3 Tahap Eksplanasi

Tahap eksplanasi mengkaji hubungan antara teks dengan struktur sosial lewat mediasi konteks sosial tempat terciptanya wacana. Eksplanasi bertujuan menempatkan wacana sebagai bagian dari proses sosial, yaitu bagaimana wacana dibentuk oleh struktur sosial dan bagaimana wacana ikut mempengaruhi struktur sosial (Darma, 2009:203).

Tahap eksplanasi sama dengan dimensi *sociocultural practice*, yaitu berhubungan dengan konteks di luar teks. Tahap eksplanasi berkaitan dengan hubungan antara konteks interaksi dan sosial, yaitu dengan penentuan proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya. Menurut Fairclough

(1989:163) konteks sosial budaya dibagi menjadi tiga level, yakni level sosial, level institusional, dan level situasional.

Pada level sosial, teks dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pada level institusional, teks merupakan hasil dari pengaruh institusi organisasi dalam praktek produksi wacana. Sementara itu, pada level situasional, kemunculan teks dipengaruhi oleh kondisi realitas sosial yang terjadi pada saat penulis teks produksi teks.



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode penyajian data, metode analisis data, dan metode penyajian analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap penelitian secara deskripsi melalui kata-kata. Sedangkan kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bertujuan memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, dan klausa yang mengandung leksikon *perempuan*. Data tersebut diperoleh dari sumber data berupa teks pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* pada tanggal 21 Januari 2014 yang terbit setiap hari Selasa dan teks tersebut mengandung wacana politik dengan judul “Keseriusan Caleg Perempuan” ditulis oleh Hikmatul Mustaghfiroh (ibu rumah tangga dan guru MI di Kudus). Pemilihan data tersebut diambil secara *purposive*

sampling dari 11 populasi yang terdapat di “Kolom Perempuan” tahun 2014 selama satu tahun, yaitu 21 Januari, 11 Februari, 25 Maret, 1 April, 3 Juni, 20 Mei, 3 Juni, 5 Agustus, 12 Agustus, dan 4 Nopember (Hamidi, 2010:88).

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan wacana “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* selama satu tahun. Sementara itu, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih salah satu data yang menjadi representasi dari populasi data sejumlah 11. Pemilihan data dilakukan secara acak dengan terhadap data yang memiliki kesamaan, yaitu terdapat kosakata *perempuan* pada data.

Selanjutnya, data terkumpul dilakukan penyediaan data dengan teknik simak bebas libat cakap artinya penulis tidak berpartisipasi dalam pembuatan artikel, tetapi hanya membaca koran harian *Suara Merdeka*. Teknik lainnya yaitu teknik catat. Penulis membaca data kemudian mencatat serta menganalisis teks yang mengandung makna pengalaman (*experiential meaning*). Setelah data terkumpul dan siap digunakan, maka tahap selanjutnya dilakukan analisis data (Sudaryanto, 1993:133-135)

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis konten/*content analysis* (Krippendorff, 2004:36). Analisis konten digunakan untuk mengetahui pemarkah-pemarkah makna semantis dari setiap klausa pada wacana “Kolom Perempuan”. Sementara itu, teknik *abduktif inferensial* digunakan untuk

mencari muatan ideologi yang terkandung dalam “Kolom Perempuan” berupa 23 klausa yang menggambarkan realitas berdasarkan pengalaman (Fairclough, 1989:113).

Metode analisis konten digunakan dengan teori *Systemic Functional Linguistic* (SFL) melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi) pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* yang mengandung leksikon *perempuan*. Kajian SFL digunakan untuk menganalisis berdasarkan sistem transitivitas, sedangkan AWK digunakan untuk mencari nilai-nilai ideologis yang terkandung pada wacana “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka* (Fairclough, 1989:113).

Langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu, 1) mengumpulkan data berupa “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka*, 2) memilih “Kolom Perempuan” yang mengandung wacana politik dengan *purposive sampling*, 3) mengidentifikasi leksikon *perempuan* pada “Kolom Perempuan” berdasarkan kajian *Systemic Functional Linguistic*, 4) menentukan nilai-nilai ideologis yang terkandung berdasarkan makna pengalaman, dan 5) mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat.

3.5 Metode Penyajian Analisis Data

Data yang telah dianalisis disajikan dengan metode formal dan informal. Metode formal adalah metode penyajian hasil analisis dengan menggunakan kaidah. Kaidah itu dapat berbentuk rumus, bagan, tabel, dan gambar. Sebaliknya, metode informal adalah metode penyajian hasil analisis dengan menggunakan kata-kata biasa atau perumusan dengan kata-kata (Sudaryanto, 1993:145).

Penelitian ini menggunakan kedua metode tersebut. Metode formal digunakan untuk menggambarkan setiap klausa berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*), yakni kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Adapun metode informal digunakan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan representasi maupun ideologi yang terkandung dalam makna pengalaman.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil ini, akan disampaikan beberapa temuan terkait pilihan bahasa berupa kosakata, tata bahasa, dan struktur teks berdasarkan makna pengalaman (*experiential meaning*) melalui kajian SFL dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK), yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Adapun ideologi dari pola klasifikasi adalah penanda atributif, ideologi kata-kata yang diperjuangkan adalah alat perjuangan dan penegas problem sosial, *overwording* berideologi alat perjuangan dan penegas problem sosial, sinonim berideologi *inferior*. Selanjutnya, ideologi sistem transitivitas (proses material, proses mental, proses eksistensial, dan proses relasional) adalah patriarki, nominalisasi berideologi penyembunyian pelaku, pemasifan berideologi penyembunyian pelaku, dan kalimat negasi berideologi pengingkaran.

Sementara itu, struktur teks yang terdiri atas tesis, argumentasi, elaborasi, dan reiterasi dengan kategori *analytical exposition* berideologi mempengaruhi. Bab ini merupakan tahapan untuk mencari dan mengungkap isu-isu gender dalam wacana politik perempuan dan nilai-nilai ideologis yang direpresentasikan penulis teks melalui wacana pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka*.

4.1 Tahap Deskripsi

Dalam tahap ini, pilihan bahasa penulis teks yang mengandung makna pengalaman dianalisis tanpa dikaitkan dengan aspek lain (konteks). Tahap ini terdiri atas pilihan bahasa berupa kosakata, tata bahasa, dan struktur teks yang mengandung nilai ideologis.

4.1.1 Leksikon Kosakata dalam Bahasa Perempuan

Dalam pembahasan ini, kosakata terdiri dari lima kategori, yaitu pola klasifikasi, kata-kata ideologis yang diperjuangkan, *overwording*, relasi makna (sinonim), dan metafora.

4.1.1.1 Pola Klasifikasi

Pola klasifikasi dapat dilihat dari penggunaan bahasa penulis teks dalam menggambarkan realitas dalam klausa yang mengandung leksikon *perempuan* dari 23 klausa. Klasifikasi dapat diketahui dengan cara bagaimana pilihan kata yang diproduksi penulis teks tidak disebutkan, tetapi secara tersirat mengandung perlawanan kata (*antonim*). Selain itu, kehadiran leksikon *perempuan* merupakan pemarah sekaligus penanda *atributif* sehingga setiap frse yang mengandung leksikon *perempuan* bersifat khusus, sedangkan frase yang tidak mengandung leksikon *perempuan* bersifat umum (bagi laki-laki) dan tidak membutuhkan atributif.

Pola klasifikasi berdasarkan data meliputi: *kuota perempuan*, *DCT perempuan*, dan *caleg perempuan*. Alasan ketiga frase di atas dipilih sebagai kosakata yang membentuk pola klasifikasi dikarenakan dari 23 klausa yang menyebutkan leksikon *perempuan* hanya tiga frase di atas yang mengandung pola klasifikasi. Keberadaan ketiga frase tersebut membentuk *antonim* (

membutuhkan kehadiran lawan kata dari ketiga frase tersebut), yakni *kuota laki-laki*, *DCT laki-laki*, dan *caleg perempuan* .

Berdasarkan data di atas, yaitu *kuota*, *DCT*, dan *caleg* diikuti leksikon *perempuan*. Artinya ketiga kata tersebut dikhususkan bagi perempuan. Sebaliknya ketiga kata tersebut bersifat umum jika tanpa diikuti oleh leksikon *perempuan*. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, setiap kata yang diikuti leksikon *perempuan* itu bersifat khusus karena terdapat penanda atributif. Padahal, satuan lingual *kuota*, *DCT*, dan *caleg* sebenarnya juga diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi kuota laki-laki, DCT laki-laki, dan caleg laki-laki tidak disebutkan. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam pencantuman leksikon *perempuan* sebagai akibat adanya ideologi patriarki sehingga penanda *perempuan* diperjelas dibandingkan laki-laki.

Dalam UU Tahun 2003 dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan sebagai anggota perwakilan rakyat, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, harus menyertakan keterwakilan perempuan 30% dalam Daftar Calon Sementara (DCS), setelah masuk DCS kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Berdasarkan pembagian kuota bagi perempuan sejumlah 30% menunjukkan bahwa kuota laki-laki sejumlah 70%. Artinya, keberadaan perempuan belum setara dengan laki-laki dalam ranah sosial maupun politik. Posisi perempuan masih dianggap *inferior* sedangkan laki-laki *superior*. Berikut data klausa yang menggambarkan pola klasifikasi:

- (1) Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen *kuota perempuan* pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

- (2) Faktanya, banyak partai politik yang memasang *DCT perempuan* hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja.
- (3) Di lapangan, sangat sedikit *caleg perempuan* yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik.

4.1.1.2 Kata-Kata Ideologis yang Diperjuangkan

Dalam pembahasan ini, kata-kata ideologis yang diperjuangkan meliputi: *kuota*, *emansipasi*, dan *kesetaraan gender*. Pengulangan ketiga kata tersebut sebagai bentuk perjuangan dan penegas dalam menggambarkan problem perempuan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, pengulangan kata juga sebagai penanda bahwa kata-kata tersebut penting dalam merepresentasikan realitas sosial, yakni posisi perempuan sebagai objek ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan perempuan berupa pemberian kuota 30%, sedangkan laki-laki 70%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang lebih menyudutkan kaum perempuan. Oleh sebab itu, perempuan memperjuangkan nasib mereka melalui kesetaraan gender agar tercipta emansipasi bagi kaum perempuan.

Pengulangan ketiga kata tersebut dapat dibuktikan melalui 23 klausa, di mana ketiga kata tersebut diulang lebih dari satu kali. Kata *kuota* diulang lima kali, kata *emansipasi* diulang tiga kali, sedangkan kata *kesetaraan gender* diulang empat kali. Kata-kata tersebut digunakan oleh penulis teks untuk menanamkan ideologis tertentu ke pikiran pembaca sehingga dipercaya sebagai bagian yang penting sekaligus merepresentasikan ketidakadilan terhadap perempuan. Bentuk ketidakadilan perempuan berupa pemberian kuota 30%, sedangkan laki-laki 70%. Pemberian kuota tersebut tidak menggambarkan kesetaraan gender sehingga memunculkan adanya emansipasi perempuan.

Menurut KBBI (2008: 759), kata *kuota* (n) memiliki jumlah yang ditentukan (jatah). Selanjutnya, kata *emansipasi* (n) dalam KBBI (2008:365) diartikan sebagai persamaan hak di berbagai aspek kehidupan masyarakat (hak perempuan dengan laki-laki). Sementara itu, kata kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti sejajar. Dengan demikian, kata *emansipasi* dan *kesetaraan gender* memiliki hubungan makna yang sama, yakni kesamaan dalam memperoleh hak serta peran di bidang sosial, politik, dan hukum bagi perempuan sebagaimana laki-laki. Kesetaraan gender merupakan bentuk konkrit dari emansipasi yang diperjuangkan oleh kaum perempuan karena tujuan gerakan emansipasi adalah adanya kesetaraan gender bagi perempuan maupun laki-laki. Berikut data klausa yang menggambarkan kata-kata ideologis:

- (4) Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen *kuota* perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.
- (5) yakni adanya ketimpangan antara idealitas *kuota* 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan.
- (6) Pertama, *kuota* politik perempuan dalam konteks ini hanya bersifat formalitas belaka.
- (7) Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat *emansipasi* perempuan dalam ranah politik, hanya akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik.
- (8) Jika ini terjadi, maka *emansipasi* perempuan dalam politik, sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang bolong.
- (9) *Kesetaraan Gender* ketiga, fenomena di atas menunjukkan ketidakefektifan *kuota* politik pada kaum perempuan.
- (10) Namun, kiranya lebih efektif jika *emansipasi* politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan.

- (11) Era *kesetaraan gender* yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan untuk berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan.
- (12) Kebijakan *kuota* perempuan harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem *kesetaraan gender* dalam ranah politik.
- (13) Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada *kesetaraan gender*.

4.1.1.3 *Overwording*

Dalam pembahasan ini, *overwording* ‘pengulangan satuan lingual berkali-kali’ terdapat pada data 4-13 di atas sebagaimana data kata-kata ideologis yang diperjuangkan, yaitu satuan lingual *kuota*, *emansipasi*, dan *kesetaraan gender*. Pengulangan ketiga satuan lingual oleh penulis teks menunjukkan adanya maksud mempertegas tujuan penulis teks terhadap masalah perempuan dalam realitas sosial, yaitu objek ketidakadilan. Selain itu, penulis teks menghadirkan *overwording* bertujuan agar pembaca khususnya perempuan memahami persoalan kaum hawa.

Problem perempuan dalam realitas sosial adalah ketidakadilan akibat ideologi patriarki. Oleh sebab itu, ketidakadilan yang dialami perempuan tidak boleh dibiarkan dan harus dicarikan solusinya dengan cara memberikan ruang dan peran yang sama bagi keduanya. Bentuk ketidakadilan terhadap perempuan bisa berupa stigma, diskriminasi, eksploitasi, dan sebagainya yang menjadikan perempuan sebagai individu yang dirugikan akibat konstruksi sosial.

4.1.1.4 Relasi Makna (sinonim)

Dalam pembahasan ini, relasi makna berupa sinonim terdapat pada data (14), (15), dan (16), yakni *hanya bersifat formalitas belakai*, *hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja*, dan *hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi*. Ketiga satuan lingual tersebut mengandung relasi makna yang sama, yakni menjelaskan posisi perempuan hanya dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik atau simbol kelengkapan partai politik.

Penggunaan bentuk sinonim juga menggambarkan bahwa perempuan itu sebenarnya penting dan dibutuhkan, tetapi mereka hanya dimanfaatkan (eksploitasi) untuk memenuhi kepentingan partai politik. Selain itu, pemilihan ketiga satuan lingual tersebut menunjukkan bahwa penulis memiliki ragam klausa dalam mengungkapkan realitas sosial terkait isu politik perempuan dan menggambarkan ideologi *inferior* ‘perempuan dijadikan objek kepentingan politik’. Adanya pengesampingan terhadap perempuan disebabkan adanya subordinasi, di mana posisi perempuan dianggap tidak penting dalam politik karena perempuan dikonstruksikan di ranah domestik yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Berikut data klausa yang menggambarkan relasi makna:

- (14) Pertama, kuota politik *perempuan* dalam konteks ini *hanya bersifat formalitas belaka*.
- (15) Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan *hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja*.
- (16) Bagaimana tidak, perempuan *hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi*, demi untuk kemenangan kepentingan politik semata.

4.1.1.5 Metafora

Dalam pembahasan ini, makna *metaforis* adalah kata konotatif atau kiasan yang digunakan dalam menggambarkan atau merepresentasikan pengalaman penulis teks terkait realitas sosial. Adapun makna metaforis yang terdapat pada data adalah metafora konseptual. Hal ini disebabkan konsepsi penulis teks terkait segala apa yang dialami, dirasakan, dan sedang dipikirkan dalam kehidupan sehari-hari dalam realitas sosial khususnya terkait isu gender dalam politik. Adapun penulis teks menggunakan metaforis bertujuan untuk menyangatkan, memperhalus, mengubah ragam, membuat suatu konsep lebih mudah dipahami, dan memperindah (Nirmala, 2012:9).

Berdasarkan data di atas, terdapat delapan satuan lingual, baik frase maupun klausa yang mengandung makna metaforis. Hal itu dikarenakan susunan frase dan klausa tersebut mengandung makna konotatif dan tidak bisa diartikan secara *literal*, tetapi harus ditafsirkan atau dikonsepsikan sehingga tercipta makna yang sesuai dengan ranah target atau sasaran (*target domain*) dan sumber (*source domain*) sebagaimana yang dimaksudkan penulis teks.

Adapun kedelapan data yang mengandung makna metaforis tersebut berupa kategori frase nominal, frase verbal, dan dan frase preposisional. Frase nominal terdiri dari *perjuangan politik* ‘melawan *stigma* sosial’, *perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi* ‘kaum perempuan disamakan peralatan administrasi’, *komoditas politik* ‘ikon penarik simpatisan’, *pembangunan peran* ‘peningkatan partisipasi perempuan berpolitik’, *pembangunan kesadaran* ‘penyadaran terhadap kaum perempuan dalam berpolitik’, *sejarah telah menorehkan tinta emasnya* ‘kebangkitan dan kejayaan

kaum perempuan di masa dahulu'. Frase verbal berupa *eksploitasi perempuan* 'kaum perempuan dimanfaatkan demi kepentingan politik', *eksploitasi politik* 'kaum perempuan dimanfaatkan demi kepentingan politik'. Sementara itu, frase preposisional berupa *mimpi di siang bolong* 'tujuan parpol untuk mewujudkan emansipasi mustahil berhasil karena parpol hanya mengeksploitasi perempuan bukan memberdayakan perempuan'.

Berdasarkan kedelapan makna metaforis tersebut, satuan lingual dibuktikan pada data (17-24) karena didalamnya mengandung satuan lingual bermakna konotatif. Bentuk metaforis berupa frase nominal, frase verbal, dan dan frase preposisional. Frase nominal terdapat pada data (17), (18), (21), (22), (23), dan (24), yaitu *perjuangan politik, perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, komoditas politik, pembangunan peran, pembangunan kesadaran, sejarah telah menorehkan tinta emas*. Frase verbal terdapat pada data (19) yaitu *eksploitasi perempuan*. Sementara itu, frase preposisional terdapat pada data (20), yaitu *mimpi di siang bolong*. Kehadiran ketujuh satuan lingual tersebut tidak bisa diartikan secara literal, tetapi harus digabungkan dan ditafsirkan agar membentuk sebuah makna.

Penjelasan makna metaforis data (17) sebagai berikut, kata *perjuangan* merupakan ranah sumber diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh melawan kesukaran dan bahaya. Kata *perjuangan* bermakna metaforis ketika disandingkan dengan kata *politik* sebagai ranah target. Kata *perjuangan* biasa digunakan untuk perjuangan melawan penjajah, perjuangan melewati badai, dan perjuangan melawan kemiskinan. Kata *politik* mempunyai arti urusan pemerintahan. Jadi,

kehadiran target tersebut memberikan makna kepada sumber bahwa *politik* diibaratkan lawan yang harus dikalahkan. Satuan lingual *perjuangan politik* merupakan metafora pengalaman karena penulis teks melihat dan merasakan berdasarkan realitas sosial. Satuan lingual yang mengandung makna metaforis tersebut menggambarkan bahwa penulis teks ingin menyampaikan kepada perempuan agar terjun di politik dan memperjuangkan nasib kaum perempuan.

Frase *perjuangan politik* terdiri dari dua kata yaitu perjuangan dan politik. Kata perjuangan (n) (KBBI, 2008:590) berarti usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Kata *politik* (n) (KBBI, 2008: 1091) adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Namun, kata *perjuangan* biasanya digunakan dalam kata sebagai berikut: perjuangan melawan penjajah, perjuangan melawan kemiskinan, perjuangan melawan kebodohan. Jadi, kata *perjuangan* mengandung makna metaforis jika disandingkan dengan kata *politik*. Frase *perjuangan politik* bisa diartikan sebagai upaya kaum perempuan berperan di politik dengan maksud melawan *stigma* sosial dan memperoleh kesetaraan gender.

Kata *perempuan* merupakan ranah sumber diartikan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai vagina sebagai lawan dari laki-laki. Kata perempuan bermakna *metaforis* ketika disandingkan dengan kata fitur lingual *hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi* sebagai target. Kehadiran target tersebut memunculkan tafsiran makna bahwa perempuan diibaratkan sebagai benda material layaknya peralatan kantor demi kepentingan partai. Jadi, makna sumber ditentukan satuan lingual yang mengisi ranah target. Satuan lingual *perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi* mengandung

makna bahwa penulis teks melihat atau merasakan realitas sosial bahwa keberadaan perempuan hanya dijadikan sebagai simbol dan alat perlengkapan administrasi.

Selanjutnya, satuan lingual berupa *perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi* terdiri dari tiga kata inti yaitu perempuan, perlengkapan, dan administrasi. Menurut KBBI, kata *perempuan* (n) (KBBI, 2008: 1054) adalah orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kata *perlengkapan* (n) (KBBI, 2008:11) adalah alat-alat yang digunakan untuk mengangkut barang kepada para pelanggannya. Sementara itu, kata *administrasi* (n) (KBBI, 2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Jadi, satuan lingual pada data (17) bisa diartikan bahwa perempuan dianalogikan atau disamakan dengan barang kelengkapan kantor.

Kata *eksploitasi* berarti tindakan yang dilakukan dalam memanfaatkan sesuatu demi keuntungan pribadi atau golongan. Kata *eksploitasi* bermakna metaforis ketika disandingkan dengan kata *politik* sebagai ranah target. Kata *eksploitasi* biasanya disandingkan dengan kata-kata konkrit atau bisa dilihat secara visual. Misalnya *eksploitasi tambang*, *eksploitasi perkebunan*, dan *eksploitasi kekayaan* bukan disandingkan dengan kata yang *abstrak*. Jadi, makna *eksploitasi politik* menurut pandangan penulis teks adalah memanfaatkan politik sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau partai bukan kepentingan rakyat.

Satuan lingual berupa frase *eksploitasi politik* terdiri dari dua kata yaitu *eksploitasi* dan *politik*. Menurut KBBI (2008: 359), kata *eksploitasi* (v) memiliki

arti adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri terhadap benda maupun orang lain. Kata *politik* (n) dalam KBBI (2008:1091) berarti segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Gabungan dari kedua kata tersebut akan menimbulkan penafsiran makna karena kata *eksploitasi politik* tidak bisa diartikan secara *literal*.

Kata *eksploitasi perempuan* juga mengandung makna metaforis sebagaimana *eksploitasi politik*. Hal ini dikarenakan frase *eksploitasi perempuan* mengandung makna *non literal*, yaitu membutuhkan penafsiran. Kata *perempuan* merupakan jenis makhluk hidup bukan benda material yang digunakan agar diperoleh kemanfaatan secara fisik. Perempuan tidak dapat dieksploitasi secara fisik, hanya jasanya yang bisa dimanfaatkan. Jadi, kata *eksploitasi* merupakan ranah sumber dan *perempuan* ranah target mengandung makna pemanfaatan jasa (partisipasi) perempuan dalam politik untuk menarik massa demi kepentingan politik.

Kata *perempuan* mengandung makna metaforis ketika disandingkan dengan fitur lingual *komoditas politik* artinya perempuan dijadikan sebagai barang dagangan utama dalam urusan politik. Padahal, perempuan merupakan makhluk hidup bukan kategori barang. Hal ini dikarenakan kata *komoditas* biasanya digunakan untuk barang unggulan yang diminati banyak orang. Misalnya *komoditas furniture*, *komoditas batik*, dan *komoditas tembakau*. Kata *politik* merupakan urusan pemerintahan atau organisasi. Oleh sebab itu, satuan lingual *perempuan sebagai komoditas politik* mengandung makna bahwa sosok perempuan hanya dijadikan atau dimanfaatkan sebagai alat politik demi kepentingan partai dalam mendapatkan massa.

Sementara itu, satuan lingual berupa frase *perempuan sebagai komoditas politik* berasal dari kata *perempuan*, *komoditas* dan *politik*. Menurut KBBI (2008: 719), kata *komoditas* (n) mengandung arti barang dagangan utama (hasil bumi maupun hasil kerajinan lain). Kata *politik* (n) (2008: 1091) berarti segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan naegara terhadap negara lain baik dalam maupun luar negeri. Penggabungan kedua satuan lingual tersebut mengandung makna metaforis karena membutuhkan pemahaman secara *kognitif* bukan *literal*. Penggunaan kata *komoditas* biasanya digunakan untuk ekspor-impor. Misalnya, Indonesia ekspor beras ke India. Jadi, frase *komoditas politik* mengandung arti bahwa *perempuan* dijadikan sebagai alat, ikon, dan simbol untuk menarik simpatisan karena perempuan dianggap sebagai orang yang memiliki daya tarik dan mudah dalam mencari pendukung. Oleh sebab itu, tidak sedikit para partai politik yang memanfaatkan perempuan sekedar kepentingan sesaat dan setelah itu mengabaikannya.

Kata *emansipasi perempuan* merupakan gerakan yang dilakukan kaum perempuan dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan. Kata *emansipasi perempuan* mengandung makna metaforis ketika disandingkan dengan satuan lingual *mimpi di siang bolong*. Kata *mimpi di siang bolong* diartikan bermimpi ketika tidur di siang hari dan biasanya mimpi tersebut tidak mungkin karena tidak membutuhkan penafsiran. Jadi, maksud penulis teks ingin menyampaikan bahwa emansipasi yang diperjuangkan perempuan hanyalah mimpi belaka atau harapan semu yang tidak mungkin terwujud. Upaya berjuang demi keadilan gender harus

dilakukan tanpa putus asa. Meskipun *mindset* masyarakat sudah terkonstruksi oleh ideologi patriarki.

Satuan lingual berupa frase *mimpi di siang bolong* terdiri dari dua susunan kata yaitu kata *mimpi* dan *di siang bolong*. Kata *mimpi* (n) menurut KBBI (2008: 915) berarti sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Kata *di siang bolong* mengandung makna pada saat siang hari yang berfungsi menerangkan kata *mimpi*. Penggabungan frase preposisional di atas mengandung makna harapan yang tidak mungkin tercapai. Artinya emansipasi politik perempuan dengan cara mengeksploitasi perempuan sebagai komoditas politik tanpa memberikan peran terhadap perempuan berarti emansipasi tersebut hanya *omong kosong*.

Kata *pembangunan* diartikan sebagai proses dalam menciptakan sesuatu. Kata *pembangunan* bermakna metaforis ketika disandingkan dengan kata *peran perempuan*. Kata *pembangunan* biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat nomina Misalnya pembangunan jalan, pembangunan rumah, dan pembangunan gedung. Disandingkannya kata *pembangunan* pada *peran perempuan* mempunyai arti *non literal* karena peran bukan nomina melainkan verba. Jadi, satuan lingual *pembangunan peran perempuan* mengandung arti menumbuhkan dan meningkatkan peran perempuan dalam politik agar dapat menentukan kebijakan yang berkeadilan terhadap perempuan.

Satuan lingual berupa frase *pembangunan peran* terdiri dari dua kata yaitu *pembangunan* dan *peran*. Kata *pembangunan* (n) (KBBI, 2008: 134) memiliki arti proses mendirikan sebuah bangunan. Kata *peran* (n) (KBBI, 2008:1051) memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang ketika mempunyai

kedudukan di masyarakat. Jadi, frase *peran perempuan* mengandung arti tugas *perempuan* dalam melakukan tindakan. Jadi, frase *pembangunan peran* mengandung arti peningkatan partisipasi *perempuan* dalam bidang politik.

Emansipasi politik perempuan diartikan sebagai gerakan perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam urusan politik. Satuan lingual tersebut bermakna metaforis ketika disandingkan dengan satuan lingual *pembangunan kesadaran berpolitik*. Satuan lingual *pembangunan kesadaran berpolitik* diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan dan mengingatkan kaum perempuan agar terjun di politik. Jadi, maksud penulis teks ingin mengajak kepada pembaca khususnya perempuan menjadi individu yang sadar politik atau *melek politik* sehingga dapat memperjuangkan nasib kaumnya dan kepentingan publik.

masa lampau.

Satuan lingual berupa frase *pembangunan kesadaran* terdiri dari dua kata yaitu *pembangunan* dan *kesadaran*. Menurut KBBI (2008:134), kata *pembangunan* (n) memiliki arti proses mendirikan sebuah bangunan. Kata *kesadaran* (n) (KBBI, 2008: 134) memiliki arti keinsafan atau keadaan mengerti. Penggunaan kata *pembangunan* biasanya digunakan sebagai berikut: *pembangunan sekolah, pembangunan rumah, pembangunan gedung*. Namun, penggabungan frase *pembangunan kesadaran* mengandung makna *kognitif* karena tidak bisa diartikan secara *literal*. Jadi, *pembangunan kesadaran* mengandung arti menyadarkan kaum *perempuan* untuk berperan di politik sehingga *image* politik hanya untuk laki-laki tidak berkelanjutan.

Kata *sejarah* diartikan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kata tersebut merupakan nomina atau benda mati. *Sejarah* sebagai ranah sumber bermakna metaforis ketika disandingkan dengan satuan lingual *menorehkan tinta emasnya*. Kata *sejarah* biasanya disandingkan dengan kata berupa nomina bukan verba (menorehkan) Misalnya Sejarah Indonesia, Sejarah Kota Jogjakarta, dan Sejarah Borobudur. Penggabungan satuan lingual tersebut mengandung makna *non literal* yaitu menggambarkan bahwa perempuan-perempuan di masa dahulu pernah berperan dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan berkarya sebut saja R.A. Kartini. Jadi, maksud yang ingin disampaikan penulis teks adalah memotivasi dan mengajak para perempuan agar berbuat sesuatu demi kemajuan bangsa dan tidak berdiam diri karena perempuan juga berpotensi dan berkualitas di berbagai bidang.

Menurut KBBI (2008:1241) kata *sejarah* (n) diartikan sebagai peristiwa yang benar terjadi di masa lampau. Satuan lingual berupa *Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan -perempuan yang berhasil di zaman dan bidangnya* mengandung makna metaforis karena kata *sejarah* merupakan benda yang tidak bergerak dan tidak bisa melakukan tindakan. Kehadiran verba *menorehkan* bermakna tindakan membuat catatan atau jejak. Sementara itu, kata *tinta emas* (n) (KBBI, 2008:1353) mengandung arti benda cair yang warnanya seperti warna emas. Kata *tinta emas* dalam frase tersebut bukan benda cair, melainkan bisa diartikan sebagai jasa, karya, dan peran perempuan di era-era dahulu. Jadi, kalimat metaforis pada data (24) mengandung makna bahwa para

perempuan telah membuat catatan sejarah yang gemilang di zaman dahulu.

Berikut data klausa yang menggambarkan metafora:

- (17) Di lapangan, sangat sedikit caleg perempuan yang menindaklanjuti secara serius *perjuangan politik*.
- (18) Bagaimana tidak, *perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi*, demi untuk pemenangan kepentingan politik semata
- (19) Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu akan melahirkan *eksploitasi perempuan* dalam ranah politik.
- (20) *Eksplorasi politik* ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik, hanya akan menjadikan perempuan sebagai *komoditas politik*.
- (21) Jika ini terjadi, maka emansipasi perempuan dalam politik, sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi *mimpi di siang bolong*
- (22) Menurut saya, *pembangunan peran* perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan
- (23) Namun, kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari *pembangunan kesadaran* berpolitik kaum perempuan .
- (24) *Sejarah telah menorehkan tinta emasnya* bagi perempuan-perempuan yang berhasil di zaman dan bidangnya.

4.1.2 Tata Bahasa dalam Bahasa Perempuan

Pilihan bahasa berupa tata bahasa dalam makna pengalaman terdiri: (a) transitivitas, (b) nominalisasi, (c) pemasifan, dan (d) penegasian (Fairclough, 1989:110-111).

4.1.2.1 Transitivitas

Dalam pembahasan ini, data penelitian yang merepresentasikan leksikon maupun satuan lingual *perempuan* terdapat 23 klausa, baik data tersebut berkedudukan sebagai kata, frase, dan klausa. Namun proses yang mengisi leksikon maupun satuan lingual *perempuan* hanya terdiri dari empat proses, yakni proses material, mental, eksistensial, dan relasional. Berdasarkan kemunculan sistem transitivitas dalam klausa yang menggambarkan leksikon *perempuan* sebagai partisipan, proses material dengan partisipan *goal* dan *recipient* lebih mendominasi daripada lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan hanya dijadikan objek ketidakadilan dari kebijakan pemerintah dan parpol. Adapun urutan peringkat kemunculan keempat proses di atas sebagai berikut: (a) proses material sebanyak 12 (52,17%), (b) proses mental sebanyak 2 (8,70%), (c) proses eksistensial sebanyak 5 (23,73%), dan (d) proses relasional sebanyak 4 (17,40%). Sementara itu, sirkumstan didominasi sirkumstan tempat 11 (52,38%), sirkumstan sebab 5 (23,81%), dan sirkumstan cara 5 (23,81%). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan terkait tempat, yakni dalam ranah politik.

Dalam pembahasan ini, beberapa sistem transitivitas diisi oleh proses yang terdapat leksikon *perempuan*, yakni proses material terdiri dari partisipan *actor*, partisipan *goal*, dan partisipan *recipient*, proses mental terdiri dari partisipan *senser* dan partisipan *phenomenon*, proses eksistensial terdiri dari partisipan *existen*, dan proses relasional terdiri dari partisipan *carrier* dan *atribute* serta partisipan *token* dan partisipan *value*.

Tabel 4. Proses dan Sirkumstan

Sistem	Transitivitas						
Proses	Material			Mental	Eksistensial	Relasional	
Partisipan	<i>Actor</i>	<i>Goal</i>	<i>Recipient</i>	<i>Phenomenon</i>	<i>Existent</i>	<i>Carrier-Attribute</i>	<i>Token-Value</i>
Kemunculan	2	7	3	2	5	3	1
Jumlah	12			2	5	4	
Persentase	52,17%			8,70%	21,73%	17,40%	
Sirkumstan							
	Place		Cause		Manner		
Kemunculan	11		5		5		
Jumlah	11		5		5		
Persentase	52,38%		23,81%		23,81%		

4.1.2.1.1 Leksikon *Perempuan* dalam Proses Material

Dalam pembahasan ini, sistem transitivitas yang mengisi partisipan *perempuan* hanya terdiri dari tiga partisipan, yakni partisipan pelaku (*actor*), partisipan sasaran (*goal*), partisipan penerima (*recipient*), dan partisipan *client*. Satuan lingual pengisi proses material disebut *verbal group*, partisipannya disebut *nominal group*, dan sirkumstan disebut *adverbial group* atau *prepositional group*. Keterangan verba pengisi proses material dan partisipannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Proses Material

Proses Material	Partisipan				Sirkumstan
	<i>Actor</i>	<i>Goal</i>	<i>Recipient</i>	<i>Client</i>	<i>Cause, location, dan manner</i>
Bangkit dan berkembang	Perempuan	-	-	-	Lebih dari itu (cause), dalam ranah publik (location), dan secara alami (cause)
Menentukan	Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif	-	-	-	
Mengamanatkan	-	30 persen kuota perempuan	-	-	Pada DCT (location)
Memasang	-	DCT perempuan	-	-	Hanya sekedar untuk memenuhi syarat (cause)
Dimulai	-	Emansipasi politik perempuan	-	-	Kiranya lebih efektif dan dari pembangunan kesadaran berpolitik (manner)
Alih-alih mengangkat	-	Emansipasi perempuan	-	-	Dalam ranah politik (location)
Menjadikan	-	Perempuan	-	-	
Dikontrol	-	Pembangunan peran	-	-	Pada ranah publik

		perempuan			(location) dan melalui kebijakan dan perundang-undangan (manner)
Menunjukkan	-	-	Pada kaum perempuan	-	
Menorehkan	-	-	Bagi perempuan-perempuan	-	
Memberi	-	-	Pada perempuan	-	
Digunakan	-	Perempuan		-	

a) Leksikon *Perempuan* sebagai Partisipan Actor

Dalam pembahasan ini, kedudukan partisipan *actor* dalam proses material seharusnya leksikon *perempuan* diposisikan sebagai *actor*, yaitu *subjek logis* yang melakukan tindakan tidak dijadikan sebagai *subjek gramatikal*, di mana fungsinya tidak melakukan tindakan. Jadi, dalam proses ini, data yang terdapat leksikon *perempuan*, kedudukannya bersifat pasif, yakni tidak melakukan tindakan karena hanya menjadi kelengkapan dalam susunan gramatikal.

Dalam data (25) ini, leksikon *perempuan* sebagai partisipan *actor* berupa *nominal group* (perempuan) tanpa diikuti partisipan *goal*. Kemunculannya sebagai pelaku hanya diikuti oleh sirkumstan tempat dan cara. Meskipun terdapat proses material berupa *verbal group* (bangkit dan berkembang), tetapi

verbal group tersebut merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek (intransitif). Selanjutnya, sirkumstan yang mengisi proses ini berkategori *circumstance of place* (dalam ranah publik) dan diikuti oleh *circumstance of cause* berupa *prepositional group* (dalam ranah publik) dan *adverbial group* (secara alami). Hal ini dikarenakan posisi partisipan *actor* berperan sebagai *subjek gramatikal* artinya pelaku tersebut hanya berfungsi sebagai perlengkapan gramatikal bukan *subjek logis*. Keberadaan fungsi leksikon *perempuan* dimunculkan hanya sebagai pelaku tanpa adanya sasaran yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berdasarkan pengalaman penulis melalui produksi teksnya digambarkan pasif karena cuma dijadikan simbol dalam urusan politik.

Sementara itu, pada data (26) satuan lingual *perempuan* berupa *nominal group* (peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif) sebagai *subjek logis* yang diikuti *verbal group* (akan menentukan) serta berfungsi *verba transitif* sehingga melibatkan partisipan *goal* ‘keberpihakan’ dan partisipan *recipient* ‘kesetaraan gender’.

Berdasarkan data (25) dan (26), leksikon *perempuan* dihadirkan sebagai partisipan *actor* dalam proses material selalu diikuti *modalitas intensional* ‘akan’ yang memiliki makna “keinginan atau harapan”. Kehadiran modalitas tersebut pada frase ‘akan bangkit dan berkembang’ dan ‘akan menentukan’ menunjukkan adanya tindakan yang akan dilakukan oleh perempuan, tetapi belum dilaksanakan.

(25) Lebih dari itu *perempuan* akan bangkit dan berkembang
 Sirk:Cause Pt:Actor Pr:Material

legislatif’, data (28) berupa kategori *adverbial group* ‘hanya sekedar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja’, data (29) berupa *circumstance of place* ‘dalam ranah politik’, sedangkan data (31) berupa *prepositional group* ‘dalam ranah politik’ serta terdapat partisipan *role* berupa kategori *nominal group* ‘sebagai komoditas politik’. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posisi perempuan sebagai partisipan *goal* dipengaruhi oleh keadaan tertentu (waktu pencalegan)

Berdasarkan data (30), (32), dan (33), leksikon *perempuan* berfungsi sebagai partisipan *goal* dalam klausa berbentuk pasif tanpa menghadirkan pelaku. Partisipan *goal* lebih ditonjolkan daripada partisipan *actor*. Hal ini dikarenakan partisipan *goal* menjadi fokus pembicaraan penulis teks terkait ketidakadilan gender. Adapun kehadiran partisipan *goal* tersebut merupakan kategori *verbal group* yang disusun melalui proses material berupa *verba intransitif* ‘dimulai’, ‘dikontrol’, dan ‘digunakan’. Keberadaan satuan lingual *perempuan* diposisikan sebagai sasaran dari partisipan *actor* yang disembunyikan. Adanya penyembunyian tersebut dimaksudkan untuk melindungi pelaku atas tindakan yang dilakukan serta sebagai penghalusan (*eufimisme*). Selain itu, penyembunyian dilakukan karena klausa tersebut sudah berterima bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak lain karena ideologi patriarki. Penulis dalam penyusunan klausa ini hendak menyampaikan bahwa perempuan dalam realitas sosial kerap dikonotasikan sebagai korban dan penerima kebijakan. Meskipun mereka juga bisa berperan sebagai pelaku.

Berdasarkan ketiga data di atas, terdapat tiga sirkumstan yang mengikutinya sebagai pelengkap, yaitu *circumstance of manner* berupa kategori *adverbial group* ‘kiranya lebih efektif’ dan ‘dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan’ pada data (30), pada data (32) yang diikuti oleh *circumstance of place* dan *circumstance of manner* berupa kategori *prepositional group* ‘pada ranah publik’ dan *adverbial group* ‘melalui kebijakan dan perundang-undangan’, sedangkan pada data (33), diikuti oleh *circumstance of cause* berupa kategori *prepositional group* ‘untuk perlengkapan administrasi, demi untuk untuk pemenangan kepentingan politik semata’ sebagai pelengkap.

Berdasarkan ketujuh data yang mengandung partisipan *goal 30% kuota perempuan, DCT perempuan, eksploitasi perempuan, emansipasi politik perempuan, emansipasi perempuan, perempuan, pembangunan peran perempuan, dan perempuan* dapat disimpulkan bahwa pengalaman penulis teks melalui satuan lingual *perempuan* lebih cenderung sebagai korban (objek) dari tindakan pelaku *subjek logis*. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam realitas sosial masih belum setara dengan laki-laki karena perempuan kerap mengalami diskriminasi berupa ketidakadilan gender.

(27) Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan **30 persen kuota perempuan**

Pt:Actor Pr: Material Pt:Goal

pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif

Sirk:Loc

(28) Faktanya, banyak partai politik yang memasang **DCT perempuan**

Pt:Actor Pr:Material Pt:Goal

hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja

Sirk:Cause

(29) Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu

Pt:Actor

akan melahirkan *eksploitasi perempuan* dalam ranah politik

Pr:Material Pt:Goal Sirk:Location

(30) Namun, kiranya lebih efektif jika *emansipasi politik perempuan*

Konj. Sirk:Manner Konj. Pt:Goal

dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan

Pr:Material Sirk:Manner

(31) Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat *emansipasi perempuan*

Pt:Actor Pr:Material Pt:Goal

dalam ranah politik, hanya akan menjadikan *perempuan*

Sirk:Location Pr:Material Pt:Goal

sebagai komoditas politik.

Pt:Role

(32) Menurut saya, *pembangunan peran perempuan* pada ranah publik,

Pt:Goal Sirk:Location

khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan

Pr:Material Sirk:Manner

peraturan perundang-undangan

(33) Bagaimana tidak, *perempuan* hanya digunakan untuk perlengkapan

Pt:Goal Pr:Material Sirk:Cause

administrasi, demi untuk pemenangan kepentingan politik semata

c) **Leksikon *Perempuan* sebagai Partisipan *Recipient***

Dalam pembahasan ini, kedudukan leksikon *perempuan* dalam partisipan *recipient* menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai pihak penerima atas tindakan yang dilakukan oleh partisipan *actor*. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan itu bersifat pasif bukan aktif. Adapun perbedaan partisipan

goal dan *recipient* terletak pada preposisi sebagai penanda partisipan *recipient*, yaitu kata “pada dan bagi”.

Pada data (34), (35), dan (36) leksikon *perempuan* dihadirkan sebagai partisipan *recipient*. Partisipan ini merupakan partisipan ketiga dalam proses material. Kehadirannya selalu didahului oleh partisipan *actor* dan partisipan *goal*. Peran dan fungsi partisipan *recipient* menjadi penerima dari tindakan partisipan *actor*. Kehadiran satuan lingual *perempuan* pada data (34), susunan klausanya berupa *verbal group* ‘menunjukkan’ yang berkategori sebagai verba aktif dengan akhiran “*kan*” serta menghadirkan partisipan *actor* ‘fenomena di atas’ berupa *nominal group* dan diikuti oleh partisipan *goal* ‘ketidakefektifan kuota politik’ serta menghadirkan *prepositional group* berupa partisipan *recipient* ‘pada kaum perempuan’.

Selanjutnya, pada data (35), proses material berupa *group verbal* ‘telah menorehkan’, sedangkan partisipan *actor* ‘sejarah’ berupa *group nominal*. Selanjutnya, partisipan *goal* berupa *nominal group* ‘tinta emasnya’ dan diikuti oleh partisipan *recipient* berupa kategori *prepositional group* ‘bagi perempuan-perempuan’ serta diikuti *circumstance of place* berupa kategori *prepositional group* ‘di zaman dan bidangnya’. Sementara itu, pada data (36) proses material berupa *verbal group* ‘memberi’, sedangkan partisipan *actor* ‘era kesetaraan gender’ merupakan kategori *nominal group*. Selanjutnya, partisipan *goal* ‘kesempatan’ berupa *nominal group* dan diikuti oleh partisipan *recipient* ‘pada perempuan’ berupa *prepositional group* serta diikuti *circumstance of cause* ‘untuk berdiri sendiri setara dengan laki-laki tanpa

harus dikontrol melalui kebijakan' sebagai pelengkap berupa *prepositional group*.

Kehadiran satuan lingual *perempuan* pada ketiga data di atas diposisikan sebagai penerima atas tindakan yang dilakukan oleh *subjek logis*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam realitas sosial bersifat pasif karena peran dan fungsinya ditentukan oleh pelaku. Berikut data pendukungnya.

(34) Kesetaraan Gender Ketiga, fenomena di atas menunjukkan

Pt:Actor Pr:Material
ketidakefektifan kuota politik ***pada kaum perempuan***
Pt:Goal Pt:Recipient

(35) Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi ***perempuan*** –

Pt:Actor Pr:Material Pt:Goal Pt:Recipient
perempuan yang berhasil di zaman dan bidangnya
Pt:Location

(36) Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi

Pt:Actor Pr:Material
kesempatan ***pada perempuan*** untuk berdiri sendiri setara dengan
Pt:Goal Pt:Recipient Sirk:Cause
laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan

4.1.2.1.2 Leksikon *perempuan* dalam proses mental

Dalam proses mental, kehadiran partisipan yang mengisi leksikon *perempuan* ada dua, yakni partisipan yang merasakan (*senser*) dan partisipan yang dirasakan (*phenomenon*). Berdasarkan data, proses ini lebih menonjolkan partisipan *phenomenon* tanpa menghadirkan partisipan *senser*. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu dan peristiwa yang dirasakan (*phenomenon*) oleh

partisipan *senser* lebih penting dibandingkan menghadirkannya. Selain itu, tanpa penyebutan partisipan *senser* sudah berterima. Ideologi yang terkandung dari proses ini adalah penekanan terhadap persoalan realitas sosial. Satuan lingual pengisi proses mental disebut *verbal group*, partisipannya disebut *nominal group*, dan sirkumstan disebut *adverbial group* atau *prepositional group*. Keterangan verba pengisi proses mental dan partisipannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Proses Mental

Proses Material		Sirkumstan	
Partisipan <i>Senser</i>	Partisipan <i>Phenomenon</i>	<i>Location</i>	<i>Manner</i>
Terkesan	Pencantuman perempuan	Dalam DCT	Asal cantum dan pasang saja
Dipahami	Kebijakan kuota perempuan	Dalam ranah politik	

a) **Leksikon *Perempuan* sebagai Partisipan *Phenomenon***

Dalam pembahasan ini, data (37) dan (38) partisipan *phenomenon* dari leksikon *perempuan* berperan menjadi peristiwa yang dirasakan dari proses mental *afeksi* (terkesan) dan mental *kognisi* (dipahami) lebih ditonjolkan tanpa menghadirkan partisipan *senser*. Proses mental berkategori *verbal group* berupa kata ‘terkesan’, sedangkan partisipan *phenomenon* berupa *nominal group* ‘pencantuman perempuan’ diikuti oleh *sircumstance of location* berupa ‘dalam DCT’ sebagai *prepositional group* dan *adverbial group* ‘asal cantum dan pasang saja’ sebagai pelengkap. Kedua kategori proses mental tersebut

(afeksi dan kognisi) sebagai penanda bahwa perempuan tidak lepas dari hal bersifat psikologi dalam memandang realitas sosial.

Penonjolan partisipan *phenomenon* dengan menyembunyikan partisipan *senser* menunjukkan sudah berterima karena *senser* sudah tercantum dalam *phenomenon*, yaitu *pencantuman perempuan* dan *kebijakan kuota perempuan*. Selain itu, adanya penanda *modalitas epistemik* ‘harus’ pada data (38) yang bermakna “keharusan” menunjukkan pendapat penulis teks bahwa keterlibatan perempuan seharusnya dipahami sebagai upaya berpihak kepada kesetaraan gender agar peran perempuan dan laki-laki dapat memperoleh kesempatan yang sama (*equality*) di ranah sosial khususnya politik.

(37) sehingga *pencantuman perempuan* dalam DCT terkesan
 Konj. Pt:Phenomenon Sirk:Location Pr:Mental
 asal cantum dan pasang saja
 Sirk:Manner

(38) *Kebijakan kuota perempuan* harus dipahami sebagai bagian dari
 Pt:Phenomenon Pr:Mental Pt:Role
 pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik
 Sirk:Location

4.1.2.1.3 Leksikon *Perempuan* dalam Proses Eksistensial

Dalam pembahasan ini, proses eksistensial hanya memiliki satu partisipan, yaitu *existen*. Berdasarkan data, terdapat lima klausa yang menggambarkan proses eksistensial. Dari kelima data tersebut didominasi oleh proses eksistensial berupa penanda kata sifat (*adjectiva*) dengan kategori kata ‘sedikit’. Hal ini menunjukkan bahwa penulis teks ingin menggambarkan realitas sosial terkait keberadaan perempuan yang berjuang di politik tidak

banyak. Hal ini dikarenakan perempuan masih terikat dengan ideologi patriarki sehingga kehadiran mereka dalam ranah publik, representasinya terbilang minim, sedangkan laki-laki lebih banyak. Satuan lingual pengisi proses eksistensial disebut *verbal group*, partisipannya disebut *nominal group*, dan sirkumstan disebut *adverbial group* atau *prepositional group*. Keterangan verba pengisi proses eksistensial dan partisipannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Proses Eksistensial

proses eksistensial		Sirkumstan	
proses eksistensial	Partisipan <i>Existen</i>	<i>Location</i>	<i>Manner</i>
Sangat sedikit	Kaum perempuan		
Adanya	Ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan	Sampai di sini dan di lapangan	
Sangat sedikit	Caleg perempuan	Di lapangan	secara serius
Tidak sedikit	Kaum perempuan		
Ada	Jaminan		

a) **Leksikon *Perempuan* sebagai Partisipan *Existen***

Satuan lingual *perempuan* pada data (39), (40), (41), (42), dan (43) sebagai partisipan *existen* berfungsi sebagai keberadaan. Dalam pembahasan ini, terdapat lima partisipan *existen* berkategori *nominal group*, yakni '*kaum perempuan*', '*ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas*', '*caleg perempuan yang menindaklanjuti*', *kaum perempuan*

yang terjerat kasus korupsi, dan ‘jaminan bahwa perempuan selalu baik dan lembut’, sedangkan *verbal group* berupa ‘sangat sedikit’, tampaknya ada’, ‘sangat sedikit’, ‘tidak sedikit’, dan ‘tidak ada’.

Pada data (39), partisipan *existen* ‘kaum perempuan’ didahului oleh proses eksistensial berupa jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan yang serius di bidang politik jumlahnya sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, dua proses eksistensial, yaitu pada data (40) dan (41) menghadirkan partisipan perempuan yang diikuti oleh sirkumstan berupa frase preposisional, yakni sirkumstan tempat ‘sampai di sini dan di lapangan’. Kedua data di atas menunjukkan adanya pengalaman penulis teks bahwa partisipan perempuan dalam proses eksistensial berada di konteks tertentu. Selanjutnya, pada data (42) dan (43), partisipan *existen* keberadaannya tidak dipengaruhi oleh peristiwa maupun keadaan tertentu. Artinya tidak ada sirkumstan yang mengisi dalam proses eksistensial. Posisi perempuan dikategorikan sebagai pihak yang tidak lepas dari tindakan korupsi dan bersifat *baik dan lembut*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perempuan yang tidak baik (korup) dan perempuan yang baik (bersih). Namun, antara korup dan bersih tidak bisa dijadikan standar karena dapat berubah kapan dan di manapun saja jika ada kesempatan dan kondisi tertentu.

(39) Jika kita amati secara serius, sangat sedikit

Pr:Eksistensial

kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencaleganya

Pt:*Existen*

(40) Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial, yakni

Sirk:Location Pr:Eksistensial Pt:*Existen*

adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg

Pr:Eksistensial Pt:*Existen*

perempuan dengan realitas di lapangan

Sirk:Location

(41) Di lapangan, sangat sedikit *caleg perempuan* yang menindaklanjuti

Sirk:Location Pr:Eksistensial Pt:*Existen*

secara serius perjuangan politik

Sirk:Manner

(42) Tidak sedikit *kaum perempuan* yang terjerat kasus korupsi, termasuk

Pr:Eksistensial Pt:*Existen*

bahkan korupsi kelas kakap

(43) Sehingga tidak ada jaminan bahwa *perempuan* selalu baik dan lembut

Konj. Pr:Eksistensial Pt:*Existen*

4.1.2.1.4 Leksikon *Perempuan* dalam Proses Relasional

Berdasarkan data, proses relasional terdapat dalam empat klausa. Tiga klausa (44, 45, dan 46) diisi oleh partisipan *carrier-attribute* dan satu partisipan *token-value*.

Dalam pembahasan ini, partisipan *carrier-attribute*, lebih mendominasi dibandingkan partisipan *token-value*. Hal ini menunjukkan bahwa fitur lingual *perempuan* diposisikan sebagai partisipan yang diberikan kualitas melalui partisipan *atributif sirkumstansial*, yaitu pada data (44) dan (45). Selanjutnya pada data (46), partisipan *atributif identifikasi* karena peran atributif tersebut sebagai penjelas atau pengidentifikasi dari partisipan *carrier*. Sementara itu, partisipan *token-value*, satuan lingual *perempuan* berfungsi sebagai identitas yang membutuhkan penjelasan melalui cara teridentifikasi (*token*) dan pengidentifikasi (*value*).

Satuan lingual pengisi proses relasional disebut *verbal group* (bisa, menjadi, dan bersifat), partisipannya disebut *nominal group* (perempuan, emansipasi perempuan, dan kuota politik perempuan dan sirkumstan disebut *adverbial group* ‘melalui potensi diri yang dimilikinya’ serta *prepositional group* ‘di siang bolong’. Keterangan *verbal group* pengisi proses relasional dan partisipannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Proses Relasional

Proses Relasional (<i>verbal group</i>)	Partisipan				Sirkumstan
	<i>Carrier</i>	<i>Atribute</i>	<i>Token</i>	<i>Value</i>	<i>Manner, location, dan cause</i>
Bisa	Perempuan	Hebat	-	-	Melalui potensi yang dimilikinya (manner)
Menjadi	Emansipasi perempuan	Mimpi	-	-	Jika ini terjadi (cause), dalam politik (location),
Bersifat	Kuota politik perempuan	Formalitas belaka	-	-	
Adalah	-	-	Membangun karakter para politisi- termasuk politisi perempuan	Salah satu cara bagaimana membangun poliik bersih di negeri in.	Di negeri ini (location)

a) Leksikon *Perempuan* sebagai Partisipan *Carrier*

Dalam pembahasan ini, leksikon *perempuan* sebagai partisipan *carrier* pada data (44), (45), dan (46) berperan menjadi partisipan yang diberikan atribut. Kata *perempuan*, *emansipasi perempuan*, dan *kuota politik perempuan* merupakan *nominal group* yang berperan sebagai pembawa atribut yang akan diberikan penanda, sedangkan kata *hebat* dan *mimpi* merupakan *nominal group*. Sementara itu, *adverbial group* dan *prepositional group* diisi oleh *melalui potensi yang dimilikinya* dan *di siang bolong*

Dalam proses relasional ini, antara *carrier-attribute* ditandai dengan *verbal group* ‘bisa’ yang termasuk kategori penghubung antara pembawa atribut dan atribut itu sendiri. Kata “bisa” termasuk kategori *modalitas epistemik* yang menunjukkan makna *kemungkinan*. Artinya penulis teks belum percaya terhadap kemampuan yang dimiliki kaum perempuan dalam realitas sosial. Padahal kompetensi yang dimiliki kaum hawa tidak kalah dengan laki-laki dalam berpolitik. Meskipun di masyarakat, perempuan dikenal sebagai kaum yang lemah dan lembut, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan berpikir dan melakukan tindakan yang tidak kalah dengan laki-laki.

(44) *Perempuan* bisa hebat melalui potensi yang
Pt:Carrier Pr:Relasional Pt:Atribut Sirk:Manner
dimilikinya

(45) Jika ini terjadi, maka *emansipasi perempuan* dalam politik,
Konj. Pt:Carrier
sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi

Pr:Relasional

mimpi di siang bolong.

Pt:Attribute Sirk:Loc

(46) Pertama, **kuota politik perempuan** dalam konteks ini hanya bersifat

Pt:Token

Pr:Relasional

formalitas belaka.

Pt:Value

b) Leksikon Perempuan sebagai Partisipan Token

Leksikon *perempuan* sebagai partisipan *token* pada data (47) berperan menjadi partisipan identitas (yang diberi nilai), sedangkan partisipan *value* merupakan nilai itu sendiri. Keberadaannya partisipan *token* berupa stuan lingual termasuk *politisi perempuan* merupakan *nominal group* sebagai satuan lingual yang teridentifikasi, sedangkan *salah satu cara bagaimana membangun politik bersih di negeri ini* merupakan *value* berupa kategori *adverbial group* sebagai satuan pengidentifikasi. Selanjutnya, sirkumstan tempat diisi oleh *prepositional group* 'di negeri ini'.

Sementara itu, proses *identifying* dapat diidentifikasi melalui penggunaan *group verbal* 'adalah' yang termasuk kategori mempatkan suatu identitas dan menghubungkan partisipan dengan identitasnya, yakni menghubungkan partisipan *token* dengan *value*.

(47) Membangun karakter para politisi—**termasuk politisi perempuan**—

Pt:Token

secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun

Pr:Relasional Pt:Value

politik bersih di negeri ini

Sirk:Location

4.1.2.2 Nominalisasi

Dalam pembahasan ini, muatan ideologis yang hendak disampaikan penulis teks dalam bentuk ini, yaitu penyembunyian pelaku, menghindari *pleonasmе* (pemborosan kata) karena pelakunya sudah berterima, dan demi penghalusan (*eufimisme*). Namun, dalam bentuk ini, penonjolan peristiwa lebih diutamakan daripada tindakannya. Unsur nominalisasi terdapat pada enam klausa, yaitu berupa *pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan* pada data (30) halaman 69, *pembangunan peran perempuan* pada data (32) halaman 69, *perlengkapan administrasi dan pemenangan kepentingan politik semata* pada data (33) halaman 70, *pencantuman* pada data (37) halaman 74, *pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik* pada data (38) halaman 75, dan *perjuangan politik* pada data (41) halaman 77. Dari keenam nominalisasi tersebut yang disusun melalui klausa aktif dan pasif. Adapun verba dari ketujuh nominalisasi di atas berupa *berjuang*, *melengkapi*, dan *membangun*.

Nominalisasi dari klausa pasif terdapat pada data (30) yaitu *...dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan*, pada data (32) yaitu *...pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik tidak harus dikontrol*, pada data (33) yaitu *...perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi*, pada data (37) yaitu *sehingga pencantuman dalam DCT*, dan pada data (38) yaitu *...harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan politik*. Sementara itu, nominalisasi klausa aktif pada data pada

data (41) yaitu ...*caleg perempuan yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik*.

Penggunaan keenam nominalisasi di atas dimaksudkan menyembunyikan pelaku karena posisi pelaku dianggap sudah *mafhum*. Selain itu, agen yang terlibat dalam persoalan ketiadaadilan gender sudah diketahui yaitu laki-laki melalui partai politik.

4.1.2.3 Pemasifan

Dalam pembahasan ini, nilai ideologis yang terkandung dalam bentuk penggunaan pasifasi sama seperti penggunaan bentuk nominalisasi, yaitu penyembunyian pelaku, menghindari *pleonasmе*, dan dimaksudkan sebagai *eufimisme*. Unsur-unsur pasifasi terdapat pada empat klausa yang di dalamnya mengandung kata pasifasi, yaitu berupa kata *dikatrol* pada data (32) halaman 69, *digunakan* pada data (33) halaman 70, *dipahami* pada data (38) halaman 74, dan *terjerat* pada data (42) halaman 77. Kehadiran keempat kata tersebut dalam klausa menunjukkan bahwa partisipan *goal* lebih ditonjolkan daripada partisipan *actor*.

Dalam data (32) klausa pengisi klausa pasifasi, yaitu *dikatrol*. Kehadiran kata tersebut menunjukkan adanya penyembunyian pelaku pada susunan klausa tersebut. Penggunaan bentuk pasif dengan penonjolan partisipan *goal* satuan lingual *pembangunan peran perempuan*, mencerminkan pentingnya *goal* daripada *actor*. Kehadiran pelaku dalam hal ini ‘pemerintah’ disamarkan karena topik yang menjadi pembahasan adalah realitas sosial terkait posisi perempuan. Tanpa kehadiran *actor*, sebenarnya sudah berterima maksud

penyusunan klausa tersebut. Oleh sebab itu, penulis teks menanggalkan kalimat aktif berupa kata “mengontrol” dengan maksud menyamakan pelaku yang sudah diketahui.

Pada data (33), penggunaan pasifasi berupa kata *digunakan*. Pembentukan klausa pada data tersebut lebih menonjolkan partisipan *recipient* (penerima) tanpa menghadirkan partisipan *actor*. Penonjolan *recipient* merupakan strategi penulis teks ingin menunjukkan bahwa posisi perempuan hanya sebagai penerima atas tindakan yang dilakukan pelaku. Selain itu, penulis teks juga menganggap penghilangan pelaku dianggap sudah *mafhum*, artinya tanpa disebutkan pelakunya, pembaca dapat memahami bahwa pelakunya adalah ‘parpol’ karena parpol menjadi pintu utama bagi perempuan dalam DCT terkait lolos atau tidak dalam sebagai caleg. Jadi, penulis teks tidak perlu menghadirkan pelaku dengan menggunakan kalimat aktif melalui verba ‘menggunakan’.

Pada data (38), penggunaan kalimat pasif berupa kata *dipahami* daripada kata aktif *memahami* bertujuan untuk menyembunyikan *agen*. Dengan penonjolan peristiwa (*phenomenon*) menunjukkan bahwa penulis teks ingin menginformasikan kondisi perempuan yang kena dampak dari kebijakan pemerintah sehingga posisinya seakan tersudutkan. Misalnya, kebijakan kuota 30% bagi perempuan, sedangkan laki-laki 70%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dalam parpol lebih mendominasi dibandingkan perempuan.

Selanjutnya, data (42), penggunaan kalimat pasif berupa kata *terjerat* dengan melibatkan pelaku yaitu *kasus korupsi*. Meskipun susunan klausanya

merupakan *proses eksistensial* yang hanya terdiri dari satu partisipan, yaitu *existen*, tetapi di dalamnya mengandung partisipan *actor*. Klausa tersusun dengan menonjolkan proses eksistensial berupa kata sifat ‘tidak sedikit’ bukan peristiwa sebagaimana pada data (38). Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan yang terlibat dalam parpol jumlahnya tidak banyak dibandingkan laki-laki.

4.1.2.4 Penegasian

Dalam pembahasan ini, bentuk penegasian digunakan untuk mengingkari pernyataan yang sudah ada atau pernyataan tersebut digunakan untuk menyangkal pandangan umum dalam realitas sosial. Maksud dari penggunaan negasi adalah bermakna sebaliknya dari pernyataan yang disampaikan oleh penutur. Berdasarkan data, unsur penegasian terdapat pada tiga klausa yang di dalamnya terdapat kata *tidak harus* pada data (32) halaman 70, *tanpa harus* pada data (36) halaman 72, dan *tidak sedikit* pada data (42) halaman 77. Dari ketiga kata negasi tersebut, dua kata negasi melekat pada *modalitas epistemik* bermakna sangkalan ‘keharusan’ berupa kata ‘tidak harus’ dan ‘tanpa harus’.

Kedua negasi tersebut menggambarkan sikap penulis teks terhadap realitas sosial. Artinya ada penilaian penulis teks bahwa persoalan kuota perempuan tidak seharusnya ditentukan oleh pemerintah, tetapi harus dari kesadaran kaum perempuan itu sendiri. Sementara itu, penegasian yang lain terdapat pada negasi *adjektif* ‘tidak sedikit’ yang menerangkan makna kuantitas. Artinya jumlah perempuan yang terjerat kasus korupsi jumlahnya juga tidak sedikit.

4.1.3 Struktur Teks

Struktur teks secara umum terdiri atas pembukaan (*opening*), isi (*body*), dan penutup (*closing*). Namun, berdasarkan analisis data pada “Kolom Perempuan” berupa 13 paragraf, struktur teksnya berkategori genre *Analytical Exposition* yang terdiri dari tesis, argumen, elaborasi, dan reiterasi. Berdasarkan genre tersebut, penulis teks berpendapat dan menggambarkan realitas sosial terkait persoalan perempuan ketika mendaftar caleg dalam parpol masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Hal ini dikarenakan dalam konstelasi pencalegan, keberadaan perempuan dalam parpol hanya dijadikan simbol kelengkapan parpol, sebagai pihak yang pasif, dan pencantuman nama-nama perempuan dimungkinkan asal pasang nama demi memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, perempuan juga mengalami diskriminasi dari segi kebijakan pemerintah, yaitu *termaktub* dalam UU No 10 Tahun 2008 maupun segi administratif. Misalnya, aturan pembagian kuota bagi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yaitu 70% bagi laki-laki dan 30% bagi perempuan.

Dengan penggunaan genre *Analytical Exposition*, ideologi penulis teks adalah provokatif atau persuasif, yakni meyakinkan dan membujuk pembaca khususnya perempuan bahwa berpolitik itu penting. Adanya realitas sosial yang mendiskriminasi perempuan dalam parpol tidak lepas dari ideologi patriarki, dimana laki-laki dikonstruksikan berkuasa dibandingkan perempuan. Oleh sebab itu, upaya perempuan untuk melawan ideologi patriarki tersebut salah satunya

dengan terlibat di politik, yaitu mencalonkan diri sebagai caleg. Partisipasi perempuan dalam pencalegan sudah diatur UU dan memberikan peluang bagi perempuan untuk berpolitik berupa kuota 30%. Meskipun kuota yang diberikan belum seimbang dengan laki-laki.

Selain itu, adanya anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki bukan bagi perempuan juga dampak dari ideologi patriarki, di mana perempuan dikonstruksikan tidak cocok berpolitik. Padahal, keduanya sama-sama berpeluang dan berpartisipasi di ranah publik. Posisi perempuan tidak seharusnya dilabelkan dalam urusan domestik, yaitu *macak*, *manak*, dan *masak*, sedangkan laki-laki *ngantor*, *bekerja*, dan *berkuasa*. tetapi partisipasi dan eksistensinya dalam ranah publik juga menjadi hal yang penting.

Berdasarkan wacana di atas, **tesis** terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-2. Tesis ini berkaitan dengan pernyataan dan gambaran penulis perihal pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang sudah dekat, yakni 9 April 2014. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang berlangsung tiap lima tahun. Pelaksanaan Pemilu tidak bisa lepas dengan masa kampanye dan pemasangan atribut. Meskipun masa kampanye belum dimulai, terkadang berbagai atribut partai sudah terpampang di sudut-sudut strategis oleh tim maupun partisipan dari Capres-cawapres maupun caleg yang bersangkutan. Namun, sangat disayangkan bahwa keberadaan berbagai atribut tersebut didominasi foto caleg pria, sedangkan caleg perempuan terlihat minim. Padahal, dalam konstelasi Pemilu, atribut caleg menjadi representasi sekaligus alat sosialisasi kepada publik. Minimnya atribut caleg perempuan menunjukkan bahwa perempuan kurang antusias serta belum serius terjun di politik.

Hal ini dikarenakan posisi perempuan dianggap sebagai pelengkap administrasi partai politik. Peran dan partisipasi perempuan dalam parpol masih dipandang sebelah mata. Meskipun UU No. 10 Tahun 2008 telah mengatur pemberian kuota 30% bagi perempuan bagi setiap partai politik. Munculnya UU tersebut merupakan *angin segar* dan bagian dari *affirmative action* (tindakan afirmasi) bagi perempuan untuk memperoleh kesetaraan gender. UU mengamanatkan agar kuota perempuan menjadi kunci sekaligus langkah awal bagi perempuan untuk aktif dalam parpol dengan diikuti kompetensi dan kualitas sehingga eksistensinya diperhitungkan dan tidak hanya sebagai pelengkap.

UU pencalegan beberapa tahun sebelumnya, perempuan tidak diberikan *kuota* yang jelas. Oleh sebab itu, minat dan partisipasi mereka dalam parpol bisa dikatakan berkurang serta tidak ramai seperti tahun-tahun ini. Meskipun peluang bagi perempuan berpolitik lebih luas, berbagai bentuk pelemahan, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap perempuan masih tetap terjadi akibat ideologi patriarki, yakni laki-laki sebagai *number one*, sedang perempuan *number scond*.

Argumen dalam wacana berjudul *Keseriusan Caleg Perempuan* terdapat pada paragraf ke-3 - 11. Argumen terkait kuota politik bagi perempuan yang masih menimbulkan pertanyaan dan terjadi ketimpangan. Adanya kuota menjadi alat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Parpol, bukan memanfaatkan perempuan sebagai alat pemenangan Parpol. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas Parpol belum menjalankan ketentuan UU dengan semestinya karena keberadaan perempuan masih mengalami diskriminasi. Partisipasi perempuan dalam Parpol belum dianggap sebagai *partner*, melainkan

sebagai pelengkap. Oleh sebab itu, penulis teks dalam hal ini berpendapat bahwa persoalan dan ketimpangan terhadap kuota perempuan bisa dijelaskan melalui tiga alasan. *Pertama*, kuota perempuan bersifat formalitas. *Kedua*, kota perempuan menimbulkan eksploitasi. *Ketiga*, kuota perempuan belum efektif.

Alasan pertama, kemunculan kebijakan kuota perempuan belum dijalankan Parpol sebagaimana mestinya. Kuota masih sekedar wacana dan simbol. Selain itu, Parpol juga masih beranggapan bahwa ada kuota maupun tidak ada kuota sama saja artinya perempuan tetap menjadi kaum *inferior*, sedangkan laki-laki *superior*. Padahal, aturan kuota termaktub dalam UU dan semestinya diterapkan oleh Parpol untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik bukan menjadikan kaum hawa sebagai simbol kepantasan agar lolos kualifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Parpol belum serius melibatkan perempuan dalam politik sehingga dimungkinkan pencantuman perempuan tidak berdasarkan seleksi, tetapi asal pasang nama demi memenuhi persyaratan di KPU.

Alasan kedua, peraturan kuota perempuan menyebabkan terjadinya eksploitasi bagi kaum perempuan sendiri. Adanya kuota perempuan sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik bukan eksploitasi. Kebijakan kuota semestinya disambut positif serta dijalankan dengan semestinya oleh Parpol. Namun, fakta di masyarakat, perempuan kerap dijadikan sebagai alat pemenangan pemilu. Selain itu, kebijakan kuota perempuan tidak berdampak positif terhadap peningkatan politik perempuan justru menjadikan perempuan sebagai komoditas politik layaknya barang komersil. Hal ini

menunjukkan bahwa emansipasi yang diharapkan dengan adanya kebijakan kuota perempuan tidak selamanya berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif.

Alasan ketiga, keberadaan kuota tidak efektif. Kebijakan pemerintah demi meningkatkan partisipasi perempuan berpolitik semestinya tidak perlu diatur dalam undang-undang, tetapi harus dimulai dari kesadaran kaum hawa itu sendiri berpartisipasi dalam politik. Namun, pembangunan peran perempuan dengan cara penyadaran perempuan kiranya lebih efektif dibandingkan lainnya. Hal itu dikarenakan bahwa dengan kesadaran, perempuan bisa bangkit dan percaya bisa bersaing dengan laki-laki melalui potensi-potensi yang miliknya. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan kuota tersebut dipahami oleh kaum perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan berpolitik. Meskipun dalam realitanya, politik masih didominasi oleh kaum adam, sedangkan kaum hawa hanya sebagai *inferior*.

Setiap kebijakan yang diputuskan sebenarnya mempunyai tujuan positif, yaitu dalam rangka memotivasi perempuan agar berpolitik. Oleh sebab itu, kebijakan kuota tersebut harus dimanfaatkan demi terciptanya keadilan gender yang selama ini mengalami diskriminasi, di mana kondisi serta nasib kaum perempuan dikonstruksikan negatif. Diskriminasi terhadap perempuan tidak boleh *dilanggengkan* dan yang bisa merubah terhadap nasib perempuan hanyalah perempuan sendiri, jika perempuan tidak terjun dan berjuang dalam politik terus siapa yang memperjuangkan emansipasi karena tidak ada yang bisa merasakan nasib perempuan, kecuali kaum perempuan itu sendiri.

Elaborasi dalam wacana di atas, terdapat pada paragraf ke-12. Penulis teks menyampaikan contoh pengalaman terkait keterlibatan para perempuan dalam kasus korupsi mulai dari Angelina Sondakh, Artalita Suryani, Hartati Murdaya sampai Ratu Atut Chosiyah. Para perempuan tersebut menunjukkan bahwa kaum hawa tidak bisa bersih dari korupsi. Selain itu, dengan adanya keterlibatan para perempuan dalam kasus korupsi berarti tidak ada jaminan bagi perempuan itu lebih baik daripada laki-laki. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa perempuan itu baik, lembut, dan sopan masih diragukan dan dipertanyakan.

Reiterasi dalam wacana di atas, terdapat pada paragraf ke-13. Reiterasi berkaitan dengan cara membangun karakter politisi perempuan agar menjadi kader Parpol yang berjati diri dan bersih. Peran dan partisipasi perempuan dalam politik jika bercitra buruk di mata publik berarti sama halnya menjelekkan para perempuan karena politisi perempuan bagian dari simbol perempuan. Oleh sebab itu, terciptanya karakter unggul bagi politisi perempuan menunjukkan bahwa perempuan ikut membangun politik bersih tanpa korupsi di negeri ini.

4.2 Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap penafsiran atau penjelasan teks pada “Kolom Perempuan” dan menafsirkan teks tersebut menurut pendapat peneliti. Penafsiran teks dilakukan untuk mengetahui latar belakang kemunculan teks, untuk siapa teks diproduksi, posisi penulis teks dan pembaca, dan menemukan nilai-nilai ideologis tertentu yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan tafsiran peneliti atas latar belakang produksi teks yang diproduksi penulis teks dapat disimpulkan bahwa kemunculan teks dipengaruhi

oleh ideologi patriarki dalam realitas sosial. Penulis teks melalui kognisi sosialnya berpandangan perempuan dalam politik masih mengalami diskriminasi karena perempuan dikonstruksikan sebagai *inferior*. Selain itu, posisi perempuan dalam politik hanya dijadikan sebagai objek demi kepentingan partai politik sehingga kehadiran leksikon *perempuan* dihadirkan oleh penulis teks didominasi oleh partisipan *goal* dan *recipient*.

Selanjutnya, kehadiran teks tersebut diperuntukkan bagi pembaca perempuan maupun laki-laki. Namun, prioritas teks tersebut dikhususkan bagi pembaca perempuan. Hal ini dikarenakan isi teks lebih banyak membicarakan persoalan perempuan terkait ketidakadilan gender dan bagaimana cara perempuan mengatasinya. Kaum perempuan dalam teks diposisikan sebagai korban diskriminasi oleh parpol akibat ideologi patriarki. Sementara itu, bagi pembaca laki-laki, teks tersebut diharapkan menjadi bacaan *introspektif* sehingga parpol yang didominasi laki-laki tidak mendiskriminasi perempuan dalam pencalegan karena posisi perempuan dan laki-laki adalah sama.

Posisi penulis teks dalam menggambarkan realitas sosial mempunyai dua peran. Pertama, pengamat. Kedua, korban. Peran pertama, penulis yang berprofesi sebagai guru dan ibu rumah tangga tentunya memiliki cara pandang berbeda dengan ibu yang aktif di partai politik. Hal ini dikarenakan gagasan yang disampaikan dimungkinkan bersifat objektif dan netral karena tidak ada kepentingan tertentu (*tendensi*) dan hanya bermaksud menyuarakan nasib kaum perempuan.

Pengamatan penulis teks terkait realitas sosial masih terdapat kesenjangan peran antara perempuan dan laki-laki. Keberadaan perempuan diidentikkan sebagai objek serta pihak yang dirugikan akibat konstruksi sosial karena ideologi patriarki. Penulis sebagai pengamat juga memberikan gagasan terkait persoalan gender. Adapun gagasan penulis teks dapat dianalisis melalui pronomina orang pertama 'saya', yaitu menurut saya dan saya yakin. Hal ini menunjukkan bahwa penulis teks merepresentasikan gagasannya dengan memberikan solusi untuk mengatasi persoalan perempuan melalui pembangunan peran perempuan dan keyakinan perempuan terhadap potensi yang dimiliki. Selain itu, sebagai pengamat, penulis teks juga mempunyai harapan serta keinginan yang digambarkan melalui modalitas intensional 'akan' dan perintah (*imperatif*) melalui modalitas epistemik 'harus'. Jadi, penulis teks dalam menghadirkan teks tidak lepas dari sifat subjektif.

Peran kedua, penulis sebagai representasi kaum perempuan merasakan keadaan di saat pemilu, di mana perempuan ketika ikut mendaftar sebagai calon legislatif masih dipandang sebelah mata oleh parpol. Meskipun parpol menganggap penting perempuan, tetapi partisipasi perempuan dianggap simbol kelengkapan administrasi semata. Keadaan seperti sebenarnya tidak berlaku bagi perempuan yang ikut pencalegan, terkadang ada perempuan yang benar-benar diprioritaskan oleh parpol dikarenakan memiliki jasa dan putri orang ternama (kyai maupun pengusaha). Perlakuan tersebut tentunya berbeda bagi perempuan dari kalangan masyarakat biasa (*awam*), parpol bisa saja mengesampingkan mereka.

Oleh sebab itu, diskriminasi terhadap gender akibat ideologi patriarki masih menjadi bayang-bayang perempuan memperjuangkan emansipasi dalam berperan di ranah publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan perempuan keluar dari diskriminasi adalah berpolitik. Dengan berpolitik dan menjadi anggota dewan, perempuan akan berjuang di bidang regulasi untuk memperjuangkan nasib perempuan karena melalui kebijakan, dimungkinkan *mindset* diskriminasi terhadap perempuan dapat diminimalisir kemudian dapat ditinggalkan.

Penggunaan pronomina orang ketiga “kita” menunjukkan bahwa penulis teks secara tidak langsung berkomunikasi dengan pembaca khususnya perempuan. Komunikasi tersebut menggambarkan penulis teks sebagai subjek maupun objek ketidakadilan memiliki pemahaman yang sama akan posisinya di masyarakat. Kesamaan akan posisi tersebut sehingga membuat mereka sepeham dalam melawan bentuk ketidakadilan gender. Pembaca perempuan harus memahami isu-isu gender di saat pemilu agar kemunculan teks dapat memberikan gambaran

Adapun ideologi yang terkandung dalam kemunculan produksi teks tersebut adalah ideologi patriarki. Namun, penulis teks juga memberikan gagasan agar perempuan melakukan upaya perlawanan terhadap ideologi tersebut melalui gerakan emansipasi ‘kesetaraan gender’.

Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki sebagai pihak penghalang dan membatasi peran perempuan tidak dibenarkan karena keduanya sama-sama menjadi korban dari pemahaman gender yang *rancu* atau belum benar sehingga menjadikan kedudukan laki-laki di atas perempuan tidak setara. Padahal, laki-laki

dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam peranan sosial maupun publik. Tahap interpretasi dapat dikaji dengan berbagai cara sebagai berikut:

4.2.1 Penafsiran terhadap Teks

Penafsiran ini dilakukan pada setiap kata, frase, dan kalimat yang diproduksi oleh penulis teks pada “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka*. Selain itu, tahap ini juga mencari nilai-nilai ideologis yang tercermin dalam teks:

4.2.1.1 Penafsiran Kosakata dan Tata Bahasa

Berdasarkan pola klasifikasi (*classification scheme*) terdapat tiga data yang akan ditafsirkan, yakni *kuota perempuan*, *DCT perempuan*, dan *caleg perempuan*. Ketiga satuan lingual di atas juga menunjukkan adanya anti tesisnya berupa *kuota laki-laki*, *DCT laki-laki*, dan *caleg laki-laki*.

Penggunaan pola klasifikasi di atas menunjukkan bahwa penulis teks bermaksud menggambarkan realitas sosial terkait politik, di mana perempuan mengalami diskriminasi dan sebagai pihak yang dirugikan. Ideologi yang tercermin dalam pola klasifikasi adalah patriarki karena keberadaan perempuan digambarkan sebagai pelengkap (penanda khusus), sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pihak yang berkuasa. Padahal kata *kuota*, *DCT*, dan *caleg* juga berlaku bagi laki-laki. Hal ini juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam penggunaan kata terhadap perempuan.

Berdasarkan pada kata-kata ideologis yang diperjuangkan dan *overwording*, terdapat tiga kata yang selalu diulang-ulang, yakni *kuota*, *emansipasi*, dan *kesetaraan gender*. Pengulangan ketiga satuan lingual di atas menggambarkan persoalan kaum perempuan dalam politik yang masih

menimbulkan ketidakadilan. Posisi kaum hawa dalam politik kerap dinomorduakan dan hanya dijadikan pelengkap. Misalnya, perempuan hanya diberi kuota 30%, sedangkan laki-laki 70%.

Oleh sebab itu, ketiga satuan lingual di atas merupakan bentuk perlawanan dari kaum perempuan terhadap subordinasi yang dikonstruksikan pada mereka, yakni perempuan dianggap sebagai *konco wingking* sehingga posisinya kerap di bawah laki-laki dalam realitas sosial khususnya politik. Pengulangan satuan lingual tersebut diharapkan dapat merubah *mindset* masyarakat sehingga posisi dan peran perempuan tidak mengalami diskriminasi. Adanya subordinasi yang menganggap kaum hawa sebagai individu yang tidak penting tentunya dipengaruhi oleh ideologi patriarki.

Selanjutnya, relasi makna berupa sinonim. Berdasarkan kajian data, satuan lingual berupa sinonim terdiri dari tiga klausa yang memiliki makna sama, yakni *hanya bersifat formalitas belaka, hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja, dan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi*. Ketiga satuan lingual tersebut menunjukkan bahwa peran kaum perempuan dianalogikan sebagai pelengkap administrasi dalam urusan politik. Posisi perempuan dianggap belum setara dengan laki-laki, yaitu kaum perempuan dianggap *inferior*, sedangkan laki-laki *superior*.

Pengulangan ketiga satuan lingual tersebut menunjukkan bahwa perempuan mengalami bentuk ketidakadilan gender berupa subordinasi. Ketidakadilan ini muncul dikarenakan adanya paham patriarki sehingga posisi perempuan dijadikan sebagai objek (sasaran) atas kepentingan politik dan

pemenuhan persyaratan administrasi politik. Keberadaan perempuan sebagai kaum *inferior* tidak lepas dari anggapan negatif masyarakat yang memojokkan peran kaum perempuan sehingga anggapan tersebut sulit dihilangkan dan mengekang perempuan berperan di rana publik.

Sementara itu, makna metaforis. Berdasarkan kajian data, terdapat sembilan satuan lingual yang mengandung makna metaforis dengan kategori *metafora konseptual*, yaitu satuan lingual *perjuangan politik, perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, eksploitasi perempuan, eksploitasi politik, komoditas politik, mimpi di siang bolong, pembangunan peran, pembangunan kesadaran, dan sejarah telah menorehkan tinta emasnya*. Kesembilan satuan lingual bermakna metaforis tersebut menunjukkan bahwa penulis teks hendak menyampaikan realitas sosial, tetapi dengan bentuk kiasan. Selain itu, penulis teks menggunakan satuan lingual metaforis daripada lainnya bertujuan memperhalus dan membuat konsep agar mudah dipahami atas subordinasi dan ideologi patriarki terhadap perempuan.

4.2.1.2 Penafsiran Koherensi Lokal

Penafsiran pada bagian ini dilakukan dengan mengkaji penggunaan koherensi yang digunakan penulis teks pada wacana “Kolom Perempuan”, baik yang berupa *clause simplex* maupun *clause complex*. Berikut ini penjelasan penafsiran koherensi lokal melalui tabel:

Tabel 9. Sistem Taksis (Parataksis dan Hipotaksis) dan Sistem Logiko-Semantik (Ekspansi dan Proyeksi)

Taksis									
PARATAKSIS					HIPOTAKSIS				
EKSPANSI			PROYEKSI		EKSPANSI			PROYEKSI	
Elaborasi	Ekstensi	Enhancemen	Lokusi	Ide	Elaborasi	Ekstensi	Enhancemen	Lokusi	Ide
1	10	-	-	-	-	3	1	1	1
5,88%	58,83%					17,65%	5,88%	5,88%	5,88%
64,71%					35,29%				

Berdasarkan tabel di atas, beberapa klausa yang dihadirkan oleh penulis teks didominasi oleh penggunaan *clause simplex* yaitu terdiri dari 11 klausa yang ditandai dengan hubungan logis dalam membangun satu klausa dengan lainnya. Adapun hubungan logis tersebut berupa ‘padahal’ (berjumlah 1), ‘yakni’ (berjumlah 1), ‘hanya’ (berjumlah 3) ‘dan’ (berjumlah 4), ‘namun’ (berjumlah 1), dan ‘bahkan’ (berjumlah 1). Dari Hubungan *taxisnya*, kesebelas hubungan logis sebagai penghubung klausa di atas, sepuluh hubungan logis berkategori *parataxis-ekspansi-ekstensi*. Hal itu dikarenakan kesepuluh hubungan logis tersebut bersifat memperluas dari klausa pertama serta memperjelas informasi yang disampaikan pada klausa pertama, baik hubungan logis bermakna pertentangan (padahal), pembatasan (hanya), namun (pertentangan), dan (penambahan), dan bahkan (penegas). Selanjutnya, hubungan logis yang satu, yaitu berupa ‘yakni’, hubungan *taxisnya* berkategori *parataxis-ekspansi-elaborasi*. Hal itu dikarenakan hubungan logis tersebut bersifat memperluas klausa pertama, tetapi dengan menonjolkan kandungan makna yang disampaikan pada klausa pertama, tidak bersifat memperjelas.

Sementara itu, *clause complex* terdiri atas 6 klausa yang ditandai dengan hubungan logis yang membangun satu klausa dengan klausa lainnya yaitu berupa hubungan logis ‘jika’ bermakna persyaratan, (berjumlah 1), ‘untuk’ bermakna tujuan (berjumlah 2), ‘sehingga’ bermakna hasil atau pengakibatan (berjumlah 1), ‘menunjukkan’ (berjumlah 1), dan ‘saya’ (berjumlah 1). Dari Hubungan *taxis*nya, kedua hubungan logis (jika dan untuk) sebagai penghubung klausa di atas berkategori *hypotaxis-ekspansi-ekstensi*. Hal itu dikarenakan kedua hubungan logis tersebut bersifat memperluas dari klausa pertama serta memperjelas informasi yang disampaikan pada klausa pertama. Selanjutnya hubungan logis berupa ‘sehingga’ berkategori *hypotaxis-ekspansi-ehancemen*. Hal ini dikarenakan konjungsi tersebut bersifat memperluas karena menghadirkan klausan kedua sebagai makna hasil atau akibat dari klausa pertama.

Kategori *hypotaxis* juga terdapat kata “menunjukkan” dan “saya”. Kata yang pertama termasuk kategori *hypotaxis-proyeksi-lokusi*. Hal ini dikarenakan penanda koherensi yang pertama menunjukkan ujaran tidak langsung atau sebagai laporan dengan melepaskan konjungsi *bahwa*. Selanjutnya, penanda koherensi kedua (saya) merupakan kategori *hypotaxis-proyeksi-ide*. Hal ini dikarenakan konjungsi “saya” sebagai kanta ganti orang pertama sekaligus sebagai representasi ide dalam mengungkapkan pendapatnya secara langsung.

Dengan demikian, penulis teks dalam menggambarkan realitas sosial cenderung mengungkapkan pesannya secara jelas. Hasil temuan dari beberapa klausa dibangun melalui hubungan logis dengan *logico semantic* berupa *parataxis-ekspansi-ekstensi*. Meskipun juga terdapat penggunaan *clause complex*

dengan kategori *hypotaxis-ekspansi-ekstensi*, namun kemunculannya tidaklah sebanyak penggunaan *clause simplex*. Artinya penulis teks hendak memberikan informasi yang banyak terkait pengalaman yang dimilikinya khususnya persoalan perempuan. Dengan dominasi *clause simplex* juga menunjukkan bahwa keberadaan perempuan yang secara umum dikonstruksikan masyarakat, baik kultural maupun sosial sebagai individu *feminim*, irasional, dan lemah perlu diluruskan. Adanya *clause simplex* menunjukkan hubungan yang setara, tidak ada induk kalimat (*main clause*) maupun anak kalimat (*subordinate clause*). Maka, dalam realitas sosial terkait gender tidak ada istilah *superior* dan *inferior* serta posisi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam peran sosial.

Perbedaan peran sosial bagi perempuan dan laki-laki tidak lepas dari konsep gender yang dipahami kurang tepat oleh masyarakat. Misalnya, perempuan dikonstruksikan dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki dalam ranah publik. Oleh sebab itu, dalam politik yang termasuk kategori publik, perempuan dinomorduakan dan dianggap tidak penting. Jadi, dengan representasi dominasi *clause simplex*, penulis teks menggambarkan posisi laki-laki dan perempuan dalam peran sosial adalah setara.

4.2.1.3 Penafsiran Skemata

Penafsiran pada bagian ini dilakukan dengan mengkaji struktur teks yang diproduksi penulis teks dalam “Kolom Perempuan”. Secara umum, organisasi teks penulisan opini terdiri dari susunan lead, body, dan penutup. Namun, penulis teks dalam wacana tersebut menggunakan kategori genre *Analytical Exposition* yang

terdiri dari tesis, argumen, elaborasi, dan reiterasi. Jika dilihat dari gagasan utama dalam penggunaan teks, wacana tersebut merupakan paragraf deduktif.

Hal ini dikarenakan penulis teks menyampaikan pernyataan (ide) didahului dengan kalimat utama di awal paragraf dan diakhiri dengan kalimat umum di akhir paragraf. Kalimat utama tersebut berupa “pemilu 2014”. Dengan genre *Analytical Exposition*, penulis bermaksud mengajak dan mempengaruhi pembaca khususnya perempuan agar memanfaatkan momentum tersebut dalam memilih caleg dan pemimpin yang berpihak pada persoalan perempuan. Genre *Analytical Exposition* merupakan jenis teks yang berisi tentang gagasan-gagasan penulis teks terkait persoalan tertentu dalam realitas sosial. Namun, pembahasan yang dimaksud penulis terkait dengan persoalan pemilu dan caleg perempuan.

Selain itu, kaum perempuan diharapkan berpartisipasi dalam konstelasi calon legislatif bukan hanya sekedar ikut meramaikan hajatan tahunan saja. Jika terdapat perempuan menjadi anggota legislatif, nasib kaum perempuan dan kepentingan perempuan dapat diperjuangkan sehingga berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak mendiskriminasi perempuan.

4.2.2 Penafsiran Konteks

Penafsiran pada bagian ini terdiri dari penafsiran konteks situasi dan penafsiran intertekstualitas. Penafsiran konteks situasi dilakukan dengan mengkaji penggunaan sistem transitivitas yang meliputi proses, partisipan, dan sirkumtan pada wacana “Kolom Perempuan” sebagai ranah pengalaman penulis teks dalam produksi teks. Selain itu, penafsiran konteks situasi juga menafsirkan aktivitas, topik, dan tujuan penulis teks yang digambarkan melalui wacana. Selanjutnya,

penafsiran konteks intertekstualitas dilakukan dengan mengkaji hubungan penulis dengan pembaca serta pengaruh teks terhadap sosial.

4.2..2.1 Penafsiran Konteks Situasi

Dalam pembahasan ini, analisis data yang menggambarkan satuan lingual *perempuan* diisi oleh empat proses sebagai sistem transitivitas, yaitu proses material berjumlah 12 klausa, proses mental 2 klausa, proses eksistensial 5 klausa, dan proses relasional 4 klausa. Dari keempat proses tersebut, proses material lebih mendominasi dibandingkan proses lainnya. Namun kehadiran satuan lingual *perempuan* dalam proses tersebut, dikategorikan sebagai partisipan *goal* dan *recipient*.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan digambarkan sebagai pihak sasaran atau yang dikenai sasaran dari tindakan pelaku. Adanya dominasi kategori partisipan *goal* dan *recipient* juga dipengaruhi oleh ketidakadilan gender berupa subordinasi yang bagian dari ideologi patriarki yang memosisikan perempuan sebagai *objek* ‘sasaran tindakan’. Sementara itu, sirkumstan yang mendominasi adalah sirkumstan tempat, di mana sirkumstan tersebut merujuk pada pemilu. Dalam persoalan politik, posisi laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan karena anggapan bahwa laki-laki yang memiliki otoritas.

Dalam kajian interpretasi ini, pengalaman penulis teks melalui produksi teks dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender, baik tindakan maupun kebijakan dalam realitas sosial lebih mengekang dan menyudutkan perempuan. Posisi perempuan kerap menjadi sasaran diskriminasi dan perannya tidak begitu diperhitungkan. Hal ini dikarenakan ideologi patriarki sehingga memunculkan

stereotype masyarakat bahwa perempuan adalah *konco wingking, pelengkap suami, masak, manak, dan macak*. Padahal *mindset* ini dapat menjadi faktor untuk melemahkan kaum perempuan. Selanjutnya, adanya ideologi patriarki, di mana laki-laki memegang otoritas dalam keluarga dan perempuan hanya pendamping. Selain itu, konstruksi sosial bahwa perempuan itu *inferior* dan *superior* masih saja berkembang di kehidupan sosial.

Berbagai tindakan maupun kebijakan yang tidak *populis* (menguntungkan) bagi kaum hawa bermula dari belum pemahannya masyarakat dalam memaknai gender sehingga berdampak pada ketidakadilan gender, di mana perempuan menjadi korbannya. Padahal istilah gender hanya berkaitan soal perilaku atau sifat dari keduanya yang bisa dipertukarkan dan gender tidak menuntut perempuan bersifat feminim, sedangkan laki-laki bersifat maskulin. Misalnya, laki-laki memasak dan perempuan ke kantor, laki-laki lemah dan perempuan kuat.

Adanya perbedaan konsep gender sebenarnya tidak menjadi persoalan dengan catatan tidak berdampak pada ketidakadilan gender. Namun faktanya, konsep gender dipahami berbeda sehingga berdampak negatif bagi perempuan, yaitu membatasi dan *mengekang* perempuan di ranah publik khususnya politik. Hal inilah yang hendak digambarkan penulis teks melalui produksi teksnya. Perempuan direpresentasikan sebagai pihak yang menjadi objek tindakan bukan direpresentasikan sebagai pelaku yang melakukan tindakan karena dipengaruhi oleh ideologi patriarki.

Dalam teks “kolom perempuan”, posisi perempuan digambarkan sebagai *The Other* ‘orang lain’, pasif dan hanya dijadikan simbol dalam urusan politik.

Padahal sebenarnya perempuan dapat aktif demi memperjuangkan kesetaraan gender dan melawan konstruksi sosial. Oleh sebab itu, untuk melawan bentuk ketidakadilan yang dilabelkan kepada perempuan diperlukan kebijakan *affirmative action* ‘kebijakan yang diperuntukkan bagi perempuan agar memperoleh keadilan’ perlu diperkuat kembali agar perempuan dalam realitas sosial tidak lagi dikonstruksikan *inferior* khususnya dalam politik.

Jadi, pengalaman penulis teks melalui produksi teks dapat digambarkan bahwa posisi perempuan dalam relitas sosial masih mengalami diskriminasi kultural maupun sosial. Diskriminasi tersebut berdampak pada urusan politik, di mana perempuan tidak diperhitungkan dalam bursa pencalegan. Meskipun keterlibatannya dalam parpol sudah *termaktub* dalam UU berupa pencantuman 30% kuota perempuan, tetapi partisipasi belum dimanfaatkan secara maksimal karena mereka hanya dijadikan simbol dan dinomorduakan. Penulis teks melalui wacana tersebut bertujuan untuk merubah dan memberi masukan terhadap perempuan agar tidak mengalami diskriminasi oleh budaya patriarki. Oleh sebab itu, penulis teks merekomendasikan perempuan berpolitik.

4.2..2.1 Penafsiran Intertekstualitas

Penafsiran ini dilakukan untuk mengkaji hubungan penulis dengan pembaca dan bagaimana *social effect* dari produksi teks. Dalm hal ini, penulis teks menggunakan *presuposisi* ‘anggapan’ yang disampaikan penulis teks melalui pernyataan-pernyataan (teks) terkait realitas sosial. Langkah ini dilakukan agar apa yang diungkapkan oleh penulis teks dapat mempengaruhi atau merubah pandangan pembaca.

Dalam realitas sosial, teks tersebut dapat memberikan pengaruh kepada pembaca khususnya perempuan, baik secara praktis maupun ideologis. Secara praktis, perempuan pada pelaksanaan pemilu 2014 yang terpilih sebagai anggota dewan lebih banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam politik lebih meningkat. Sementara itu, secara ideologis, kehadiran teks tersebut memberikan masukan terhadap perempuan bagaimana cara berpikir menghadapi isu-isu gender yang mendiskriminasi perempuan.

4.2.3 Tahap Eksplanasi

Dalam pembahasan ini, produksi teks dilakukan dengan menggunakan level situasional dan sosial. Berdasarkan level situasional, kemunculan wacana pada “Kolom Perempuan” dipengaruhi oleh kondisi tertentu, yaitu kehadirannya pada waktu menjelang pemilu. Penulis teks tidak akan memproduksi teks seperti ini jika tidak berhubungan dengan momen pemilu. Selain itu, redaktur *Suara Merdeka* tidak akan memuat tulisan tersebut jika tidak bertepatan musim pemilu. Jadi, kehadiran wacana tersebut akibat faktor keadaan.

Berdasarkan level sosial, apakah kehadiran wacana tersebut memberi dampak (*effect*) terhadap masyarakat ataukah sekedar wacana. Pengaruh wacana dalam level sosial tidak dapat dilihat secara langsung dan menunggu waktu yang tidak singkat karena harus mengetahui sejauhmana masyarakat mengikuti wacana tersebut. Namun, secara level sosial, dapat disimpulkan bahwa wacana tersebut berpengaruh dalam memberikan informasi dan paradigma kepada pembaca khususnya perempuan terkait isu gender dalam politik. Paradigma tersebut berupa

cara berpikir perempuan bahwa berpolitik bagi perempuan itu kebutuhan karena politik merupakan salah satu upaya memperjuangkan nasib perempuan. Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya caleg perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 32 menjadi 97. Berikut tabel presentasi perempuan di lembaga legislatif:

Tabel 11. Presentase Perempuan di Legislatif

Periode	Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3.8	236	96.2
1955-1960	17	6.3	272	93.7
Konstituante 1956-1959	25	5.1	488	94.9
1971-1977	36	7.8	460	92.2
1977-1982	29	6.3	460	93.7
1982-1987	39	8.5	460	91.5
1987-1992	65	13.0	500	87.0
1992-1997	65	12.5	500	87.5
1997-1999	54	10.8	500	89.2
1999-2004	45	9.0	500	91.0
2004-2009	11	10.7	550	89.3
2009-2014	32	17.49	528	82.51
2014-2019	97	17.32	463	82.67

Sumber: diolah dari berbagai sumber dari media terkait partisipasi perempuan dalam politik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam Pemilu selalu di bawah perolehan laki-laki. Meskipun pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Namun, representasi laki-laki tetap mendominasi. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang memberikan kuota 30% bagi perempuan. Kebijakan kuota tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Bentuk diskriminasi berupa ketidakadilan bagi perempuan yang berkepanjangan di berbagai bidang khususnya politik selain diakibatkan konstruksi sosial juga dipengaruhi *stigma* dari perempuan bahwa politik itu kotor dan hanya bagi laki-laki. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh perempuan untuk melawan ketidakadilan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menciptakan wacana kesetaraan gender khususnya di bidang politik melalui ragam tulis agar kaum perempuan sadar dan *tergugah* berjuang di ranah politik. Berdasarkan kajian wacana pada “Kolom Perempuan”, penulis teks menggambarkan tiga hal terkait persoalan gender di bidang politik.

Pertama, penulis menunjukkan bahwa emansipasi perempuan berupa kesetaraan gender masih belum terwujud. Meskipun dalam realitas sosial, perempuan terpilih menjadi anggota dewan dan perempuan menjadi menteri. Adanya ketidaksetaraan tersebut dikarenakan posisi laki-laki lebih mendominasi di ranah publik. Selain itu, jika diamati masih munculnya bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap perempuan dalam politik ketika pencalegan. Kedua, penulis ingin merubah *paradigma*, *stigma*, dan *stereotype* sosial terkait pemahaman konsep gender yang *keliru* agar peran antara laki-laki dan perempuan setara. Ketiga,

penulis teks memberikan gagasan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, kaum perempuan harus berkompeten, yaitu kemampuan terjun di bidang publik khususnya dalam politik sehingga perempuan mendapat pengakuan sosial bahwa mereka dapat bersaing dengan laki-laki. Dengan berpolitik, perempuan bisa memperjuangkan dan merubah nasib kaumnya menuju keadilan gender serta bebas dalam menentukan peran sosial.

Dalam pembahasan tahap ini, dapat disimpulkan bahwa wacana “Kolom Perempuan” yang digambarkan penulis teks sebenarnya ingin merubah *stigma* yang dikonstruksikan secara kultural maupun sosial terhadap perempuan khususnya dalam ranah politik. Jadi, penulis teks bermaksud melawan ideologi patriarki yang melekat pada *mindset* perempuan, dimana *mindset* tersebut dianggap permanen sekaligus sebagai kodrat sehingga sulit untuk dirubah. Misalnya, Laki-laki menjadi pemimpin, sedangkan perempuan anggotanya.

Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan menjadi agenda penting yang harus dicarikan solusinya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya tegas dari kaum perempuan dalam melawan ketidakadilan. Pertama, melawan *hegemoni* yang merendahkan perempuan dengan cara melakukan *dekonstruksi ideologi*, yakni mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan dan menolak ideologi yang menyudutkan perempuan. Hal ini dilakukan agar membangkitkan kesadaran kritis gender terhadap perempuan. Kedua, melawan paradigma *developmentalism*, yakni anggapan keterbelakangan perempuan diakibatkan mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan objek pembangunan (Fakih, 1996:152).

Gambaran dari pengalaman penulis teks direpresentasikan melalui wacana “Kolom Perempuan” yang mengandung muatan-muatan ideologis. Baik dari unsur kosakata, tata bahasa, dan struktur teks yang digambarkan melalui 23 klausa. Dari ke-23 klausa yang mengandung leksikon maupun satuan lingual *perempuan*, gambaran nilai ideologis berupa ideologi patriarki, di mana kaum perempuan masih dianggap *inferior*, sedangkan laki-laki *superior*. Selain itu, konstruksi sosial bahwa perempuan itu ditakdirkan ditakdirkan berurusan domestik merupakan *stigma* yang tidak boleh dilanggengkan karena tidak menguntungkan bagi perempuan.

Bentuk ketidakadilan akibat dari belum pahamnya masyarakat terkait konsep gender berdampak negatif secara berkepanjangan di berbagai bidang khususnya politik. Oleh sebab itu, perempuan harus melakukan upaya dalam melawan bentuk ketidakadilan demi memperoleh kesetaraan, yakni berjuang mendapatkan emansipasi berupa kesetaraan gender. Meskipun perjuangan memperoleh emansipasi tidak mudah diperoleh dan harus menunggu waktu yang tidak singkat.

Secara sosial, kajian wacana “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka*, penulis teks menggambarkan tiga hal terkait persoalan kaum perempuan di bidang politik. Pertama, penulis menunjukkan bahwa emansipasi perempuan berupa kesetaraan gender belum terwujud. Hal itu ditunjukkan dengan sistem transitivitas, di mana satuan lingual perempuan diposisikan sebagai partisipan *goal* dan *recipient*. Jika dikaitkan dengan konteks sosial, ketidaksetaraan ditandai dengan adanya bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap perempuan. Salah

satunya adalah kasus pencalegan, parpol hanya menjadikan perempuan sebagai perlengkapan administrasi serta simbol kepentingan. Posisi perempuan tidak direpresentasikan sebagai kader yang memperjuangkan partainya, tetapi hanya komoditas parpol. Kedua, penulis ingin merubah *paradigma*, *stigma*, dan *stereotype* sosial terkait pemahaman konsep gender yang *keliru* agar peran di antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi diskriminasi.

Gender bukanlah sebuah konsep yang melabelkan bahwa laki-laki itu *maskulin*, sedangkan perempuan itu *feminim*. Gender hanya perbedaan sikap atau perilaku yang bisa dimiliki oleh keduanya. Misalnya, laki-laki terdapat juga yang tidak *macho*, sedangkan perempuan *macho*. Selain itu, terdapat juga perempuan yang menjadi pemimpin, sedangkan laki-laki menjadi bawahan. Jadi, gender hanyalah istilah netral yang sebenarnya bisa diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan dalam memahami dan membagi peran sosial secara proporsional. Adanya bentuk ketidakadilan bagi perempuan yang diakibatkan kesalahan dalam memahami konsep gender sangat disayangkan dan tidak boleh terulang kembali. Pendidikan berbasis gender menjadi salah satu upaya *preventif* agar gender tidak disalahartikan dalam kehidupan sosial.

Ketiga, penulis memberikan gagasan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, kaum perempuan harus menunjukkan eksistensinya, yaitu terjun di bidang publik khususnya politik. Dengan berpolitik, perempuan menunjukkan representasinya sebagai individu yang tidak beda dengan laki-laki dalam bekerja di ranah publik. Selain itu, dengan berpolitik, perempuan dapat membuat kebijakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan agar perempuan mendapat

pengakuan sosial bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki sehingga pelabelan sosial bahwa perempuan itu hanya berurusan dengan domestik tidak berlaku lagi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan pengalaman penulis teks bahwa kaum perempuan masih mengalami bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan ideologi patriarki berupa subordinasi, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Adapun ideologi dari pola klasifikasi adalah penanda atributif, ideologi kata-kata yang diperjuangkan adalah alat perjuangan dan penegas problem sosial, *overwording* berideologi alat perjuangan dan penegas problem sosial, sinonim berideologi *inferior*. Selanjutnya, ideologi sistem transitivitas (proses material, proses mental, proses eksistensial, dan proses relasional) adalah patriarki, nominalisasi berideologi penyembunyian pelaku, pemasifan berideologi penyembunyian pelaku, dan kalimat negasi berideologi pengingkaran.

Hal ini dibuktikan melalui pengalaman penulis teks dalam merepresentasikan realitas sosial berdasarkan sistem transitivitas dengan menganalisis leksikon maupun satuan lingual *perempuan* yang didominasi oleh proses material dengan partisipan *goal* dan *recipient*. Makna pengalaman dengan kajian SFL melalui pendekatan AWK menunjukkan adanya dominasi penggunaan proses material yang direpresentasikan melalui leksikon *perempuan*, di mana posisi perempuan dalam susunan klausa dikategorikan sebagai partisipan *goal* dan *recipient*. Dalam hal ini, penulis teks ingin menggambarkan bahwa dalam realitas sosial, keberadaan perempuan kerap menjadi sasaran dan korban atas tindakan diskriminasi dan ketidakadilan. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa kultural

dan sosial, yaitu berupa *stigma* perempuan itu lemah serta irasional dan perempuan cenderung diperankan dalam bidang domestik bukan publik.

Kedua partisipan di atas menggambarkan posisi perempuan sebagai sasaran bukan pelaku. Posisi perempuan dikategorikan sebagai penerima kebijakan yang diskriminatif. Namun, perempuan hendak melawan konstruksi sosial melalui gerakan emansipasi. Upaya emansipasi dilakukan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dalam peran sosial. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah melawan *hegemoni* dan paradigma *developmentalism* agar perempuan bersifat kritis terhadap isu-isu gender.

Upaya pertama dilakukan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi, yaitu mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, upaya kedua dilakukan dengan cara melawan persepsi yang memposisikan perempuan sebagai individu yang tidak berperan dalam pembangunan karena dikenal sebagai kaum terbelakang. Kedua upaya tersebut menjadi strategi yang harus disuarakan oleh kaum perempuan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan bagi peneliti berikutnya sebagai berikut: *Pertama*, peneliti dapat melakukan penelitian Makna Eksperiensial dengan kajian SFL melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis merupakan topik penelitian yang sangat menarik karena mengungkap makna dibalik bahasa sebagai praktik sosial. Namun, penelitian ini hanya mengambil satu sumber data dari “Kolom Perempuan” di harian *Suara Merdeka*. Oleh sebab itu, peneliti berikutnya dapat mengambil sumber data yang lebih banyak tentang wacana gender di berbagai

media cetak sehingga bisa diketahui ideologi penulis teks secara *general* melalui sistem transitivitas dengan cara mengidentifikasi keberadaan leksikon maupun satuan lingual *perempuan*, apakah sebagai partisipan *goal*, *actor*, atau lainnya sehingga dapat diketahui ideologi yang dominan.

Kedua. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian wacana gender berdasarkan makna interpersonal maupun tekstual. Makna Interpersonal digunakan untuk melihat hubungan antar penulis dan pembaca melalui produksi bahasa. Kajian ini lebih menitikberatkan pada klausa sebagai pertukaran dan ditandai dalam leksiko-gramatikal dengan sistem mood, modalitas, vokasi, dan sikap bahasa. Sementara itu, makna tektual memandang bahasa menciptakan teks atau wacana pada situasi tertentu. Makna tekstual lebih menitikberatkan pada klausa sebagai pesan dan ditandai dalam leksiko-gramatikal dengan informasi struktur *theme* dan nominalisasi.

Ketiga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para produksi wacana, baik media cetak, dan *online* agar cermat dalam menggunakan pilihan bahasa karena bahasa dapat mencerminkan ideologi institusi maupun individu, baik secara kosakata, tata bahasa maupun struktur teks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvianti, Indah. 2011. "Pengungkapan Ideologi Patriarki Pada Teks Tata Wicara Pernikahan Dalam Budaya Jawa". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anang Santoso. 2012. *Studi Bahasa Kritis*. Malang: Mandar Maju.
- Budiwati, Tri Rina. 2011. "Representasi Wacana Gender Dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Berbahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis". Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
https://www.google.co.id/?hl=en&gws_rd=ssl#hl=en&q=Representasi+Wacana+Gender+Dalam+Ungkapan+Berbahasa+Indonesia+dan+Berbahasa+Inggris:+Analisis+Wacana+Kritis%2C+Budiarti.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. PT. Gramedia. Jakarta.
- Egins, Suzane. 2004. *An Introduction to Systemic Function Linguistic*. London: Continuum.
- Egins, Suzane dan Diana Slade, 1997. *Analysing Casual Conversation*. London: Casel.
- Fakih, Masour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- _____. 1995. *Critical Discourse Analysis: the critical study of language*. London: Longman.
- Gerot, Linda dan Wignel, Peter. 1995. *Making Sense of Functional Grammar*. Cammeray: Gerd Stabler.
- Halliday, M. A. K & Ruqaiya Hasan. 1994. *Cohesion in English*. New York: Longman.
- _____. 1994. *An Introduction to Function Grammar* (second edition). London: Edward Arnold.

- _____. 2004. *An Introduction to Function Grammar* (third edition). London: Edward Arnold.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Katalog Dalam Terbitan.
- Hanifah, Ummy. 2004. "Konstruksi Ideologi Gender pada Majalah Wanita (Studi Analisis Wacana Kritis pada Majalah UMMI)". Jakarta: Universitas Indonesia.
- Huntington, P Samuel & Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis an Introduction to its Methodology*. London: Sage.
- Lakoff, George dan Mark Johnson. 2003. *Metaphors We Live By*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Murniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Buku Pertama*. Magelang: Indonesiatara.
- Nirmala, Deli. 2012. *Metafora Dalam Wacana Surat Pembaca di Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia (Tinjauan Linguistik Kognitif)*. Disertasi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Sjarifuddin, Nia. 2009. "Peningkatan Keterwakilan Perempuan : Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan, dalam Jurnal Perempuan No. 6". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan .
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suganda, Dadang, Wagiyati, dan Nani Darmayanti. 2007. "Representasi Sosok Tenaga Kerja Wanita TKW) Indonesia dalam Wacana Berita pada Harian Umum Utusan Malaysia dan Harian Umum Kompas Indonesia (Kajian Analisis Wacana Kritis)" dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/representative_sosok_tkw_.pdf.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tomasowa, F.H. 1994. "Analisis Klausa Bahasa Indonesia: Pendekatan Sistemik M.A.K. Halliday" dalam PELLBA 7 (Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya: ketujuh) (Ed. Bambang Kaswanti Purwo). Yogyakarta: Kanisius.

Wooffit, Robin. 2005. *Conversation Analysis & Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction*. London: Sage.

Wodak, Ruth and Michael Meyer. 2000. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: SAGE Publication.





Keseriusan Caleg Perempuan

Oleh Hikmatul Mustaghfiroh

Pemilu 2014 sudah di depan mata. Beberapa atribut kampanye calon anggota legislatif sudah

terpampang di setiap sudut strategis, meski masa kampanye belum dimulai. Di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi. Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen kuota perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

Jika kita amati secara seksama, sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya. Padahal, hampir semua partai memenuhi kuota 30 persen tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan.

Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial, yakni adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan.

Melihat fenomena ini, ada beberapa argumen untuk menganalisis realitas sosial politik tersebut. Pertama, kuota politik perempuan dalam konteks ini hanya bersifat formalitas belaka. Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekedar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja, sehingga pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan asal pasang saja.

Sejak awal, tampaknya tidak ada komitmen dari partai ataupun caleg yang bersangkutan untuk memperjuangkannya secara serius. Di lapangan, sangat sedikit caleg perempuan yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik.

Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu akan melahirkan eksploitasi perempuan dalam ranah politik. Bagaimana tidak, perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk pemenangan kepentingan poli-

tik semata. Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik, hanya akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik. Jika ini terjadi, maka emansipasi

perempuan dalam politik, sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang bolong.

Kesetaraan Gender

Ketiga, fenomena di atas menunjukkan ketidakefektifan kuota politik pada kaum perempuan. Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan, sehingga cita-cita mulia politik tidak akan terdistorsi oleh segenap formalisme administrasi. Lebih dari itu, perempuan akan bangkit dan berkembang dalam fitrah dan perannya dalam ranah publik secara alami.

Saya yakin, perempuan bisa hebat melalui potensi diri yang dimilikinya. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan-perempuan yang berhasil

di zaman dan bidangnya. Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan untuk berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan.

Namun saya juga yakin bahwa kebijakan kuota tersebut memiliki tujuan dan cita-cita luhur, meskipun dalam realitasnya sudah terdistorsi oleh keamanan kaum pria yang menjadi *mainstream*.

Kebijakan kuota perempuan harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik. Mengingat pilar legislatif merupakan pilar pembuat undang-undang dalam sistem trias politika, yang pada akhirnya akan menentukan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan gender. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun karakter para politisi itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyeret kaum pria saja. Tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi, bahkan termasuk korupsi kelas kakap.

Sederet nama, mulai dari Angelina Sondakh, Artalita Suryani, Hartati Murdaya sampai Ratu Atut Chosiyah, memberi bukti akan kecenderungan ini, sehingga tidak ada jaminan bahwa perempuan itu selalu baik dan lembut, sedangkan laki-laki itu jahat dan korup.

Membangun karakter para politisi—termasuk politisi perempuan—secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun politik bersih di negeri ini. Karena bagaimanapun, politik menjadi komando bagi penentuan hajat hidup orang banyak. (24)

—Hikmatul Mustaghfiroh, ibu rumah tangga, guru Madrasah Ibtidaiyah, di Kuching.

Halaman Perempuan memberi ruang bagi kaum wanita menulis berbagai masalah aktual tentang perempuan. Kirimkan naskah (sekitar 6000 karakter) + foto diri pose santai ke perempuan_sm@yahoo.co.id. Sebutkan alamat, nomor telepon, dan nomor rekening bank.

Anotasi



Desy,
pegawai swasta

PEREMPUAN berbondong-bondong menjadi calon anggota legislatif (caleg) merupakan hal yang positif. Namun, jangan sekedar mengikuti tren, apalagi hanya memenuhi kuota perempuan. Untuk itu, sebaiknya ada jaminan yang harus dibuktikan nantinya jika terpilih. Jangan sampai, caleg perempuan hanya terjebak dalam janji-janji politik kosong, yang membuat pemilih atau rakyat kecewa. (H80-24)



Kaisya Ulidma,
mahasiswa Undip

MENURUT saya, sah-sah saja wanita mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Terbukti, banyak wanita yang berhasil terjun di bidang politik. Saya ambil contoh Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi presiden RI. Lagi pula tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk terjun dalam kegiatan politik. (H74-24)



Elok Yuwanastwi,
PR Fave Hotel Adisucipto Solo

CALON anggota legislatif (Caleg) perempuan mempunyai kelebihan dibandingkan laki-laki. Dengan rasa empati yang menonjol, perempuan lebih unggul dalam mewakili rakyat. Dalam mewakili rakyat, yang dibutuhkan tidak hanya pintar, tetapi juga mempunyai pengertian mendalam atau empati yang besar, sehingga sadar jika dirinya benar-benar mewakili rakyat. (H80-24)



Ari Kiswati,
Caleg dari Partai Gerindra Dapil IV Kab. Batang

SAYA menjadi caleg dengan semangat membawa amanat rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan mengambil untuk rakyat. Jadi, tidak hanya dekat dengan rakyat saat mencalonkan saja, namun saya akan selalu berdamai dengan rakyat saat terpilih nanti. Mengemban aspirasi dan amanat rakyat. (ar-24)



Melinda Wita Satryani,
mahasiswa Undip

SAYA percaya saja pada caleg perempuan. Tak perlu dibedakan antara caleg perempuan dengan caleg laki-laki. Menurut saya, kini yang diutamakan adalah cara berpikir dan latar belakang pendidikannya. Sekarang era kesetaraan gender, di mana antara pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama, termasuk dalam bidang politik. (H74-24)



Lampiran 2

Keseriusan Caleg Perempuan

Pemilu 2014 sudah di depan mata. Beberapa atribut kampanye calon anggota legislatif sudah terpampang di setiap sudut strategis, meski masa kampanye belum dimulai. Di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi. Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen kuota perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

Jika kita amati secara seksama, sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya. Padahal, hampir semua partai memenuhi kuota 30 persen tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan.

Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial, yakni adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan.

Melihat fenomena ini, ada beberapa argumen untuk menganalisis realitas sosial politik tersebut. **Pertama, kuota politik perempuan dalam konteks ini hanya bersifat formalitas belaka.** Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja, **sehingga pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan asal pasang saja.**

Sejak awal, tampaknya tidak ada komitmen dari partai ataupun caleg yang bersangkutan untuk memperjuangkannya secara serius. **Di lapangan, sangat sedikit caleg perempuan yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik.**

Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu akan melahirkan eksploitasi perempuan dalam ranah politik. Bagaimana tidak, perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk kemenangan kepentingan politik semata. Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik, hanya akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik. Jika ini terjadi, maka emansipasi perempuan dalam politik, sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang bolong.

Kesetaraan Gender Ketiga, fenomena di atas menunjukkan ketidakefektifan kuota politik pada kaum perempuan. Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan, sehingga cita-cita mulia politik tidak akan terdistorsi oleh segenap formalisme administrasi. Lebih

dari itu, perempuan akan bangkit dan berkembang dalam fitrah dan perannya dalam ranah public secara alami.

Saya yakin, perempuan bisa hebat melalui potensi diri yang dimilikinya. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan-perempuan yang berhasil di zaman dan bidangnya. Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan untuk berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan.

Namun saya juga yakin bahwa kebijakan kuota tersebut memiliki tujuan dan citacita luhur, meskipun dalam realitasnya sudah terdistorsi oleh kemapanan kaum pria yang menjadi mainstream.

Kebijakan kuota perempuan harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik. Mengingat pilar legislatif merupakan pilar pembuat undang-undang dalam sistem trias politika, yang pada akhirnya akan menentukan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan gender. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun karakter para politisi itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyeret kaum pria saja. **Tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi, bahkan termasuk korupsi kelas kakap.**

Sederet nama, mulai dari Angelina Sondakh, Artalita Suryani, Hartati Murdaya sampai Ratu Atut Chosiyah, memberi bukti akan kecenderungan ini, **sehingga tidak ada jaminan bahwa perempuan itu selalu baik dan lembut, sedangkan laki-laki itu jahat dan korup.**

Membangun karakter para politisi—termasuk politisi perempuan—secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun politik bersih di negeri ini. Karena bagaimanapun, politik menjadi komando bagi penentuan hajat hidup orang banyak.

*****Hikmatul Mustaghfiroh,** ibu rumah tangga, guru Madrasah Ibtidaiyah, di Kudus.

Lampiran 3

Data kosakata dan tata bahasa

No	Klausa
1	<p>Lebih dari itu <i>perempuan</i> akan bangkit dan berkembang</p> <p>Sirk:Cause Pt:aktor Pr:material</p> <p>dalam fitrah dan perannya dalam ranah publik secara alami.</p> <p>Pt:range Sirk:location Sirk:cause</p>
2	<p><i>Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif</i> tentu saja</p> <p>Pt:aktor</p> <p>akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan gender.</p> <p>Pr:material Pt:goal Pt:recipien</p>
3	<p>Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan <i>30 persen kuota perempuan</i></p> <p>Pt:Actor Pr: Material Pt:Goal</p> <p>pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif</p> <p>Sirk:Loc</p>
4	<p>Faktanya, banyak partai politik yang memasang <i>DCT perempuan</i></p> <p>Pt:Act Pr:Material Pt:Goal</p> <p>hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja</p> <p>Sirk:Cause</p>
5	<p>Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu</p> <p>Pt:aktor</p> <p>akan melahirkan <i>eksploitasi perempuan</i> dalam ranah politik</p> <p>Pr:material Pt:goal Sirk:location</p>
6	<p>Namun, kiranya lebih efektif jika <i>emansipasi politik perempuan</i></p> <p>Konj. Sirk:manner Konj. Pt:goal</p>

	Dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan Pr:material Pt:range
7	Eksplorasi politik ini, alih-alih mengangkat <i>emansipasi perempuan</i> Pt:aktor Pr:material Pt:goal dalam ranah politik, hanya akan menjadikan <i>perempuan</i> Sirk:material Pr:material Pt:goal <i>sebagai komoditas politik.</i> Pt:role
8	Menurut saya, <i>pembangunan peran perempuan</i> pada ranah publik, Pt:goal Sirk:location khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan Pr:material Sirk:manner peraturan perundang-undangan
9	Bagaimana tidak, <i>perempuan</i> hanya digunakan untuk perlengkapan Pt:recipien Pr:material sirk:cause administrasi, demi untuk kemenangan kepentingan politik semata
10	Kesetaraan Gender Ketiga, fenomena di atas menunjukkan Pt:aktor Pr:material ketidakefektifan kuota politik <i>pada kaum perempuan</i> Pt:goal Pt:recipient
11	Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi <i>perempuan-perempuan</i> Pt:aktor Pr:material Pt:goal Pt:recipien yang berhasil di zaman dan bidangnya Pt:location
12	Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi Pt:Aktor Pr:material

	kesempatan <i>pada perempuan</i> untuk berdiri sendiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan Pt:goal Pt:recipien Sirk:cause
13	sehingga <i>pencantuman perempuan</i> dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja Konj. Pt:phenomenon Sirk:location Pr:mental Sirk:manner
14	<i>Kebijakan kuota perempuan</i> harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik Pt:phenomenon Pr:mental Pt:role Sirk:location
15	Jika kita amati secara serius, sangat sedikit <i>kaum perempuan</i> yang serius memperjuangkan pencaleganya Pr:Eksistensial Pt:Eksisten
16	Sampai di sini, tampaknya ada <i>perempuan</i> dengan realitas di lapangan Sirk:location Pr:eksistensial Pt:Eksisten adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg Pr:eksistensial Pt:Eksisten Sirk:location
17	Di lapangan, sangat sedikit <i>caleg perempuan</i> yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik Sirk:location Pr:eksistensial Pt:eksisten Sirk:manner
18	Tidak sedikit <i>kaum perempuan</i> yang terjerat kasus korupsi, termasuk Pr:eksistensial Pt:eksisten

	bahkan korupsi kelas kakap
19	Sehingga tidak ada jaminan bahwa <i>perempuan</i> selalu baik dan Konj. Pr:eksistensial Pt:eksisten Lembut
20	Saya yakin <i>perempuan</i> bisa hebat melalui potensi diri yang Pt:carrier Pr:relasional Pt:atribute Sirk:manner dimilikinya
21	Jika ini terjadi, maka <i>emansipasi perempuan</i> dalam politik, sebagaimana Sirk:Cause Pt:Carrier Sirk:Loc yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang Pr:Relasional Pt:Atribute bolong
22	Pertama, <i>kuota politik perempuan</i> dalam konteks ini hanya bersifat Pt:token Pr:relasional formalitas belaka. Pt:value
23	Membangun karakter para politisi— <i>termasuk politisi perempuan</i> — Pt:token secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun Pr:relasional Pt:value politik bersih di negeri ini Sirk:location

Lampiran 4

Struktur Teks

No	Kalimat	Kategori Genre
1.	<p>Pemilu 2014 sudah di depan mata. Beberapa atribut kampanye calon anggota legislatif sudah terpampang di setiap sudut strategis, meski masa kampanye belum dimulai. Di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi. Padahal, konstitusi sudah mengamankan 30 persen kuota perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif. (1)</p> <p>Jika kita amati secara seksama, sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya. Padahal, hampir semua partai memenuhi kuota 30 persen tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan. (2)</p>	Tesis
2.	<p>Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial, yakni adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan. (3)</p> <p>Melihat fenomena ini, ada beberapa argumen untuk menganalisis realitas sosial politik tersebut. Pertama, kuota politik perempuan dalam konteks ini hanya bersifat formalitas belaka. Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja, sehingga pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan asal pasang saja. (4)</p> <p>Sejak awal, tampaknya tidak ada komitmen dari partai ataupun caleg yang bersangkutan untuk memperjuangkannya secara serius. Di lapangan, sangat</p>	Argumen

sedikit caleg perempuan yang menindaklanjuti secara serius perjuangan politik. (5)

Kedua, kecenderungan pertama tersebut pada titik tertentu akan melahirkan eksploitasi perempuan dalam ranah politik. Bagaimana tidak, perempuan hanya digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk kemenangan kepentingan politik semata. Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik, hanya akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik. Jika ini terjadi, maka emansipasi perempuan dalam politik, sebagaimana yang menjadi cita-cita mulia konstitusi, hanya menjadi mimpi di siang bolong. (6)

Kesetaraan Gender Ketiga, fenomena di atas menunjukkan ketidakefektifan kuota politik pada kaum perempuan. Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundangundangan. Namun kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan, sehingga cita-cita mulia politik tidak akan terdistorsi oleh segenap formalisme administrasi. Lebih dari itu, perempuan akan bangkit dan berkembang dalam fitrah dan perannya dalam ranah public secara alami. (7)

Saya yakin, perempuan bisa hebat melalui potensi diri yang dimilikinya. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan-perempuan yang berhasil di zaman dan bidangnya. Era kesetaraan gender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan untuk berdiri setara dengan laki-laki tanpa

	<p>harus dikontrol melalui kebijakan. (8)</p> <p>Namun saya juga yakin bahwa kebijakan kuota tersebut memiliki tujuan dan cita-cita luhur, meskipun dalam realitasnya sudah terdistorsi oleh kemampuan kaum pria yang menjadi mainstream. (9)</p> <p>Kebijakan kuota perempuan harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem kesetaraan gender dalam ranah politik. Mengingat pilar legislatif merupakan pilar pembuat undang-undang dalam sistem trias politika, yang pada akhirnya akan menentukan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya kaum perempuan. (10)</p> <p>Peran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan gender. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun karakter para politisi itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menyeret kaum pria saja. Tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi, bahkan termasuk korupsi kelas kakap. (11)</p>	
3.	<p>Sederet nama, mulai dari Angelina Sondakh, Artalita Suryani, Hartati Murdaya sampai Ratu Atut Chosiyah, memberi bukti akan kecenderungan ini, sehingga tidak ada jaminan bahwa perempuan itu selalu baik dan lembut, sedangkan laki-laki itu jahat dan korup. (12)</p>	Elaborasi
4.	<p>Membangun karakter para politisi—termasuk politisi perempuan—secara simultan adalah salah satu cara bagaimana membangun politik bersih di negeri ini. Karena bagaimanapun, politik menjadi komando bagi penentuan hajat hidup orang banyak. (13)</p>	Reiterasi

Lampiran 5

Taksis dan Logi Semantik**1. Taksis**

Taksis merupakan posisi antarklausa yang mengacu kepada status atau kedudukan sebuah klausa dengan yang lainnya secara teknis. Taksis menunjukkan kesalingtergantungan sebuah klausa yang muncul di awal dan klausa kedua yang mengikutinya dan di antara klausa kedua dengan klausa ketiga dan klausa seterusnya. Taksis terbagi menjadi parataksis dan hipotaksis.

a) Parataksis

Parataksis merupakan kesalingtergantungan yang memiliki status sama. Parataksis merujuk pada hubungan antara dua unsur yang statusnya sama, yang satu berinisiatif dan yang satu lagi melanjutkan inisiatif tadi. Berikut klausa parataksis:

- (1) 1/// Di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi.
2// **Padahal**, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen kuota perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

Penggunaan konjungsi kordinatif **padahal** pada klausa di atas menyatakan makna pertentangan. Konjungsi tersebut mengandung informasi yang bertentangan dengan klausa sebelumnya, yakni *di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi*. Hubungan antara klausa pertama dan klausa kedua setara, tidak adak induk kalimat maupun anak kalimat.

- (2) 1/// Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial
2// **yakni** adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan

Pada data (2), konjungsi kordinatif **yakni** pada klausa di atas menyatakan makna penyamaan. Konjungsi ini berfungsi sebagai penerang atau penjelas dari satuan lingual *problem yang cukup* krusial pada klausa sebelumnya, yaitu *sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial*. Keberdaan klausa kedua pada data di atas bersifat setara karena antara klausa pertama dengan kedua tidak terdapat induk kalimat maupun anak kalimat.

- (3) 1/// Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik
2// **hanya** akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik
- (4) 1/// Bagaimana tidak, perempuan
2// **hanya** digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk kemenangan kepentingan politik semata
- (5) 1/// Pertama, kuota politik perempuan dalam konteks ini
2// **hanya** bersifat formalitas belaka.

Pada data (3), (4), dan (5), penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada klausa di atas menyatakan makna pembatasan. Penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada klausa di atas menyatakan makna pembatasan. Konjungsi ini berfungsi membatasi kata yang terletak sebelumnya pada data (3) artinya fitur lingual *akan menjadikan perempuan sebagai komoditas politik* sebagai pembatas dari satuan lingual *Eksploitasi politik ini, alih-alih mengangkat emansipasi perempuan dalam ranah politik*.

Selanjutnya, penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada data (4) di atas menyatakan makna pembatasan. Konjungsi ini berfungsi membatasi fitur lingual yang terletak sebelumnya, yaitu satuan lingual *digunakan untuk perlengkapan*

administrasi, demi untuk pemenangan kepentingan politik semata sebagai pembatas dari kata *perempuan*.

Penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada data (5) di atas menyatakan makna pembatasan. Konjungsi ini berfungsi membatasi kata yang terletak sebelumnya, yaitu satuan lingual *bersifat formalitas belaka* sebagai pembatas dari fitur lingual *kuota politik perempuan dalam konteks ini*.

- (6) 1/// Lebih dari itu, perempuan akan bangkit
2// **dan** berkembang dalam fitrah **dan** perannya dalam ranah publik secara alami

Pada data (6), penggunaan konjungsi kordinatif **dan** pada klausa di atas menyatakan makna penjumlahan. Konjungsi ini berfungsi sebagai penambah keterangan bahwa *perempuan* tidak hanya bisa *bangkit* tetapi juga *berkembang*. Selain itu, kebangkitan dan kemajuan perempuan tidak hanya dalam lingkup *fitrahnya* saja sebagai kaum hawa secara kodrati, tetapi juga *perannya* dalam Parpol.

- (7) 1/// Peran
2// **dan** partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan jender

Konjungsi kordinatif **dan** pada data (7) di atas menyatakan makna penjumlahan. Konjungsi ini berfungsi sebagai penambah keterangan bahwa *perempuan* tidak hanya *berperan* dalam Parpol saja tetapi harus *berpartisipasi* secara langsung dalam menyelesaikan problem yang terkait perempuan.

- (8) 1/// Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan

2// **dan** peraturan perundang-undangan

Pada data (8), penggunaan konjungsi kordinatif **dan** pada klausa di atas menyatakan makna penjumlahan. Konjungsi ini berfungsi sebagai penambah keterangan dari satuan lingual *Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan,* tetapi juga dengan *peraturan perundang-undangan.*

- (9) 1/// Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan-perempuan yang berhasil di zaman
2// **dan** bidangnya

Pada data (9), penggunaan konjungsi kordinatif **dan** pada klausa di atas menyatakan makna penjumlahan. Konjungsi ini berfungsi sebagai penambah keterangan bahwa *perempuan* tidak hanya berhasil di *zamannya* saja tetapi juga *bidang* lain yang dimiliki kaum hawa.

- (10) 1/// Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2// **Namun**, kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan

Pada data (10), penggunaan konjungsi kordinatif **namun** pada klausa di atas menyatakan makna pertentangan. Konjungsi tersebut mengandung informasi yang bertentangan dengan satuan lingual sebelumnya, yaitu *menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan.*

- (11) 1/// Tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi
2// **bahkan** termasuk korupsi kelas kakap

Pada data (11), penggunaan konjungsi kordinatif **bahkan** pada klausa di atas menyatakan makna penegas. Konjungsi ini berfungsi sebagai penanda kordinatif artinya tidak ada klausa yang tinggi dan rendah. Fungsi konjungsi tersebut menegaskan satuan lingual yaitu *tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi* yang ditegaskan dengan *termasuk korupsi kelas kakap*.

b) Hipotaksis

Hipotaksis merupakan kesalingtergantungan yang memiliki status yang tidak sama. Hipotaksis merujuk pada hubungan antara unsur yang berdiri sendiri dan dominasinya. Berikut contoh klausa hipotaksis.

- (12) α /// **Jika** kita amati secara seksama,
 β /// sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan
pencalegannya

Pada data (12), penggunaan konjungsi subordinatif **jika** pada klausa di atas menyatakan makna persyaratan. Konjungsi ini berfungsi menghubungkan dua klausa yang tidak sederajat artinya klausa pertama berupa satuan lingual *kita amati secara seksama* kedudukannya lebih tinggi, sedangkan klausa kedua berupa satuan lingual *sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya*, kedudukannya lebih rendah.

- (13) α /// Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT
perempuan hanya sekadar
 β /// **untuk** memenuhi syarat kualifikasi saja

Pada data (13), penggunaan konjungsi subordinatif **untuk** pada klausa di atas menyatakan makna tujuan. Pada klausa pertama diawali dengan subjek ‘banyak partai politik’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua *memenuhi syarat kualifikasi saja* merupakan tujuan yang dilakukan dari klausa pertama *faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekedar*.

- (14) α // Era kesetaraan jender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan
 β // **untuk** berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan

Pada data (14), penggunaan konjungsi subordinatif **untuk** pada klausa di atas menyatakan makna tujuan. Pada klausa pertama diawali dengan subjek ‘era kesetaraan jender’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua berupa satuan lingual *berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan* merupakan tujuan yang dilakukan dari klausa pertama berupa satuan lingual *era kesetaraan jender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan*

- (15) α // faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekedar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja.
 β // **sehingga** pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja

Pada data (15), penggunaan konjungsi subordinatif **sehingga** pada klausa di atas menyatakan makna pengakibatan atau hasil dari klausa pertama. Pada

klausa pertama diawali dengan subjek ‘banyak partai politik’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua berupa satuan lingual *pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja* merupakan bentuk akibat dari klausa pertama berupa satuan lingual *faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekedar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja*.

2. Logiko-Semantik

Sistem logiko-semantik memiliki dua tipe hubungan atas klausa, yaitu sistem logiko-semantik ekspansi (perluasan) dan sistem logiko-semantik proyeksi (penonjolan). Sistem logiko-semantik ekspansi sendiri memiliki tiga jenis hubungan, yaitu penonjolan atau elaborasi (=), perpanjangan atau ekstansi (+), dan kenaikan atau enhancemen (x). Sementara itu, sistem logiko-semantik proyeksi memiliki dua jenis hubungan, yaitu lokusi (“) dan ide (,). Berikut ini akan dijelaskan mengenai klausa kompleks dalam wacana *Kolom Perempuan* di harian *Suara Merdeka*.

a) Ekspansi (Perluasan)

Kategori ekspansi terdapat pada klausa yang mempunyai makna memperluas dengan ditandai hubungan logis tertentu, baik penanda hubungan logis berupa parataksis maupun hipotaksis. Dalam data, hubungan logis berkategori ekspansi, yaitu padahal, namun, hanya, bahkan, dan dan.

(16) 1/// Di antara atribut kampanye itu, foto caleg pria masih mendominasi.

+2// **Padahal**, konstitusi sudah mengamanatkan 30 persen kuota perempuan pada daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

Pada data (16), penggunaan konjungsi kordinatif **padahal** menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Hal itu dikarenakan klausa kedua bersifat memperluas dari lausa pertama. Sementara antara klausa pertama dan klausa kedua bersifat bertentangan artinya pernyataan yang diinformasikan klausa pertama tidak didukung klausa kedua. Bukti adanya pertentangan itu terlihat dari informasi klausa pertama yang menyatakan bahwa keberadaan foto caleg pria mendominasi sedangkan foto caleg perempuan minim. Padahal kuota keterlibatan celeg perempuan sudah termaktub dalam UU, semestinya foto caleg perempuan tidak kalah dengan foto caleg pria.

- (17) 1/// Menurut saya, pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikatrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 +2// **Namun**, kiranya lebih efektif jika emansipasi politik perempuan dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan.

Pada data (17), penggunaan konjungsi kordinatif **namun** pada klausa di atas menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Hal itu dikarenakan klausa kedua bersifat memperluas dari lausa pertama. Sementara antara klausa pertama dan klausa kedua bersifat bertentangan artinya pernyataan yang diinformasikan klausa pertama tidak didukung klausa kedua. Bukti adanya pertentangan itu terlihat dari informasi klausa pertama yang menyatakan bahwa pembangunan peran politik perempuan dalam politik tidak harus diatur dalam UU, tetapi pembangunan peran perempuan lebih efektif dilakukan dengan cara membangun kesadaran politik bagi kaum perempuan sendiri.

- (18) 1/// Sampai di sini, tampaknya ada problem yang cukup krusial,
 =2// **yakni** adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen
 caleg perempuan dengan realitas di lapangan

Pada data (18), penggunaan konjungsi kordinatif **yakni** menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis elaborasi. Hal itu dikarenakan informasi yang dinyatakan klausa kedua berupa fitur lingual *adanya ketimpangan antara idealitas kuota 30 persen caleg perempuan dengan realitas di lapangan* merupakan penjelas dari klausa pertama berupa satuan lingual *problem yang cukup krusial*. Jadi, klausa kedua tidak terdapat informasi baru, tetapi hanya bersifat menjelaskan.

- (19) 1/// Melihat fenomena ini, ada beberapa argumen untuk
 menganalisis realitas sosial politik tersebut. Pertama, kuota
 politik perempuan dalam konteks ini
 +2// **hanya** bersifat formalitas belaka.

Penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada data (19) di atas menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Hal itu dikarenakan klausa kedua berfungsi untuk memperluas pernyataan klausa pertama. Sementara itu, keberadaan klausa kedua hanya bersifat pembatas dari klausa pertama berupa satuan lingual *kuota politik perempuan dalam konteks ini* dibatasi klausa *bersifat formalitas belaka*. Dengan kata lain, kuota perempuan yang termaktub dalam UU belum diterapkan sebagaimana mestinya.

- (20) 1/// Bagaimana tidak, perempuan
 +2// **hanya** digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk
 pemenangan kepentingan politik semata.

Penggunaan konjungsi kordinatif **hanya** pada data (20) di atas menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Hal itu dikarenakan klausa kedua berfungsi untuk memperluas pernyataan klausa pertama. Sementara itu, keberadaan klausa kedua hanya bersifat pembatas dari klausa pertama artinya klausa kedua berupa satuan lingual *digunakan untuk perlengkapan administrasi, demi untuk pemenangan kepentingan politik semata* hanya bersifat pembatas dari kata *perempuan*. Dengan kata lain, perempuan dalam hal ini hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi demi kepentingan parpol serta menjadi alat dalam menarik simpatisan masyarakat.

- (21) 1/// Lebih dari itu, perempuan akan bangkit
 +2// **dan** berkembang dalam fitrah dan perannya dalam ranah publik secara alami.
- (22) 1/// Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bagi perempuan-perempuan yang berhasil di zaman
 +2// **dan** bidangnya.
- (23) 1/// Peran
 +2// **dan** partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tentu saja akan menentukan keberpihakan kepada kesetaraan jender.

Penggunaan konjungsi kordinatif **dan** pada data (21), (22), dan (23) di atas menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Klausa dengan konjungsi tersebut berfungsi untuk memperluas klausa dengan menambahkan informasi baru di dalamnya setelah konjungsi **dan**, yaitu perempuan tidak hanya bangkit, tetapi juga bisa berkembang. Selanjutnya, perempuan tidak hanya berhasil di zamannya, tetapi keberhasilan yang diraih oleh mereka disertai dengan kemampuan yang memadai di bidang masing-masing. Sementara itu, konjungsi

dan pada data (23) menunjukkan tidak adanya penambahan informasi baru karena kata *peran dan partisipasi* memiliki arti yang tidak beda. Meskipun konjungsi **dan** memiliki makna penjumlahan, tetapi konjungsi tersebut dalam data tidak mengandung makna penjumlahan.

- (24) 1/// Tidak sedikit kaum perempuan yang terjerat kasus korupsi
+2// **bahkan** termasuk korupsi kelas kakap

Penggunaan konjungsi kordinatif **bahkan** pada (24) di atas menunjukkan hubungan parataksis ekspansi jenis ekstensi. Klausa dengan konjungsi **bahkan** di atas berfungsi untuk memperluas klausa dengan menambahkan informasi baru di dalamnya sebagai, yaitu perempuan tidak hanya terkenal sebagai kaum hawa yang bersih dari perbuatan jahat khususnya korupsi, tetapi kaum hawa juga ada yang terjerat kasus korupsi bahkan kelas kakap.

- (25) α /// **Jika** kita amati secara seksama,
 β /// sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan
pencalegannya

Penggunaan konjungsi subordinatif **jika** pada (25) di atas menunjukkan hubungan hipotaksis ekspansi jenis ekstensi. Klausa dengan konjungsi **jika** di atas berfungsi menghubungkan dua klausa yang tidak sederajat artinya klausa pertama berupa satuan lingual *kita amati secara seksama* kedudukannya lebih tinggi, sedangkan klausa kedua berupa satuan lingual *sangat sedikit kaum perempuan yang serius memperjuangkan pencalegannya*, kedudukannya lebih rendah. Konjungsi ini bersifat memperluas karena menghadirkan klausa kedua sebagai anak kalimat.

- (26) α /// Faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT

perempuan hanya sekadar
 β // **untuk** memenuhi syarat kualifikasi saja

Pada data (26), penggunaan konjungsi subordinatif **untuk** pada klausa di atas menunjukkan hubungan hipotaksis ekspansi jenis ekstensi. Konjungsi pada klausa pertama diawali dengan subjek ‘banyak partai politik’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua *memenuhi syarat kualifikasi saja* merupakan tujuan yang dilakukan dari klausa pertama *faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekadar*. Konjungsi ini bersifat memperluas karena menghadirkan klausa kedua sebagai makna tujuan dari klausa pertama.

(27) α // Era kesetaraan jender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan
 β // **untuk** berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan

Pada data (27), penggunaan konjungsi subordinatif **untuk** pada klausa di atas menunjukkan hubungan hipotaksis ekspansi jenis ekstensi. Konjungsi pada klausa pertama diawali dengan subjek ‘era kesetaraan’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua berupa satuan lingual *berdiri setara dengan laki-laki tanpa harus dikontrol melalui kebijakan* merupakan tujuan yang dilakukan dari klausa pertama berupa satuan lingual *era kesetaraan jender yang saat ini menguat, sebenarnya memberi kesempatan pada perempuan*. Konjungsi ini bersifat memperluas karena menghadirkan klausa kedua sebagai makna tujuan dari klausa pertama.

- (28) α // faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja.
- β // **sehingga** pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja

Pada data (28), penggunaan konjungsi subordinatif **sehingga** pada klausa di atas menunjukkan hubungan hipotaksis ekspansi jenis *enhancement*. Pada klausa pertama diawali dengan subjek ‘banyak partai politik’, tetapi pada klausa kedua diawali dengan predikat. Keberadaan klausa kedua berupa satuan lingual *pencantuman perempuan dalam DCT terkesan asal cantum dan pasang saja* merupakan bentuk akibat dari klausa pertama berupa satuan lingual *faktanya, banyak partai politik yang memasang DCT perempuan hanya sekadar untuk memenuhi syarat kualifikasi saja*. Konjungsi ini bersifat memperluas karena menghadirkan klausa kedua sebagai makna hasil atau akibat dari dari klausa pertama.

b) Proyeksi (penonjolan)

Kategori proyeksi terdapat pada klausa merupakan bagian makna yang penting dari klausa yang diproyeksikan, baik berupa ujaran langsung maupun tidak langsung dengan ditandai hubungan logis tertentu. Dalam data, hubungan logis berkategori proyeksi, yaitu **bahwa**.

- (29) 1// Kesetaraan Jender Ketiga, fenomena di atas
menunjukkan
- “2// ketidakefektifan kuota politik pada kaum perempuan

Klausa parataksis proyeksi pada data (29) di atas merupakan hipotaksis proyeksi jenis ide. Klausa tersebut merupakan ujaran tidak langsung atau sebagai laporan dengan melesapkan konjungsi *bahwa*. Klausa tersebut menjelaskan satuan lingual *ketidakefektifan kuota politik pada kaum perempuan* diproyeksikan secara hipotaksis oleh kesetaraan jender yang ketiga, yakni kuota perempuan tidak efektif.

- (30) 1/// Menurut **saya**,
 ,,2// pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Klausa parataksis proyeksi pada data (30) di atas merupakan hipotaksis proyeksi jenis ide. Klausa di atas merupakan ujaran langsung yang disampaikan penulis teks dengan persona pertama (saya) sebagai representasi ide. Dalam hal ini penulis teks ingin mengatakan secara langsung bahwa *pembangunan peran perempuan pada ranah publik, khususnya politik, tidak harus dikontrol melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan*, tetapi lebih efektif dimulai dari pembangunan kesadaran berpolitik kaum perempuan sendiri sehingga terkesan tidak ada paksaan dari pihak lain.